

KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

DEPARTEMEN PERTANIAN
JAKARTA, JANUARI 2008



KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

**DEPARTEMEN PERTANIAN
JAKARTA, JANUARI 2008**



DAFTAR ISI

Bab	Hal
KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007	
KATA PENGANTAR	VII
RINGKASAN EKSEKUTIF	IX
I. PENGANTAR	3
II. KEADAAN/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN	7
III. UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI	11
3.1. Upaya-upaya Mendasar yang Dilaksanakan	12
3.2. Hasil-hasil yang Dicapai	15
3.2.1 Indikator Makro	15
3.2.2 Indikator Peningkatan Produksi	21
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DALAM Mendukung pertumbuhan SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007	34
4.1. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)	36
4.2. Pengembangan Kawasan dan Sentra Hortikultura	38
4.3. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan	39
4.4. Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tebu	40
4.5. Fasilitasi Pengembangan Jarak Pagar Sebagai Alternatif Sumber Energi Terbarukan	40
4.6. Akselerasi Pengembangan Kapas	41
4.7. Pemberdayaan Usaha Kelompok	41
4.8. Restrukturisasi Perunggasan (RP)	41
4.9. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui PMUK	42
4.10. Gerakan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/Beras (GP4GB)	42
4.11. Fasilitasi Alat Pasca Panen	43
4.12. Pengelolaan Infrastruktur Pertanian	43
4.13. Program Aksi Desa Mandiri Pangan	44
4.14. Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP)	44
4.15. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	45
4.16. Penyusunan Kalender Tanam dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Global	45
4.17. Pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan Program Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi (P4MI)	46
4.18. Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Teknologi Inovasi (Prima Tani)	46
4.19. Pengembangan Energi Alternatif	47
4.20. Bantuan untuk Lembaga Mandiri yangn Mengakar di Masyarakat (LM3)	47
4.21. Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)	48

4.22.	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang	49
4.23.	Pengawasan Lalulintas Komoditas Pertanian	54
4.24.	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian	56

V. LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKSANAKAN TAHUN 2008 59

5.1	Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian Tahun 2008	60
5.1.1	Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2008	60
5.1.2	Strategi Pembangunan Pertanian Tahun 2008	60
5.2	Sasaran Pembangunan Pertanian 2008	63
5.3	Program dan Kegiatan Tahun 2008	64
5.3.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	65
5.3.2	Program Pengembangan Agribisnis	68
5.3.3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	71
5.3.4	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	73
5.3.5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	73

VI. PENUTUP 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDB Triwulan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah) Tahun 2005-2007 (Triwulan III)	16
Tabel 2.	Perkembangan Nilai Tukar Petani, Indeks Daya Beli Petani, dan Indeks Insentif Berproduksi Petani di Tingkat Nasional, 2003-2007 (Tahun Dasar 1993=100)	16
Tabel 3.	NTP Nasional Bulan Januari s/d Oktober 2007 (1993=100)	17
Tabel 4.	Perkembangan Persetujuan PMDN, Menurut Sektor, 2005-2007	18
Tabel 5.	Perkembangan Persetujuan PMA, Menurut Sektor, 2005-2007	19
Tabel 6.	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia, Tahun 2004-2007	20
Tabel 7.	Perkembangan Neraca Ekspor Impor Sektor Pertanian, 2002-2007	21
Tabel 8.	Perkembangan Produksi Utama Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar) Tahun 2005-2007 *)	23
Tabel 9.	Perkembangan Produksi Buah-buahan di Indonesia, Tahun 2004-2007	25
Tabel 10.	Perkembangan Produksi Sayuran di Indonesia, Tahun 2004-2007	25
Tabel 11.	Perkembangan Produksi Tanaman Hias di Indonesia, Tahun 2004- 2007	25
Tabel 12.	Perkembangan Produksi Tanaman Biofarmaka di Indonesia, Tahun 2004- 2007	26
Tabel 13.	Populasi Ternak Tahun 2005-2007	27
Tabel 14.	Perkembangan Produksi Peternakan di Indonesia, Tahun 2005- 2007	28
Tabel 15.	Perkembangan Konsumsi Peternakan di Indonesia, Tahun 2005-2007	29
Tabel 16.	Perkembangan Luas Areal Perkebunan, Tahun 2005-2007	30
Tabel 17.	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan, Tahun 2005-2007	31
Tabel 18.	Produktivitas Tanaman Perkebunan, Tahun 2005-2006	31
Tabel 19.	Perkembangan KPTR Pengembangan Tebu	40
Tabel 20.	Perkembangan Jumlah Lokasi Pelaksana dan LUEP, Tahun 2003 – 2007	45
Tabel 21.	Produk Hukum di bidang Pertanian	50
Tabel 22.	Produk Regulasi dan Kebijakan Di bidang Pertanian	53
Tabel 23	Sasaran Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2008	64



PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor Pertanian Tahun 2007 ini telah dapat diselesaikan. Buku ini memuat informasi tentang upaya-upaya yang telah dilaksanakan berikut hasilnya yang dicapai sejak tahun 2005 hingga 2007 yang menggambarkan kinerja sektor pertanian serta capaian sasaran kegiatan strategis yang dilaksanakan Departemen Pertanian bersama Pemerintah Daerah melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Selain itu, juga memuat langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Selama tahun 2007 kinerja pembangunan sektor pertanian cukup baik. Diluar perkiraan banyak orang bahwa sektor pertanian berkontribusi cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang melebihi kontribusi dari sektor industri, terutama berkat dorongan peningkatan pesat produksi padi dan jagung. Demikian pula halnya dengan beberapa komoditas pada sub sektor perkebunan, peternakan dan hortikultura.

Penyusunannya buku ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh unit kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa, buku ini masih jauh dari sempurna. Koreksi dan saran penyempurnaannya untuk penyusunan yang akan datang tetap diharapkan. Akhir kata semoga buku ini bermanfaat.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr.Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I





RINGKASAN EKSEKUTIF

KINERJA SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

- (1) Sektor pertanian masih tetap akan berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional dapat dilihat dalam pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam meratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem.
- (2) Kinerja sektor pertanian merupakan refleksi dari hasil kerja bersama seluruh stakeholder terkait yang mendorong petani dan pelaku lainnya untuk menghasilkan komoditas pertanian secara efisien, produktif dan bermutu. Kinerja sektor ini juga tergantung pada kondisi iklim, kelancaran distribusi sarana dan hasil produksi, kebijakan di bidang pengairan dan tataguna lahan, kebijakan perbankan yang memihak kepada petani, kebijakan harga dan perdagangan.
- (3) Pertumbuhan PDB pertanian menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 2005. Sampai Triwulan III tahun 2007, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 4,62%, dibanding tahun 2006 dan merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh subsektor perkebunan (2,80 %), diikuti oleh peternakan (2,41 %) dan tanaman bahan makanan (2,30 %). Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada tahun 2007 mencapai 10,40 persen, dengan kontribusi terbesar dari subsektor tanaman bahan makanan sebesar 16,30 persen, diikuti oleh subsektor perkebunan 2,00 persen dan subsektor peternakan 2,00 persen.
- (4) Minat investor di sektor pertanian selama periode tahun 2004-2006 menunjukkan peningkatan cukup tajam. Persetujuan PMDN meningkat 126 persen dari Rp 1,92 triliun tahun 2004 menjadi Rp 4,34 triliun tahun 2005, kemudian meningkat lagi sebesar 54,61 % atau menjadi Rp.6,71 triliun tahun 2006. Sampai bulan Agustus 2007 persetujuan PMDN telah mencapai Rp. 18,18 triliun. Sementara itu, persetujuan PMA meningkat 122 persen dari 208,30 juta dollar AS tahun 2004 menjadi 461,80 juta dollar AS tahun 2005, kemudian meningkat lagi sebesar 44,98 persen menjadi 658,70 juta dollar AS tahun 2006. Sampai bulan Agustus 2007 persetujuan PMA telah meningkat menjadi 1,0691 juta dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa prospek bisnis di sektor pertanian cukup baik yang disertai dengan iklim investasi yang kondusif.
- (5) Sampai saat ini, sektor pertanian masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai sekitar separuh dari angkatan kerja nasional. Pada tahun 2004 tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian tercatat sebesar 40,61 juta orang, dan pada tahun 2005 mencapai 41,81 juta orang. Selanjutnya pada tahun 2006 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat menjadi 42,33 juta orang, atau 44,47 persen dari total pekerja. Pada tahun 2007 target tambahan lapangan kerja di sektor pertanian sebanyak 2,6 juta orang.
- (6) Masih tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menunjukkan peran sektor pertanian sebagai buffer dalam perekonomian nasional mengingat masih terbatasnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional.
- (7) Salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan umum ialah prevalensi jumlah penduduk miskin. Kemampuan Indonesia untuk menurunkan jumlah penduduk miskin

secara konsisten, terutama di pedesaan, merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin tahun 2006 mencapai 39,10 juta (17,75%). Sementara itu, sampai bulan Juli 2007, jumlah penduduk miskin telah menurun menjadi 37,17 juta (16,58%). Namun demikian, sekitar 63,4 % dari penduduk miskin tersebut tinggal di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Hal ini memperkuat lagi argumen tentang pentingnya memberikan prioritas pembangunan pada sektor pertanian. Menurut beberapa hasil penelitian, pertumbuhan sektor pertanian mencapai dua kali lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan dibanding sektor-sektor lainnya,

- (8) Variabel yang sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani adalah indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Secara nasional, NTP terus meningkat dari 96,93 pada tahun 2000 (Tahun dasar 1993 = 100) menjadi 116,63 pada tahun 2003. Pada tahun 2005 NTP mengalami penurunan menjadi 100,66, yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Melalui berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, rata-rata NTP pada tahun 2006 kembali meningkat menjadi 102,49, dengan kecenderungan yang terus membaik. NTP bulanan menunjukkan adanya pencapaian yang cukup tinggi seperti pada bulan Januari 2007 yang mencapai 108,29 dan pada bulan September 2007 mengalami sedikit penurunan menjadi 106,30.
- (9) Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa kebijakan Departemen Pertanian telah berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan NTP. Namun demikian, pembentukan NTP juga dipengaruhi oleh kebijakan sektor-sektor lainnya dalam menjaga stabilitas harga-harga output, input maupun harga-harga barang konsumsi.
- (10) Kinerja neraca perdagangan komoditas pertanian mengalami peningkatan secara konsisten dalam periode 2004-2006. Nilai ekspor komoditas pertanian tahun 2004

sebesar US\$ 9,9 milyar meningkat menjadi US\$ 11,6 milyar pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi US\$ 14,9 milyar pada tahun 2006. Sampai bulan September 2007 nilai ekspor telah mencapai US\$ 12,9 milyar. Sementara itu, nilai impor komoditas pertanian dalam periode yang sama hanya mengalami peningkatan relatif kecil yaitu dari US\$ 5,0 milyar tahun 2004 menjadi US\$ 5,1 milyar tahun 2005, US\$ 6,0 milyar tahun 2006 dan US\$ 4,7 milyar sampai bulan Juni 2007. Dengan demikian neraca perdagangan sampai September 2007 mencapai nilai sebesar US\$ 8,2 milyar.

- (11) Fakta tersebut merupakan bukti bahwa selain sebagai sumber pendapatan masyarakat dan berperan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, sektor pertanian juga mampu memberikan kontribusi dalam perbaikan neraca pembayaran. Peningkatan surplus perdagangan menunjukkan peningkatan daya saing produk pertanian di pasar internasional. Surplus neraca perdagangan pertanian ini akan semakin meningkat sejalan dengan program peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan investasi di bidang pengolahan hasil komoditas pertanian dan produk turunannya.
- (12) Sektor pertanian tetap menjadi andalan dalam penyediaan pangan. Ketersediaan pangan dalam bentuk kalori dan protein secara kuantitas masing-masing telah lebih dari 3.000 Kkal/kapita/hari dan lebih dari 74 gram/kapita/hari atau lebih tinggi dibandingkan rekomendasi ketersediaan 2.550 Kkal/kapita/hari dan 55 gram/kapita/hari. Konsumsi energi pada tahun 2005 di wilayah desa dan kota menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2004, yaitu dari 1986 kkal/kapita/hari (99,3%) menjadi 1996 kkal/kapita/hari (99,5%). Demikian juga untuk konsumsi protein, secara umum menunjukkan peningkatan dari 54,7 gram/kap/hari tahun 2004 menjadi 55,3 gram/kap/hari tahun 2005. Pada tahun 2006, konsumsi energi mencapai 1927 kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein menjadi 53,7 gr/kap/hari.

- Dalam hal pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) masih diperlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi. Tahun 2005 skor PPH sebesar 79,10, namun sedikit menurun menjadi 74,90 tahun 2006.
- (13) Produksi padi tahun 2007 (Angka Ramalan III) mencapai 57,07 juta ton GKG, meningkat 2,59 juta ton GKG atau 4,76% dibanding produksi tahun 2006. Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai selama ini. Peningkatan produksi padi tahun 2007 tersebut terjadi diluar Jawa sebesar 1,92 juta ton (7,85%) dan di Jawa sebesar 0,67 juta ton (2,24%). Di luar Jawa, peningkatan produksi disebabkan oleh naiknya luas panen sebesar 370,59 ribu hektar (6,09%) dan produktivitas sebesar 0,66 kw/ha (1,64%). Sedangkan di Pulau Jawa, disebabkan oleh peningkatan luas panen seluas 8,58 ribu ha (0,15%) dan produktivitas sebesar 1,09 kw/ha (2,08%).
- (14) Produksi jagung tahun 2007 (ARAM III) mencapai 13,28 juta ton pipilan kering, naik 1,67 juta ton atau 14,39% dibandingkan produksi tahun 2006. Pencapaian produksi jagung tahun 2007 sama halnya dengan padi merupakan produksi tertinggi yang pernah dicapai selama ini. Kenaikan produksi tersebut disebabkan karena kenaikan luas panen seluas 273,61 ribu hektar (8,18%) dan kenaikan produktivitas sebesar 1,99 kuintal/hektar (5,73%). Peningkatan produksi terjadi diluar Jawa 901.246 ton (18,31%) dan di Pulau Jawa 769.085 ton (11,50%). Di luar Jawa, peningkatan produksi disebabkan oleh naiknya luas panen 147.406 hektar (9,48%) dan produktivitas 2,55 kw/ha (8,05%). Sedangkan di Jawa, disebabkan oleh peningkatan luas panen 126.200 ha (7,04%) dan produktivitas 1,55 kw/ha (4,15%). Kenaikan luas panen dan produktivitas yang signifikan akibat makin meluasnya minat petani dalam menanam jagung, dan penggunaan benih varietas unggul bermutu terutama varietas hibrida yang disertai dengan penerapan teknologi pemupukan berimbang dan teknologi budidaya lainnya
- seseuai dengan anjuran.
- (15) Produksi kedelai tahun 2007 (ARAM III) mencapai 608,263 ton biji kering, mengalami penurunan 139,35 ribu ton atau 18,64% dibandingkan produksi tahun 2006. Penurunan produksi tersebut terjadi karena berkurangnya luas panen yang cukup luas yakni mencapai 116,11 ribu hektar (20,00%), sedangkan produktivitas mengalami kenaikan 0,22 kuintal/hektar (1,71%).
- (16) Peningkatan produksi tanaman pangan yang spektakuler tahun 2007 (terutama padi dan jagung), dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, kondisi iklim tahun 2007 memang sangat kondusif dengan curah hujan yang cukup tinggi dan musim kemarau relatif pendek. Kedua, perkembangan harga-harga komoditas pangan di dalam negeri yang meningkat cukup signifikan sebagai refleksi dari perkembangan harga di pasar dunia dan efektifitas kebijakan pemerintah. Ketiga, pengaruh berbagai kebijakan dan program pemerintah meliputi penetapan harga, pengendalian impor, subsidi pupuk dan benih, benih gratis, penyediaan modal, akselerasi penerapan inovasi teknologi, fasilitasi penyuluhan, dan lain-lain.
- (17) Peningkatan produksi hortikultura diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu untuk konsumsi, bahan baku industri, peningkatan ekspor dan substitusi impor. Dengan demikian peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan dibarengi dengan upaya pengembangan pasar dan promosi produk. Kegiatan pengembangan produksi telah memberikan dampak positif pada penumbuhan ekonomi regional, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan petani/pelaku usaha.
- (18) Secara keseluruhan produksi hortikultura menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi sebagai akibat pertambahan luas areal tanam sebelumnya, semakin banyaknya tanaman yang menghasilkan dari pertanaman sebelumnya,

berkembangnya teknologi produksi yang diterapkan petani, semakin intensifnya bimbingan dan fasilitasi kepada petani dan pelaku usaha, semakin baiknya manajemen usaha, dan adanya penguatan kelembagaan agribisnis petani. Perkembangan produksi hortikultura 2006 – 2007 untuk komoditas bawah merah, cabe, kentang, jeruk, durian dan mangga masing – masing sebesar 8,51, 12,01, 0,23, 15,88, 32,08 dan 14,80 persen.

- (19) Pada tahun 2007 populasi ternak ruminansia yaitu : sapi potong mencapai 11,4 juta ekor, sapi perah 0,4 juta ekor, kerbau 2,2 juta ekor, kambing 14,9 juta ekor, domba 9,9 ekor. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2006) populasi ternak mengalami peningkatan yaitu untuk sapi potong 4,5 persen, sapi perah 2,4 persen, kerbau 3,7 persen, kambing 7,9 persen, dan domba 9,8 persen. Sedangkan populasi ternak non ruminansia yaitu babi mencapai 6,8 juta ekor, kuda 0,4 juta ekor, ayam buras 317,4 juta ekor, ayam ras petelur 106,9 juta ekor, ayam ras pedaging 920,8 juta ekor dan itik 34,1 juta ekor. Bila dibandingkan dengan tahun 2006 populasi ternak mengalami peningkatan yaitu untuk babi 8,7 persen, kuda 3,6 persen, ayam buras 9,1 persen, ayam ras petelur 6,7 persen, ayam ras pedaging 15,5 persen dan itik 4,9 persen.
- (20) Pada tahun 2007 produksi daging sebanyak 2.169,8 ribu ton yang terdiri dari daging sapi dan kerbau 464,1 ribu ton, kambing dan domba 148,2 ribu ton, babi 198,9 ribu ton, ayam buras 349,0 ribu ton, ayam ras pedaging 918,5 ribu ton dan ternak lainnya 91,1 ribu ton. Produksi daging terbesar disumbang oleh ayam ras pedaging (42,3 persen), sapi dan kerbau (21,4 persen), ayam buras (16,1 persen) dan babi (9,2 persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2006 produksi daging mengalami peningkatan sebesar 4,8 persen dengan peningkatan terbesar berasal dari ternak domba sebesar 63,4 persen, diikuti oleh ternak kuda 35,2 persen. Produksi ternak yang mengalami penurunan adalah ayam ras pedaging sebesar 3,9 persen. Produksi telur pada tahun 2007
- adalah 1297,2 ribu ton yang terdiri dari telur ayam buras 212,5 ribu ton, ayam ras petelur 882,2 ribu ton dan itik 202,5 ribu ton. Sedangkan produksi telur terbesar disumbang oleh telur ayam ras 68,0 persen, telur ayam buras dan itik hampir sama yaitu 16,0%. Bila dibandingkan dengan tahun 2006 produksi telur mengalami kenaikan sebesar 7,7 persen dengan kenaikan yang terbesar berasal dari ayam buras sebesar 9,6 persen .
- (21) Produksi susu pada tahun 2007 sebanyak 636,9 ribu ton yang seluruhnya berasal dari sapi perah. Bila dibandingkan dengan tahun 2006 produksi susu mengalami kenaikan sebesar 3,3 persen.
- (22) Luas areal komoditas perkebunan tahun 2007 berdasarkan angka estimasi akan naik 0,45 persen dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 17,6 juta ha menjadi 17,7 ha dengan peningkatan paling tinggi masih untuk komoditas kelapa sawit. Produksi komoditas perkebunan tahun 2007 berdasarkan angka estimasi akan naik 3,74 persen dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 26,06 juta ton menjadi 27,03 juta ton. Kontribusi utama dari tanaman tahunan meliputi karet sebesar 2,60 juta ton, kelapa sawit sebesar 16,83 juta ton, kopi sebesar 570,67 ribu ton, kakao sebesar 841,68 ribu ton dan kelapa sebesar 3,22 juta ton. Sedangkan untuk tanaman semusim produksi tebu mencapai 2,32 juta ton.
- (23) Khusus untuk komoditi tebu perkembangan pelaksanaan giling Musim Tanam Tahun 2007 sampai dengan bulan September 2007 mencapai areal seluas 322,69 ribu ha, produksi tebu sebesar 24,78 juta ton dengan rendemen rata-rata sebesar 7,39 persen. Hablur yang dihasilkan sebesar 1,83 juta ton dengan produktivitas tebu 76,8 ton/ha dan produktivitas hablur 5,67 ton/ha serta produksi tetes 1,05 juta ton.
- (24) Secara umum kondisi harga komoditas pertanian nasional mengalami peningkatan terutama untuk beberapa komoditas pangan strategis seperti gabah/beras, jagung dan

- CPO. Peningkatan harga komoditas pertanian utamanya ditingkat petani akan memberikan insentif tambahan bagi pengembangan kegiatan usahatani.
- (25) Penetapan HPP gabah dan beras merupakan salah satu kebijakan dalam upaya mengangkat harga yang diterima di petani. Fakta menunjukkan bahwa harga gabah di tingkat petani (GKP dan GKG) terus menunjukkan peningkatan seiring dengan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah. Sejak pertengahan 2005, harga gabah dan beras selalu lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan perberasan melindungi kepentingan petani, sehingga petani dapat menikmati harga yang lebih baik. Secara umum, pada periode 2000–2006 menunjukkan bahwa harga GKP di tingkat petani rata-rata berada di atas harga dasar (HPP). Demikian pula dengan harga gabah ditingkat petani di tahun 2007. Pada Bulan April 2007, rata-rata harga gabah ditingkat petani sekitar Rp 2192/Kg GKP atau Rp 2784/Kg GKG yang berada di atas HPP sebesar Rp 2035/Kg GKP atau Rp 2575/Kg GKG.
- (26) Disamping harga beras, harga beberapa komoditas pertanian lainnya seperti jagung juga menunjukkan peningkatan dari Rp1000/Kg (2006) menjadi Rp 2400/Kg - Rp 2600/Kg (Oktober 2007). Sementara, harga jagung di level internasional pada waktu yang sama tampaknya sedikit di atas harga domestik yaitu sekitar 270 US \$/ton. Untuk harga patokan ekspor CPO domestik per Desember 2007 mencapai US \$ 862/ton, sementara harga internasional CIF Nort West Europe per November 2007 sebesar US \$ 952/ton.
- (27) Kebijakan dan program pembangunan pertanian dirancang sesuai dengan dinamika permasalahan dan kebutuhan petani dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pertanian sangat tergantung pada komitmen dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Sehubungan itu Departemen Pertanian telah mengerahkan upaya dan daya, baik dari kalangan birokrasi, peneliti, akademisi, masyarakat pertanian, perbankan, maupun kerjasama dengan negara-negara sahabat. Rancangan program telah disusun bersama dengan masyarakat pertanian, dan secara terus menerus telah disosialisasikan kepada publik untuk disempurnakan guna memperkuat sektor pertanian. Di antara sekian banyak kegiatan yang telah dilakukan, antara lain program memperkuat ketahanan pangan penduduk, upaya merehabilitasi dan memperbaiki kondisi lahan gambut sejuta hektar, pengembangan industri gula aren yang berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja, dan merekomendasikan teknologi padi hibrida yang berpeluang besar untuk menjadikan Indonesia benar-benar mandiri di bidang beras.
- (28) Kesungguhan dan upaya tersebut juga didukung oleh semakin meningkatnya APBN sektor pertanian, yang mana pada tahun 2007 APBN pertanian telah ditingkatkan menjadi Rp 8,7 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,4 triliun atau anggaran total sebesar Rp 10,1 triliun. Anggaran ini belum termasuk anggaran pendukung pertanian yang berada di luar Departemen Pertanian, seperti anggaran subsidi pupuk, anggaran Raskin, Kredit Ketahanan Pangan, pembangunan irigasi, infrastruktur perhubungan serta kelembagaan pertanian.
- (29) Bantuan benih unggul gratis bagi petani telah meningkat berturut-turut dari tahun 2004 sampai 2007 yaitu masing-masing sebesar Rp 80,9 milyar, Rp 106 miliar, Rp 115 miliar, dan Rp 1 triliun. Peningkatan dalam kurun waktu empat tahun tersebut mencapai 13 kali lipat. Hal ini dilakukan setelah mengkaji secara mendalam bahwa teknologi perbenihan sangat penting bagi peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, namun selama ini harganya masih memberatkan bagi petani. Penyaluran benih unggul periode Oktober 2006 sampai Mei 2007 adalah 61.400 ton yang cukup untuk pertanaman seluas 2,5 juta hektar.
- (30) Peningkatan sarana kerja penyuluh, pengamat hama, penanganan bencana alam di wilayah

pertanian dan penanganan penyakit hewan telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya pada tahun 2006, telah didistribusikan 5.000 unit kendaraan bermotor serta tambahan biaya operasional sebesar Rp. 250 ribu/orang/bulan bagi 28.000 tenaga penyuluh dan pada tahun 2007 disediakan biaya operasional dan insentif bagi pengamat hama sebesar antara Rp 1-1,5 juta/orang/bulan. Selanjutnya, pada tahun 2007 ini pula telah disiapkan formasi untuk mengangkat penyuluh kontrak dan pengamat hama sebanyak 7.288 orang yang prosesnya sedang berlangsung.

- (31) Kredit pertanian murah dan mudah diakses petani telah pula diperluas. Jika pada tahun 2004 kita menyediakan bantuan bunga sebesar Rp 1,3 triliun untuk mendukung kredit pertanian sebesar Rp 20,8 triliun, maka tahun 2007 telah ditingkatkan menjadi 2,5 kali lipat dan telah diperluas menjadi kredit bidang pangan dan bio-energi. Bahkan ditambah lagi dengan kredit penjaminan agunan yang mencapai Rp.1 triliun guna membuka akses bagi petani kecil mengambil kredit minimal sebesar Rp 5 juta dari perbankan.
- (32) Untuk melindungi petani dari resiko kejatuhan harga, pemerintah telah meningkatkan anggaran stabilisasi harga beras yang dikenal dengan Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP), dari Rp 162 milyar tahun 2004 menjadi Rp 299,93 milyar tahun 2007. Dana tersebut digunakan untuk pembelian gabah/beras sebesar 134.353 ton (Rp 232,43 milyar), jagung sebesar 30.347 ton (Rp 52,5 milyar) dan kedelai sebesar 8.671 ton (Rp 15 milyar). Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan program pembelian beras oleh BULOG dan kebijakan pengendalian impor beras.
- (33) Untuk memperbesar akses petani terhadap pembiayaan dari perbankan, pemerintah telah menempatkan dana penjaminan sebesar Rp 255 milyar pada lima bank pelaksana, dengan harapan dapat menyalurkan pembiayaan sampai 10 kali lipat dari nilai tersebut. Penyaluran kredit/pembiayaan SP-3 oleh

bank pelaksana sampai dengan Desember 2006 adalah Rp 18,8 milyar dan selanjutnya dari Januari sampai Mei 2007 telah mencapai sebesar Rp 107,745 milyar sehingga total dana yang telah disalurkan oleh bank pelaksana ke petani adalah sebesar Rp 126,6 milyar. Bila dilihat menurut subsektor, penyaluran kredit/pembiayaan SP-3 tersebut sampai dengan Mei 2007 untuk subsektor tanaman pangan sebesar 23,32 persen, hortikultura 1,83 persen, perkebunan 35,22 persen, peternakan 10,92 persen dan perdagangan pertanian 28,71 persen.

- (34) Untuk berbagai kegiatan bantuan langsung kepada petani, seperti penguatan modal usaha kelompok/koperasi petani (PMUK) yang pada tahun 2004 sebesar Rp. 282,2 milyar meningkat menjadi sebesar Rp. 581,9 milyar tahun 2006. Pada tahun 2007 kegiatan bantuan langsung masyarakat ini diperluas menjadi berbagai bentuk kegiatan, masing-masing kegiatan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3) untuk membantu pondok pesantren, vihara, pasraman, gereja, dan lain-lain sebesar Rp. 250 milyar, PMUK sebesar Rp. 116 milyar, dan untuk peningkatan produksi dan produktivitas sebesar Rp. 315 milyar.
- (35) Ketersediaan pupuk hingga di tingkat petani penting untuk dilakukan dengan memenuhi azas enam tepat, yakni tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan tepat harga, sehingga petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi. Pengembangan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/04/2007 tentang Penyempurnaan dan Revisi Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi. Disamping itu, efektivitas penggunaan pupuk di tingkat petani juga dilakukan dengan mendorong pengembangan penggunaan pupuk organik.
- (36) Anggaran subsidi pupuk pada tahun 2007 sebesar Rp.5,797 triliun, termasuk biaya pengawasan sebesar Rp.20 milyar. Kebijakan

subsidi pupuk tersebut telah turut mendorong pencapaian sasaran produksi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Program/kebijakan yang terkait dengan bidang pupuk juga diarahkan untuk peningkatan efektivitas penggunaan pupuk di tingkat petani melalui optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi dan non bersubsidi yang telah terdaftar di Departemen Pertanian.

- (37) Disamping alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, Pemerintah mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) empat jenis pupuk utama. Berdasarkan SK Permentan No. 505/Kpts/SR.130/12/2005 tanggal 26 Desember 2005 serta Permentan No. 04/Permentan/SR.130/2/2006, maka HET pupuk Urea ditetapkan sebesar Rp.1.050,00/kg, SP-36 Rp.1.400,00/kg, ZA Rp.950,00/kg dan NPK Rp.1.600,00/kg. HET pupuk tersebut berlaku hingga adanya Peraturan Menteri Pertanian yang baru, yakni Permentan No. 66 Tahun 2006. Dengan demikian pada saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk Urea adalah Rp1.200,00/kg, SP-36 Rp1.550,00/kg, ZA Rp1.050,00/kg dan NPK Rp1.750,00/kg.
- (38) Kebijakan pengembangan produksi padi periode 2006-2010 diarahkan untuk mempertahankan swasembada secara berkelanjutan. Swasembada dalam konteks kemandirian masih memberi toleransi terhadap penyediaan pangan melalui impor, tetapi dalam proporsi relatif kecil, tidak lebih dari 10 persen dari total produksi. Namun Departemen Pertanian telah menetapkan kriteria lebih ketat lagi, yaitu impor beras diharapkan tidak lebih satu persen dari total penyediaan. Harga gabah dan beras dua tahun terakhir ini cenderung berpihak kepada petani, karena selalu di atas HPP. Hal ini mengakibatkan pengadaan gabah/beras untuk memperkuat stok pemerintah oleh Bulog kerap bermasalah. Pengadaan beras oleh bulog terus menurun semenjak tahun 2001, dan hanya berkisar di bawah 0,5 juta ton.
- (39) Pada tahun 2007, telah dicanangkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Melalui program tersebut pemerintah menargetkan peningkatan produksi padi nasional sebanyak 2 juta ton setara beras tahun 2007 dan selanjutnya naik sebesar 5 persen/tahun. Sejumlah kebijakan disiapkan pemerintah untuk mendukung program P2BN seperti subsidi benih, padi hibrida, pupuk, pembiayaan usahatani dan pemberdayaan kelembagaan petani serta perluasan lahan pertanian melalui konversi lahan yang dilakukan per propinsi. Dengan kondisi iklim yang terpengaruh karena situasi pemanasan global, target pencapaian produksi padi nasional (berdasarkan aram III BPS) mencapai 57,05 juta ton GKG atau 82 persen dari target 58,1 juta ton GKG.
- (40) Dalam situasi perubahan iklim global dewasa ini produksi pertanian nasional utamanya padi masih bisa meningkat yang disebabkan oleh masih tingginya curah hujan untuk kebutuhan pertanaman padi, penyesuaian pertanaman baik waktu maupun pola tanam spasial sesuai kondisi wilayah, serta cukup tingginya harga komoditas pertanian yang menjadi sumber insentif utama dalam berusaha tani.
- (41) Sasaran pembangunan pertanian tahun 2008, adalah: pertumbuhan PDB pertanian sekitar 3,50-3,60 % dengan nilai sebesar Rp.315 trilyun, sedangkan penyerapan tenaga kerja mencapai 43,60 juta orang dengan tambahan tenaga kerja sebesar 2,6 juta orang. Sementara itu Nilai Tukar Petani diharapkan dapat berada pada kisaran 107-110. Produksi komoditas utama adalah sebagai berikut: Padi sebesar 60-61,1 juta ton; Jagung 15,9 -16,5 juta ton; Kedelai 0,85-0,90 juta ton; Gula 2,74 juta ton; Daging dan Sapi 0,372 ribu ton.
- (42) Kebijakan dan strategi pembangunan pertanian tahun 2008 dirancang sebagai bagian dan keberlanjutan dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Selain itu tentu saja kebijakan dan strategi tersebut merupakan komponen dari RKP 2008, khususnya dalam menunjang prioritas kedua RKP 2008 yaitu revitalisasi pertanian dan perdesaan, serta diselaraskan dengan kondisi

riil kemajuan pembangunan pertanian hingga saat ini dan antisipasi perubahan lingkungan strategis pembangunan pertanian ke depan. Sesuai dengan RKP 2008, ada tiga (tiga) kebijakan utama yang akan diimplementasikan Departemen Pertanian tahun 2008, yaitu: (1) Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan; (2) Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian; (3) Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan.

- (43) Dalam rangka implementasi kebijakan-kebijakan tersebut maka ada dua strategi besar yang akan ditempuh Departemen Pertanian tahun 2008, yaitu (a) Memperkokoh fondasi pembangunan pertanian melalui Panca Yasa, dan (b) Akselerasi pembangunan pertanian. Memperkokoh fondasi pembangunan pertanian melalui Panca Yasa, strategi yang ditempuh: (1) Penyediaan/perbaikan infrastruktur termasuk sistem perbenihan/ perbibitan dan riset; (2) Penguatan kelembagaan; (3) Perbaikan sistem penyuluhan; (4) Penanganan pembiayaan pertanian terutama upaya untuk memobilisasi dana masyarakat di Perbankan; (5) Fasilitasi pemasaran hasil pertanian. Sementara itu, akselerasi pembangunan pertanian dilakukan melalui perbaikan manajemen pembangunan pertanian dengan wilayah sebagai basis penanganan persoalan. Peran penyuluh akan diperkuat dan diperluas. Pendekatan tersebut, pada akan menuju pada arah Satu Desa, Satu Komoditas, Satu Penyuluh.
- (44) Dengan beragam jenis komoditas pertanian yang tumbuh di Indonesia, diperlukan pilihan fokus penanganan komoditas pertanian pada tingkat nasional yang dapat memberikan dampak nyata dan dirasakan hasilnya oleh petani, maupun masyarakat konsumen pertanian dalam kurun waktu tersebut. Dari sekian banyak komoditas pertanian yang diusahakan petani, terdapat lima komoditas pangan yang menjadi fokus perhatian di tingkat nasional, yaitu: swasembada padi berkelanjutan, swasembada jagung 2007-2008, swasembada kedelai 2011 (dipercepat), swasembada gula 2009 dan kecukupan daging sapi tahun 2010.
- (45) Pada tahun 2008, fokus komoditas unggulan yang akan dikembangkan secara intensif meliputi: (1) Tanaman pangan: padi, kedele, jagung, ubi kayu dan kacang tanah; (2) Hortikultura: kentang, cabe merah, bawang merah, mangga, manggis, pisang, anggrek, durian, rimpang dan jeruk; (3) Perkebunan : kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, tanaman serat, tebu, tembakau, dan cengkeh (tanaman obat); dan (4) Peternakan: sapi potong, kambing, domba, babi, ayam buras dan itik (unggas).
- (46) Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, pembangunan pertanian dilaksanakan melalui tiga program utama yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Program Pengembangan Agribisnis; dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Ketiga program utama tersebut didukung oleh dua program pendukung, yaitu: (1) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; dan (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.
- (47) Sesuai dengan rancangan, terdapat berbagai program yang telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat tani di pedesaan. Program-program tersebut antara lain adalah: (1) Program Kredit Skala Mikro misalnya Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) dan Bantuan Langsung Masyarakat – Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) serta Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK); (2) Program Penguatan Modal Kelompok Tani seperti Program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP); (3) Program Primatani; dan (4) Program Pengembangan Desa mandiri Pangan. Selain itu, juga dilaksanakan Program Aksi Peningkatan Produksi Padi (P2BN). Melalui program aksi ini, kenaikan produksi beras harus mencapai

minimal sebesar 2 juta ton atau setara dengan 3,5 juta ton gabah. Salah satu bentuk bantuan dalam upaya mencapai target tersebut adalah pemberian benih gratis, subsidi pupuk, dan berbagai bantuan pembiayaan seperti SP3 kepada petani.

(48) SP-3 merupakan skim yang dibangun dan telah dirintis Departemen Pertanian bekerjasama dengan Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses petani kepada fasilitas pembiayaan/kredit melalui mekanisme pembagian risiko antara Bank pelaksana dan pemerintah. SP-3 sangat prospektif untuk membantu percepatan pengembangan sektor pertanian dalam rangka revitalisasi pertanian. Oleh karena itu, kinerja fasilitasi skim ini akan terus ditingkatkan melalui sosialisasi intensif kepada segenap pemangku kepentingan sambil sekaligus menciptakan pola kerjasama melalui rekayasa kelembagaan dan penyusunan database sektor pertanian unggulan serta pengembangan sistem teknologi informasi yang bersifat on-line. Mulai tahun 2008, SP-3 dilebur menjadi program nasional yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penjamin PT ASKRINDO dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (PSPU).

(49) Pada tahun 2008, Departemen Pertanian juga akan melaksanakan program baru yaitu Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Program PUAP adalah program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan serta sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub-sektor. PUAP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Kesra. PUAP memiliki tujuan: (1) menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan; (2) meningkatkan pelaku usaha agribisnis pedesaan, terutama pengurus gabungan kelompok tani (Gapoktan), penyuluh, dan penyelia mitra tani; (3)

memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Lokasi PUAP difokuskan pada 10.000 desa miskin/tertinggal yang memiliki potensi pertanian dan sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengelola kegiatan PUAP.

(50) Secara lengkap sesuai dengan Tupoksi Departemen Pertanian, terdapat 38 kegiatan utama yang merupakan penjabaran dari tiga program utama dan dua program pendukung di atas. Secara fungsional program-program tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sarana dan Infrastruktur

Program sarana dan infrastruktur meliputi: (1) Pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur pertanian: lahan, air, jalan usahatani, jalan desa, perluasan areal panen, infrastruktur perbenihan; (2) Penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan perbenihan/ perbibitan; (3) Penyediaan bantuan benih/bibit kepada petani; (4) Pengembangan pusat pembibitan sapi; dan (5) Pendampingan penanganan pupuk bersubsidi;

2. Kelembagaan

Program kelembagaan mencakup: (1) Pembentukan dan pengaktifan Kelompok Tani dan Gapoktan; (2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok/Koperasi (PMUK), dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di masyarakat (LM3); (3) Revitalisasi UPJA dan Kelompok/Koperasi UPJA; (4) Pengembangan Desa Mandiri Pangan; (5) Pengembangan Desa Mandiri Energi; (6) Pengembangan sistem cadangan pangan dan pemberdayaan pangan lokal; (7) Pengembangan mutu

dan keamanan pangan; (8) Sertifikasi, penguatan Hak Atas Tanah, pencegahan konversi lahan; (9) Pengembangan pola kemitraan, contract farming, Badan Usaha Milik Petani dan lain-lain; dan (10) Peningkatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan Pertanian;

3. Sumberdaya Manusia

Program pengembangan sumberdaya manusia terdiri dari: (1) Pengembangan kegiatan magang Sekolah Lapang Pertanian; (2) Peningkatan kapasitas SDM petani dan Revitalisasi penyuluhan; (3) Pengembangan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian; dan (4) Penghargaan petani berprestasi;

4. Produksi

Program peningkatan produksi meliputi: (1) Peningkatan produksi dan produktivitas; (2) Mekanisasi pra panen; (3) Pengendalian OPT, Penyakit Hewan, dan Perkarantinaan; (4) Peremajaan dan revitalisasi perkebunan; dan (5) Pengembangan lahan potensial : pakarangan, pasang-surut, rawa, lebak dan lain-lain;

5. Pasca Panen dan Pasar

Program pengembangan pasca panen dan pasar mencakup: (1) Stabilisasi/kepastian Harga Komoditas Primer, antara lain: DPM-LUEP; (2) Mekanisasi Pasca Panen untuk menurunkan kehilangan dan peningkatan mutu hasil; (3) Pengembangan Industri Agro di pedesaan; (4) Pengembangan Pasar Tani; (5) Pengembangan Fasilitas Pelayanan Terpadu Agribisnis; (6) Perdagangan pangan dan komoditas pertanian antar-wilayah; dan (7) Kerjasama Perdagangan Internasional;

6. Teknologi

Program pengembangan teknologi

meliputi: (1) Pengembangan bahan baku bio-energi; (2) Pengembangan Pertanian Terpadu: Tanaman-Ternak-kompos-bio gas; (3) Pengembangan Pertanian Organik dan Penanganan Lingkungan Hidup; (4) Pengembangan dan diseminasi Inovasi mendukung pembangunan pertanian : budidaya, pasca panen, bioteknologi, Prima Tani; (5) Pengelolaan konservasi lahan dan air; (6) Pengembangan Sistem Isyarat Dini Rawan Pangan; dan (7) Pendidikan dan pelatihan bagi petani-peternak;

7. Permodalan

Program pengembangan permodalan terdiri dari: (1) Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3); (2) Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP); dan (3) Kerjasama pemanfaatan dan perluasan kredit pertanian, Lembaga Keuangan Mikro di pedesaan;

8. Kebijakan

Program kebijakan meliputi: (1) Kajian dan fasilitasi penyusunan kebijakan, regulasi dan peraturan perundang-undangan bidang pertanian; dan (2) Peningkatan Pelayanan dan Perizinan;

9. Kegiatan Pendukung Lainnya

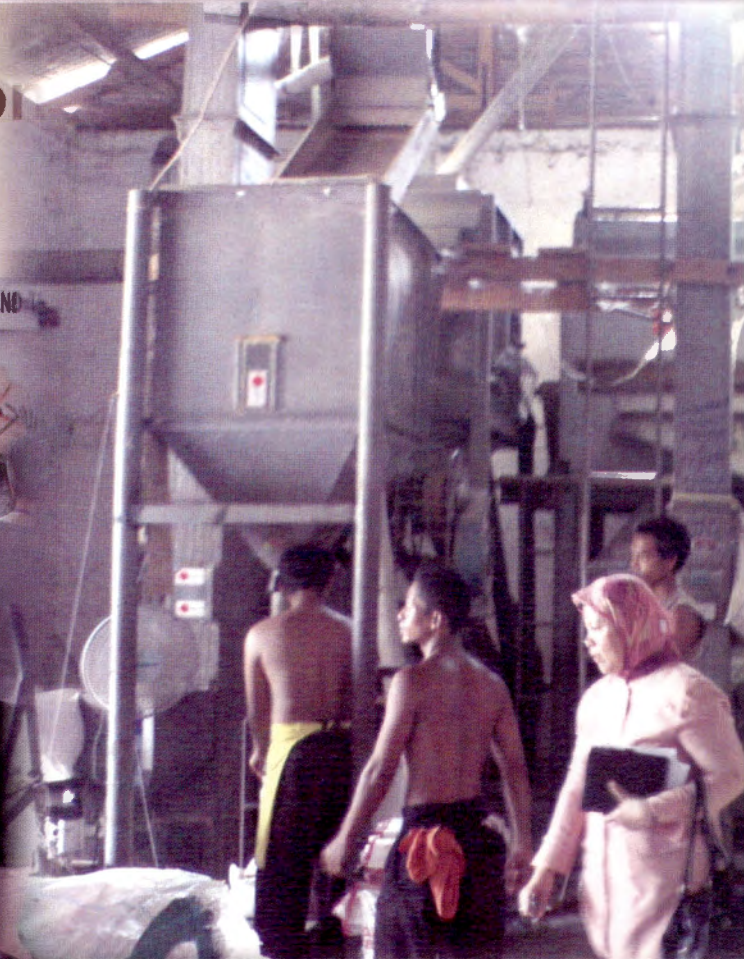
Kegiatan pendukung lainnya terdiri dari: (1) Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, sosialisasi kebijakan publik dan kehumasan; (2) Sinkronisasi, koordinasi dan penyelarasan program; (3) Pengembangan Data dan Informasi Pangan dan Pertanian; (4) Kajian pertanian dan potensi wilayah untuk menyusun perencanaan; (5) Koordinasi penanganan daerah bencana, konflik, tertinggal, dan perbatasan; dan (6) Pelaporan keuangan dan penanganan asset pemerintah.



Indonesia Solo Exhibition

MINISTRY OF AGRICULTURE

INDUSTRIAL AND





DEPARTEMEN PERTANIAN



BAB I PENGANTAR

Dalam pelaksanaan tiga tahun pembangunan pertanian era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), pembangunan pertanian masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan berat, antara lain: masih merebaknya wabah flu burung (*Avian Influenza*) di beberapa wilayah, dinamika harga saprodi utamanya pupuk, masalah import beras, kerawanan pangan, kemiskinan, ketenagakerjaan di bidang pertanian, alih fungsi lahan yang terus berlangsung dan semakin deras. Disamping itu, dalam tiga tahun terakhir ini berbagai bencana dan perubahan iklim semakin menambah rentetan permasalahan yang ada. Ini merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak agar pembangunan pertanian yang merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional dapat terus meningkat sumbangannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2007 mencapai 6,5 persen dibanding kuartal yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pertanian naik menjadi 4,3 persen.



Perkembangan ekonomi pada triwulan III 2007 menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan PDB pertanian menunjukkan kecenderungan yang meningkat sejak tahun 2005. Secara kumulatif tahun 2007 sektor pertanian tumbuh 2,44 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh subsektor perkebunan (2,80%), diikuti oleh peternakan (2,41%) dan tanaman bahan makanan (2,30%). Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada tahun 2007 mencapai 10,98 persen, dengan kontribusi terbesar dari subsektor tanaman bahan makanan sebesar 6,96 persen, diikuti oleh subsektor perkebunan 2,31 persen dan subsektor peternakan 1,70 persen.

Tahun 2007, diluar perkiraan banyak orang, kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,3 persen yang melebihi kontribusi sektor industri dan perdagangan yang tahun ini menyumbang masing-masing sebesar 1,2 persen. Produksi komoditas strategis utamanya padi dan jagung mengalami peningkatan yang sangat positif yaitu masing-masing 4,76 persen dan 14,39 persen dibanding produksi tahun 2006. Pencapaian angka produksi ini khususnya untuk padi adalah yang paling tinggi yang pernah dicapai selama ini. Perkembangan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Departemen Pertanian melalui berbagai kebijakan dan programnya.



DEPARTEMEN PERTANIAN



BAB II
KEADAAN/PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI DALAM
PEMBANGUNAN
PERTANIAN



Sebagai salah satu prioritas kebijakan untuk mewujudkan misi Indonesia yang sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, revitalisasi pertanian diharapkan mampu meningkatkan: ketahanan pangan; kapasitas dan kapabilitas petani dan keluarganya; akses petani terhadap sumberdaya dan informasi; serta peningkatan daya saing, mutu dan nilai tambah komoditas pertanian bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Revitalisasi pertanian ini akan menyumbang pada percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja baru.

Disamping memperkuat basis produksi komoditas penghasil devisa seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi, Pemerintah juga menempatkan lima komoditas pangan sebagai prioritas yang ditangani untuk swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, yaitu: padi, jagung, kedelai, gula tebu, dan daging sapi. Swasembada akan dicapai masing-masing pada tahun 2008 untuk jagung, 2011 untuk kedelai, 2009 untuk gula tebu, dan 2010 untuk daging sapi. Berdasarkan *road map* yang disepakati, Pemerintah mendorong masyarakat untuk mempertahankan swasembada beras yang sesungguhnya telah dicapai sejak tahun 2004 secara berkelanjutan. Tahun 2006 - 2007 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan perencanaan pertanian yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan RPJMN (2004-2009). Dalam kurun waktu tersebut telah cukup banyak upaya



perbaikan yang dilakukan guna memecahkan persoalan fundamental di bidang pertanian. Sebagai negara yang luas dengan jumlah penduduk yang besar serta kondisi agroklimat dan budaya yang variatif, banyak hambatan yang harus diatasi dalam mencapai sasaran-sasaran program yang telah disusun. Hal ini ditambah dengan masa transisi manajemen pemerintahan dari sistem yang sentralistik menjadi lebih desentralistik sehingga implementasi program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan juga menjadi beragam pula, ada yang menjalankannya dengan hasil melebihi sasaran yang ditentukan, tetapi adapula yang belum berhasil. Disamping itu, Pemerintah sedang dalam masa transisi pelaksanaan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana telah diundangkan antara lain dalam UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU No. 15/2004 tentang: Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Keterbatasan keuangan Pemerintah menyebabkan dukungan infrastruktur pertanian belum optimal untuk meyakinkan petani dan pengusaha pertanian meningkatkan investasinya di bidang pertanian. Namun demikian, Pemerintah telah secara sungguh-sungguh mempercepat revitalisasi pertanian ini. Hal ini salah satunya, ditunjukkan dengan meningkat pesatnya anggaran belanja pemerintah pada sektor pertanian dari Rp. 3,5 trilyun pada tahun 2003 menjadi Rp. 7,4 trilyun tahun 2006, dan Rp. 10,3 trilyun pada tahun 2007 termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pertanian sebesar Rp.1,4 triliun.

Perilaku petani yang masih berusaha tani secara individual, langkanya dokumen kepemilikan lahan, serta kesulitan di dalam mengakses dana perbankan masih mendominasi lambannya upaya pencapaian sasaran revitalisasi pertanian. Demikian pula halnya dengan perhatian Kepala Daerah terhadap pembangunan pertanian di wilayahnya masing-masing sangat bervariasi.

Kesemua persoalan tersebut di atas sangat mempengaruhi posisi tawar petani terhadap pelaku pasar lainnya, sehingga harga yang diterima petani belum sesuai dengan korbanan yang mereka keluarkan. Fenomena dimana pada saat panen raya harga jual komoditas pertanian sangat rendah dan sebaliknya meningkat pada saat petani sudah tidak memiliki produk, di beberapa lokasi masih menjadi masalah.

Keseluruhan sistem pertanian yang digambarkan tersebut, juga menyebabkan lambannya perkembangan mekanisasi pertanian baik pra maupun pasca panen, dengan intensitas berbeda antara wilayah satu dengan lainnya. Tiga tahun terakhir ini juga dunia pertanian harus berhadapan dengan berbagai bencana alam, seperti banjir, kekeringan, longsor, merebaknya serangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Penyakit Hewan, dan lain-lain. Penyakit flu burung, misalnya, yang disebabkan virus *Avian Influenza(AI)* sesungguhnya relatif dapat ditangani di peternakan, namun meningkatnya kasus kematian manusia sebagai akibat virus *AI* tersebut, mengharuskan percepatan penataan sistem peternakan rakyat. Berbagai produk hukum telah diterbitkan untuk menata peternakan rakyat ini yang pada umumnya mengarah kepada *best practices*.



The 2nd Indonesian Vegetables and Fruits Fair 2007 Singapore



DEPARTEMEN PERTANIAN



BAB III

UPAYA-UPAYA YANG
TELAH DILAKSANAKAN
DAN HASIL-HASIL YANG
DICAPAI



3.1. Upaya-upaya Mendasar yang Dilaksanakan

Sebagai penjabaran dari RPJMN dan Rencana Strategis Pembangunan Pertanian, permasalahan-permasalahan tersebut di atas telah diupayakan untuk diatasi dengan berbagai upaya bersama Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Secara umum, terdapat lima upaya mendasar yang pelaksanaannya masih dalam proses penyelesaian, yaitu yang disebut dengan **PANCAYASA**, yang terdiri dari: (1) Pembangunan/perbaikan Infrastruktur Pertanian, termasuk infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya; (2) Penguatan Kelembagaan Petani melalui penumbuhan dan Penguatan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; (3) Perbaikan Penyuluhan melalui penguatan Lembaga Penyuluhan dan Tenaga Penyuluh; (4) Perbaikan Pembiayaan Pertanian melalui Perluasan Akses Petani ke Sistem Pembiayaan; dan (5) Penciptaan Sistem Pasar Pertanian yang menguntungkan petani/peternak.

Kalau unsur Panca Yasa ini dapat dipenuhi, maka masyarakat petani dan pelaku pertanian akan mampu mengembangkan kemampuannya sendiri. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah bersama masyarakat menerapkan strategi sebagai berikut: (1) menggunakan pendekatan kawasan yang difokuskan untuk menghasilkan satu komoditas unggulan berbasis di pedesaan dengan bimbingan satu orang penyuluh; (2) melibatkan sebanyak-banyaknya organisasi bidang pertanian di wilayah yang bersangkutan; (3) mensinergiskan seluruh sumberdaya yang ada di kawasan yang bersangkutan. Seluruh strategi ini dituangkan dalam dokumen perencanaan yang terukur, berupa *master plan* dan *road map* pada berbagai tingkatan manajemen usaha.

Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian mendominasi belanja Pemerintah pada sektor ini, yang sebagian besar dilaksanakan melalui program padat karya (*cash for work*). Pada tahun 2006, total anggaran untuk perbaikan infrastruktur pertanian sejumlah Rp. 0,5 trilyun telah dibagikan sebagai upah kerja bagi buruh tani untuk memperbaiki saluran irigasi di berbagai

sentra produksi pertanian, dan telah memberikan pekerjaan kepada sekitar 10,7 juta hari orang kerja. Pendekatan ini telah memberikan manfaat bukan saja pada peningkatan kualitas jalan usaha tani dan pengairan, tetapi juga telah memberikan kesempatan petani dan keluarganya untuk mampu bertahan dalam menghadapi gejolak ekonomi yang cukup sulit pada awal tahun 2006. Bahkan pada akhir tahun 2006, salah satu indikator kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan kecenderungan meningkat. Untuk menekan laju alih fungsi lahan pada tahun 2007 telah dilakukan penyusunan kebijakan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Abadi (LPPA).

Tahun 2007 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam RPJMN 2004-2009 tersebut, Departemen Pertanian melaksanakan 3 (tiga) program utama pembangunan pertanian yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis, (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Disamping ke-3 program utama yang dilakukan setiap tahun tersebut, dalam rangka memperlancar fasilitasi pembangunan pertanian, juga ditetapkan 2 program pendukung, yaitu: (4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dan (5) Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik.

Pada setiap tahunnya, dalam rangka implementasi program pembangunan pertanian, Departemen Pertanian merumuskan berbagai kegiatan operasional yang diyakini akan mampu lebih mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Untuk tahun 2007, Departemen Pertanian menetapkan 28 (dua puluh delapan) kegiatan operasional yang disebut juga kegiatan utama, yaitu:

1. Pembentukan dan Pengaktifan Kelompok Tani dan Gapoktan
2. Bantuan Benih kepada Petani
3. Penjaminan Kredit Pertanian
4. Bantuan Bunga Kredit Modal Investasi
5. Stabilisasi/Kepastian Harga Komoditas

- Primer melalui Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP)
6. Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian
 7. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan Lembaga Mandiri yang Mengakar Di Masyarakat (LM3)
 8. Pengembangan Bahan Baku Bio-Energi
 9. Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Perbibitan
 10. Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk
 11. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan dan Perkarantinaan
 12. Pengembangan Kegiatan Magang Sekolah Lapang (SL) Pertanian
 13. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Petani dan Revitalisasi Penyuluhan
 14. Pengembangan Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pertanian
 15. Mekanisasi Kegiatan Produksi Komoditas Pertanian Primer (Pra Panen)
 16. Mekanisasi Kegiatan Pertanian Pasca Panen
 17. Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)
 18. Pengembangan Agroindustri Perdesaan
 19. Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas Pertanian
 20. Pengembangan Fasilitas Pelayanan Terpadu Agribisnis
 21. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian
 22. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan Pertanian
 23. Pengembangan Pusat Pembibitan Sapi
 24. Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas
 25. Pengembangan Pertanian Organik dan Lingkungan Hidup
 26. Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat, khususnya karet, kopi, kelapa sawit, kakao dan Jambu Mete
 27. Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Mendukung Pembangunan Pertanian

28. Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Kebijakan dan Regulasi.

Selain mencakup perbaikan fisik lahan dan irigasi, pembangunan infrastruktur pertanian juga mencakup penanganan sistem perbenihan maupun kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam hal perbenihan, data lapangan menunjukkan bahwa penggunaan benih unggul bermutu yang dihasilkan lembaga-lembaga penelitian masih belum banyak digunakan petani dengan berbagai macam sebab. Oleh karena itu, sejak tahun 2006 dan diperkuat pada tahun 2007, Pemerintah menyediakan insentif berupa benih tanaman dan bibit ternak unggul bermutu yang dibagikan secara cuma-cuma kepada petani dan peternak. Upaya ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada petani bahwa penggunaan bahan tanaman/bibit ternak unggul dapat meningkatkan pendapatan mereka berkat adanya peningkatan produktivitas. Program perbenihan ini, yang pada tahun 2004 nilainya baru mencapai Rp. 81 milyar, pada tahun 2007 telah ditingkatkan menjadi Rp. 1,1 trilyun. Kegiatan ini dilengkapi pula dengan penyediaan pupuk murah bagi petani melalui program pupuk bersubsidi yang nilainya terus ditingkatkan dari Rp. 1,6 triliun tahun 2004 menjadi Rp. 6,8 triliun pada tahun 2007.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian, lembaga penelitian dan pengembangan telah melakukan berbagai penelitian untuk menghasilkan berbagai teknologi unggul mulai dari varietas dan klon-klon tanaman maupun ternak, rekomendasi pemupukan, sistem pertanian di berbagai ekosistem, mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah, teknologi permesinan untuk pengolahan tanah maupun pengolahan bahan primer, hingga kajian-kajian sosial ekonomi dan budaya.

Untuk membantu petani dalam mengelola usahatani, Departemen Pertanian menyalurkan dana untuk kelompok melalui penguatan modal usaha kelompok (PMUK). Kegiatan PMUK ini juga berfungsi sebagai perekat pembentukan kelompok tani maupun koperasi pertanian. Efektivitas kegiatan ini di lapangan menunjukkan hasil positif. Di berbagai sentra produksi, kelompok dan koperasi pertanian berhasil meningkatkan produktivitas dan

posisi tawarnya terhadap pelaku usaha lainnya seperti pengusaha penggiling padi, pabrikan, pedagang, dan sebagainya. Petani tebu di Jawa misalnya, telah berhasil membentuk koperasi sekunder dengan aset yang cukup besar, berkisar antara Rp. 30–180 milyar per koperasi. Kenyataan ini menjawab kunci keberhasilan peningkatan produktivitas dan produksi gula nasional dari 1,75 juta ton pada tahun 2002 menjadi 2,31 juta ton pada tahun 2006. Sebagaimana diketahui, Penguatan Mudal Usaha Kelompok (PMUK) tebu telah dimulai sejak tahun 2003 yang terus dilaksanakan secara konsisten hingga saat ini. Berkaitan dengan PMUK ini, pada tahun 2006 telah dilaksanakan bantuan traktor roda empat dan roda dua sebanyak 250 unit serta 916 unit pompa air dan 18 unit silo jagung bagi petani, pendistribusian benih jagung gratis untuk 270.000 hektar senilai Rp. 100 milyar dan benih tanaman perkebunan senilai Rp 58 milyar, serta 5.700 ekor bibit sapi untuk mengembangkan pusat perbibitan sapi yang handal. Program ini terus dilanjutkan pada tahun 2008. Alokasi dana PMUK 2007 sebesar Rp. 116 milyar ditambah dengan dana untuk pengembangan lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) untuk mendorong pengembangan usaha pertanian di sekitar LM3 seperti pondok pesantren, vihara, pasraman, gereja, dan lain-lain sebesar Rp. 250 milyar serta untuk peningkatan produksi dan produktivitas Rp.315 milyar.

Di bidang penyuluhan, telah berhasil diterbitkan Undang-Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang diharapkan dapat merevitalisasi sistem penyuluhan dan sekaligus meningkatkan peran penyuluh pertanian di sentra-sentra produksi. Sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain: bersama pemerintah daerah secara bertahap melengkapi atau menghidupkan kembali lembaga-lembaga penyuluhan yang ada di daerah dalam wujud Badan Koordinasi Penyuluhan di Daerah, peningkatan sarana kerja dan penyediaan insentif bagi penyuluh. Pada tahun 2006, misalnya, telah didistribusikan 5.000 unit kendaraan bermotor serta tambahan

biaya operasional sebesar Rp. 250 ribu/orang/bulan bagi 28.000 tenaga penyuluh yang ada. Selanjutnya, pada tahun 2007 ini telah diangkat 6000 orang Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian, yang diperkuat pula dengan 1288 orang Tenaga Harian Lepas POPT/Pengamat Hama. Kepada Pengamat Hama ini disediakan biaya operasional dan insentif antara Rp. 1 – 1,5 juta/orang/bulan.

Pada tahun 2007 yang juga dilanjutkan dan bahkan diperkuat pada tahun 2008, sebagian besar APBN tersebut digunakan langsung untuk membantu petani/peternak memperkuat kapabilitas dan kemampuan berproduksi yang lebih baik dalam bentuk : (1) Pengembangan jaringan irigasi usahatani dan irigasi desa, pencetakan sawah, jalan usahatani, konservasi dan reklamasi lahan, pengembangan tata air mikro serta embung dengan nilai total Rp 1,2 triliun, (2) Bantuan langsung benih padi untuk luasan 4,2 juta hektar, jagung hibrida 600 ribu hektar dan kedelai 400 ribu hektar dengan nilai total hampir Rp 1 triliun, (3) Bantuan penguatan modal kepada 1140 Kelompok Masyarakat senilai Rp 257 miliar, (4) Bantuan Keringanan Investasi untuk petani sebesar Rp 400 miliar, (5) kontribusi untuk pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 635 miliar guna mengatasi kebutuhan penjaminan (*collateral*) bagi petani skala kecil. Plafon yang tersedia di Perbankan untuk KUR ini nilainya mencapai 14,5 triliun. Di samping itu, Pemerintah melalui perbankan menyediakan pula Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) sebesar 10,8 triliun dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan nilai Rp 1,5 triliun tahun 2007 yang akan ditingkatkan menjadi 4,5 triliun tahun 2008, (5) Untuk melindungi petani dari resiko kejatuhan harga, Pemerintah telah meningkatkan anggaran stabilisasi harga beras yang dikenal dengan Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Rp 300 miliar, (6) Revitalisasi penyuluhan serta persiapan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) telah dilakukan rekrutmen 10 ribu tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh (THLTB) untuk

melengkapi 6 ribu THLTB yang telah direkrut tahun sebelumnya, pelatihan bagi master pelatih 1060 orang, rekrutmen penyelia mitra tani 650 orang, penyediaan biaya operasional bagi 28.186 penyuluh PNS, pengembangan 1.474 Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan, fasilitasi 5.000 orang pendidikan kejuruan pertanian bagi wirausahawan muda, pengaktifan 20.000 Gapoktan, yang keseluruhannya menyerap dana sebesar Rp 893 miliar. Selain itu juga telah diberikan penghargaan kepada 1639 petani, 310 penyuluh pertanian dan 48 orang guru Sekolah Penyuluh Pertanian (SPP) atas prestasi mereka dalam mendukung berbagai upaya mensukseskan pencapaian target pembangunan Pertanian. Kepada mereka telah diberikan insentif finansial sebesar Rp 20 juta per orang. (7) Pengembangan Desa Mandiri Pangan di 604 Desa senilai Rp 91 miliar, (8) Sejumlah kegiatan lainnya mencakup kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan, perkarantina, pengendalian wabah virus flu burung pada hewan serta restrukturisasi perunggasan dengan total penyediaan dana mencapai Rp 750 miliar, (9) Pendistribusian 4.000 ekor sapi betina produktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan populasi sapi potong dan bantuan 12 ribu ekor ternak kambing dan domba senilai Rp 83 miliar, (10) Bantuan alat dan mesin pertanian pra dan pasca panen Rp 157 miliar, (11) Penyediaan kendaraan roda dua untuk petugas lapangan 1500 unit senilai Rp 21 miliar, (12) Di bidang pengembangan perkebunan rakyat dan hortikultura disediakan dukungan untuk peremajaan kebun, pengemasan dan penguatan modal usaha. Berkaitan dengan program Ketahanan Pangan Pemerintah menyediakan pula fasilitas pupuk murah yang pada tahun 2007 direalisasikan bantuan sebesar Rp 6,8 triliun untuk 4,5 juta ton pupuk urea, 800 ribu ton SP36, 700 ribu ton ZA dan 700 ribu ton NPK. Untuk memperbaiki struktur tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia telah disediakan pula anggaran untuk pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup yang nilainya mencapai Rp 20 miliar.

Dalam upaya antisipasi terhadap fenomena iklim yang terjadi secara global dan berpotensi

mengganggu proses produksi pertanian, tidak terkecuali di Indonesia, maka Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembenahan. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut antara lain dalam bentuk pengaturan pola tanam dan pemilihan varietas yang sesuai dengan fenomena iklim, pengembangan isyarat dini kemungkinan anomali iklim dan sosialisasi berbagai teknologi yang dapat meminimalisasi kerugian akibat gangguan iklim, termasuk penggunaan kalender tanam. Departemen Pertanian juga ikut aktif berpartisipasi dalam konferensi iklim internasional yang diselenggarakan bulan Desember di Bali.

Di bidang pelayanan masyarakat telah dilakukan deregulasi perizinan investasi perkebunan dari Pemerintah ke Propinsi dan Kabupaten, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Jumlah hari pelayananpun makin dapat dipersingkat. Sebagai contoh di bidang perkarantina untuk komoditas kulit pada saat ini hanya memerlukan waktu tiga hari. Peningkatan sarana dan metoda pengujian perkarantina telah pula disempurnakan, termasuk penyesuaian dengan peraturan internasional, akreditasi 83 fumigator, 43 perusahaan kemasan kayu dan efisiensi waktu pelayanan karantina di 704 pintu pelabuhan seluruh Indonesia.

3.2. Hasil-hasil yang Dicapai

3.2.1. Indikator Makro

1) PDB Pertanian

Sektor pertanian telah dan terus dituntut berperan dalam perekonomian nasional, antara lain melalui: pembentukan PDB, penerimaan devisa/ekspor, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam meratakan pembangunan melalui upaya pengurangan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat. Dengan demikian melalui pembangunan sektor pertanian terjadi perpaduan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan PDB pertanian menunjukkan kecenderungan yang meningkat sejak tahun

2005. Pada tahun 2007, secara kumulatif sektor pertanian tumbuh 2,44 persen (Triwulan II, 2005 – 2007, BPS 2007, berdasar harga konstan tahun 2000). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh subsektor perkebunan (2,80 %), diikuti oleh peternakan (2,41 %) dan tanaman bahan makanan (2,30 %). Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada tahun 2007 mencapai 10,4 persen, dengan kontribusi terbesar dari subsektor tanaman bahan makanan sebesar 16,30 persen, diikuti oleh subsektor perkebunan 2,0 persen dan subsektor peternakan dan lainnya 2,00 persen. Perkembangan pertumbuhan PDB tahun 2005-2007 disajikan pada tabel 1.

2) Kesejahteraan Petani dan Penduduk Perdesaan

Variabel yang sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani adalah indeks Nilai Tukar Petani (NTP), yakni indeks rasio harga yang diterima dengan harga yang dibayar oleh rumah tangga tani. NTP secara nasional terus meningkat dari 96,93 pada tahun 2000 (Tahun dasar 1993 = 100) menjadi 118,88 pada tahun 2003. Pada tahun 2005 NTP kembali mengalami penurunan menjadi 100,66, yang berdasarkan hasil penelitian disebabkan terutama oleh kenaikan harga BBM. Melalui berbagai upaya yang ditujukan untuk

Tabel 1. Perkembangan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah) Tahun 2005-2007 (Triwulan III)

LAPANGAN USAHA	2005		2006		2007*		Pertumbuhan (%)	
	Semester I	Trw. III	Semester I	Trw. III	Semester I	Trw. III	Tw.III'07 thd Tw.III'06	Smt.I '07 thd. Smt. I '06
1. PERTANIAN, PETERNAKAN,	128,579.2	69,315.0	133,583.5	70,856.0	136,046.9	77,164.2	8.9	0.02
PERTANIAN SEMPIT (3 SUB SEKTOR)	101,810.0	54,694.0	106,015.4	55,731.4	107,663.3	61,553.0	10.4	0.02
a. Tanaman Bahan Makanan	69,087.3	32,529.4	72,171.5	32,889.6	72,969.9	38,252.2	16.3	0.01
b. Tanaman Perkebunan	16,751.6	14,061.9	17,247.2	14,562.0	17,730.2	14,855.2	2.0	0.03
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	15,971.1	8,102.7	16,596.7	8,279.8	16,963.2	8,445.6	2.0	0.02
PRODUK DOMESTIK BRUTO	863,113.0	448,492.5	906,001.5	474,797.5	961,859.4	505,761.2	6.5	0.06
PDB TANPA MIGAS	790,444.4	412,108.3	834,543.4	439,200.9	890,869.4	469,652.9	6.9	0.07

* Angka sementara s.d Oktober 2007

meningkatkan kesejahteraan petani, rata-rata NTP pada tahun 2006 petani kembali meningkat menjadi 102,49, dengan kecenderungan yang terus membaik. Rincian perkembangan selengkapnya NTP dari tahun 2005 – 2006 disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perkembangan Nilai Tukar Petani, Indeks Daya Beli Petani, dan Indeks Insentif Berproduksi Petani di Tingkat Nasional, 2003-2007 (Tahun Dasar 1993=100)

Tahun	NTP 1)	IDBP 2)	ISPP 3)
2003	118.88	116.00	123.79
2004	117.35	121.00	113.57
2005	100.66	105.75	89.18
2006	102.49	106.49	93.01
2007 *)	106.97	110.96	97.30

Perubahan (% tahun)			
2004	-1.29	4.32	-8.26
2005	-14.22	-12.60	-21.47
2006	1.82	0.70	4.30
2007 *)	4.37	4.19	4.61

Sumber : PSEKP, Tahun 2006

Ket:

- 1) $NTP = IT/IB$
NTP = Nilai Tukar Petani
IT = Indeks Yang Diterima Petani
IB = Indeks Yang Dibayar Petani
 - 2) $IDBP = IT/IKRT$
IDBP = Indeks Daya Beli Petani
IKRT = Indeks Konsumsi Rumah Tangga
 - 3) $ISPP = IT/IBPPBM$
ISPP = Indeks Insentif Berproduksi Petani
IBPPBM = Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
 - 4) Rata-rata Januari – Juni 2006 terhadap rata-rata Januari – Juni 2005
- *) Data s/d Oktober 2007.

Nilai Tukar Petani bulanan menunjukkan adanya pencapaian yang cukup tinggi seperti pada bulan Januari 2007 yang mencapai 108,29 namun pada bulan Agustus 2007 mengalami penurunan menjadi 105,95. Rata-rata NTP selama Januari-Oktober 2007 sebesar 106,67. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) selama tahun 2007 (Januari s/d Oktober) disajikan pada tabel 3 berikut.

tenaga kerja pertanian meningkat lagi menjadi masing-masing Rp 6,09 juta dan Rp 6,55 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani selama periode 2003-2006 telah meningkat secara signifikan.

3) Investasi dan Kesempatan Kerja

Minat investasi di bidang pertanian primer (diluar

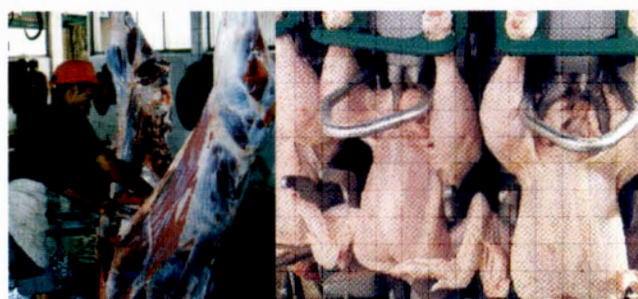
Tabel 3. NTP Nasional Bulan Januari s/d Oktober 2007 (1993=100)

KELOMPOK	2007									
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1. INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	633.32	653.02	648.30	622.92	623.73	628.28	631.68	633.69	642.51	649.96
1.1. INDEKS TANAMAN BAHAN MAKANAN	627.10	641.81	636.60	602.37	601.99	607.27	609.36	613.41	627.02	636.92
1.1.1. Padi	652.56	694.11	676.13	611.88	603.37	611.18	613.02	619.03	632.64	637.98
1.1.2. Palawija	591.51	604.11	615.04	605.24	606.57	607.98	608.12	618.73	635.10	646.86
1.1.3. Sayur-sayuran	582.53	565.12	551.97	533.41	540.67	565.56	564.65	550.68	575.40	592.08
1.1.4. Buah-buahan	704.83	703.10	710.54	713.94	716.49	716.49	722.76	726.64	743.44	753.99
1.2. INDEKS TAN. PERKEBUNAN RAKYAT	570.01	601.67	600.48	612.97	620.21	619.62	620.18	614.74	612.25	612.97
2. INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	584.86	594.02	594.70	590.41	590.29	592.31	594.4	598.09	604.46	609.33
2.1. INDEKS KONSUMSI RUMAHTANGGA	564.86	576.01	575.25	568.04	567.29	569.49	571.25	575.53	582.17	588.64
2.1.1. Makanan	573.24	590.97	588.04	572.00	567.82	570.78	572.37	576.76	584.39	592.82
2.1.2. Perumahan	569.80	574.56	576.82	579.80	583.27	584.54	586.41	590.81	597.74	601.52
2.1.3. Pakaian	537.47	540.33	541.87	543.10	543.95	543.72	545.83	548.88	556.63	564.92
2.1.4. Aneka Barang dan Jasa	547.22	551.30	552.29	553.58	556.34	558.89	560.62	564.84	567.73	570.72
2.2. INDEKS BIAYA PRODUKSI DAN PENAMBAHAN BARANG MODAL	639.09	643.24	648.42	652.09	654.21	655.67	658.52	660.36	665.73	666.54
2.2.1. Non Faktor Produksi	538.88	539.33	544.23	546.44	546.36	547.06	547.77	548.87	550.84	551.50
2.2.2. Upah	782.33	790.62	796.90	802.18	806.60	808.75	813.5	816.49	824.57	825.89
2.2.3. Lainnya	326.54	330.09	333.32	338.20	340.07	342.78	345.31	346.09	358.64	359.80
2.2.4. Penambahan Barang Modal	403.92	406.89	408.28	409.60	411.03	411.99	414.26	414.46	415.78	417.30
3. NILAI TUKAR PETANI	108.29	109.93	109.01	105.51	105.67	106.07	106.27	105.95	106.30	106.67

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan pendapatan petani adalah produktivitas tenaga kerja yang diukur sebagai nilai PDB per tenaga kerja di sektor pertanian. Berdasarkan data resmi BPS, pada harga konstan 2000, setelah menurun pada tahun 1998-1999, pendapatan tenaga kerja pertanian meningkat konsisten selama periode tahun 2000-2004. Rata-rata pendapatan tenaga kerja pada tahun 2003 sebesar Rp 5,09 juta dan meningkat menjadi Rp 5,49 juta pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 7,8 persen. Pada tahun 2005 dan 2006 rata-rata pendapatan

kehutanan dan perikanan) sepanjang 2004-2006 menunjukkan peningkatan cukup tajam. Persetujuan PMDN meningkat 126 % yaitu dari Rp 1,92 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp.4,34 triliun pada tahun 2005, kemudian meningkat lagi sebesar 54,61 % atau menjadi menjadi Rp.6,71 triliun pada tahun 2006 dan berdasarkan data yang diterima, bahwa sampai dengan bulan Oktober 2007 meningkat menjadi Rp. 18,88 triliun. Sementara itu, persetujuan PMA meningkat 122 % dari 208,30 juta dollar AS pada tahun 2004 menjadi 452,20 juta dollar AS pada tahun 2005, kemudian meningkat lagi sebesar 45,0 % atau

menjadi 658,70 juta dollar AS pada tahun 2006 dan tahun 2007 meningkat menjadi 1.069,10 juta dolar AS. Perkembangan Persetujuan PMDN dan PMA menurut sektor tahun 2005-2007 selengkapnya disajikan pada tabel 4 dan 5.



Tabel 4. Perkembangan Persetujuan PMDN, Menurut Sektor, 2005-2007

Sektor	2005		2006		2007*)	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
	(Jml)	(Rp. Milyar)	(Jml)	(Rp. Milyar)	(Jml)	(Rp. Milyar)
A. Sektor Primer	28	5,476.3	31	9,205.2	49	21,835.0
1. Pertanian	18	4,338.6	24	8,712.5	38	18,880.6
- Tanaman Pangan & Perkebunan	16	4,273.0	21	7,994.2	36	18,195.2
- Peternakan	2	65.6	3	718.3	2	685.4
2. Kehutanan	1	140.4	1	53.3	-	-
3. Perikanan	2	15.0	-	2.0	-	20.0
4. Pertambangan	7	982.3	6	437.4	11	2,934.4
B. Sektor Sekunder	121	26,807.5	138	131,753.3	117	138,251.3
1. Industri Hasil Pertanian	54	11,094.5	38	15,689.9	45	16,738.3
- Industri Makanan	40	8,072.8	24	13,789.3	28	16,000.6
- Industri Karet & Plastik	13	2,997.6	12	1,867.0	14	725.7
- Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	24.1	2	33.6	3	12.0
2. Industri Hasil Hutan	10	6,329.7	16	83,196.9	13	81,584.6
- Industri Kayu	5	307.8	6	731.5	4	175.9
- Industri Kertas & Percetakan	5	6,021.9	10	82,465.4	9	81,408.7
3. Industri Tekstil	11	710.4	9	1,279.0	6	774.4
4. Industri Kimia, mineral & Logam	46	8,672.9	75	31,587.5	53	39,154.0
- Industri Kimia & Farmasi	13	2,674.2	44	24,281.0	22	32,399.7
- Industri Mineral Non Logam	5	3,904.2	6	1,666.9	9	4,486.4
- Industri Logam Mesin & Elektronik	21	1,338.7	19	5,458.3	17	1,477.8
- Ind. Instru Kedokteran, Presisi & Optik & Jam	-	-	-	-	-	-
- Ind. Kendaraan Bermotor & Alat transportasi Lain	7	753.3	4	149.0	4	766.6
- Industri Lainnya	-	2.5	2	32.3	1	23.5
C. Tersier	69	18,293.5	56	21,808.7	71	15,474.2
- Listrik, Gas & Air	9	6,276.3	12	7,232.4	20	11,039.1
- Kontruksi	9	1,537.9	6	3,028.4	3	637.2
- Perdagangan & Reparasi	15	603.1	14	499.5	22	583.0
- Hotel & Restoran	9	4,049.7	8	8,913.7	8	1,386.8
Transportasi, Gudang & Komunikasi	15	2,375.2	12	1,930.3	7	397.6
- Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	-	-	-	1.0	3	216.7
- Jasa Lainnya	12	3,451.3	4	203.4	8	1,213.8
TOTAL	218	50,577.3	225	162,767.2	237	175,560.5

Sumber : Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
Keterangan : *) Data Sampai Oktober 2007

Tabel 5. Perkembangan Persetujuan PMA, Menurut Sektor, 2005-2007

Sektor	2005		2006		2007*)	
	Proyek (Jml)	Investasi (US\$.Juta)	Proyek (Jml)	Investasi (US\$.Juta)	Proyek (Jml)	Investasi (US\$.Juta)
A. Sektor Primer	99	1,372.4	128	991.8	233	2,009.8
1. Pertanian	25	452.2	49	658.7	49	1,069.1
- Tanaman Pangan dan Perkebunan	23	424.4	40	625.5	44	1,033.7
- Peternakan	2	27.8	9	33.2	5	35.4
2. Kehutanan	4	128.6	2	0.7	3	17.4
3. Perikanan	8	15.3	4	82.6	2	208.4
4. Pertambangan	62	776.3	73	249.8	179	714.9
B. Sektor Sekunder	438	6,093.7	350	7,215.0	370	25,541.3
1. Industri Hasil Pertanian	106	944.3	86	973.3	88	1,704.1
- Industri Makanan	63	699.0	37	859.3	52	1,417.3
- Industri Karet & Plastik	33	164.4	30	74.7	27	155.0
- Industri Barang Dari Kulit & alas kaki	10	80.9	19	39.3	9	131.8
2. Industri Hasil Hutan	31	335.3	30	1,218.8	40	7,100.3
- Industri Kayu	16	107.6	11	50.4	25	222.4
- Industri Kertas & Percetakan	15	227.7	19	1,168.4	15	6,877.9
3. Industri Tekstil	85	139.5	65	122.5	57	251.3
4. Industri Kimia, mineral & Logam	216	4,674.6	169	4,900.4	185	16,485.6
- Industri Kimia & Farmasi	43	2,888.3	45	1,202.7	37	14,975.3
- Industri Mineral Non Logam	10	368.2	6	756.5	6	316.5
- Industri Logam Mesin & Elektronik	102	695.6	65	2,539.0	83	806.0
- [nd. Instru Kedokteran, Presisi & Optik & Jam, Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	2	16.1	1	2.4	5	7.5
- Industri Lainnya	33	629.1	27	374.5	18	320.4
- Industri Lainnya	26	77.3	25	25.3	36	59.9
C. Tersier	1,112	6,169.5	921	5,018.4	1,005	9,199.9
- Listrik, Gas & Air	2	22.5	14	1,192.7	5	1,090.4
- Kontruksi	91	1,777.2	42	1,991.9	44	1,587.5
- Perdagangan & Reparasi	574	646.2	524	946.1	580	633.1
- Hotel & Restoran	86	258.4	54	207.0	85	279.3
- Transportasi, Gudang & Komunikasi	68	3,107.3	66	272.2	56	4,662.9
- Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	20	124.7	17	39.5	38	639.8
- Jasa Lainnya	271	233.2	204	369.0	197	306.9
TOTAL	1,649	13,635.6	1,399	13,225.2	1,608	36,751.0

Ket: *) Data sampai dengan Oktober

Hingga saat ini, sektor pertanian masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai sekitar separuh dari angkatan kerja nasional. Pada tahun 2004 tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian tercatat sebesar 40,61 juta orang, dan pada tahun 2005 mencapai 41,81 juta orang. Sementara itu, pada tahun 2006 penyerapan tenaga kerja pertanian terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun

2007 yaitu masing-masing sebesar 42,32 juta dan 42,61 juta orang. Angka-angka ini menunjukkan besarnya kapasitas sektor pertanian didalam menyerap tenaga kerja, terutama di pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus dijadikan pilar utama pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan tersebut. Perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tahun 2004-2007 selengkapnya disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia, Tahun 2004-2007

Sektor	2004	2005	2006	2007* (Orang)
Pertanian*	40,608,019	41,814,197	42.323.190	42.608.760
Non Pertanian	53.114.017	53.133.921	52.853.112	54.974.381
Total Angkatan Kerja	103.973.387	105.802.372	106.281.795	108.131.058

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan: * Pertanian termasuk (kehutanan, perburuan dan perikanan)

Data BPS menunjukkan bahwa usaha pertanian pada umumnya didominasi oleh usaha skala mikro-kecil. Usaha skala mikro-kecil tersebut relatif bertahan pada masa krisis dan berperan dalam menjaga laju pertumbuhan nasional pada periode dimaksud. Usaha skala mikro-kecil pertanian sebagian besar berada di pedesaan dan merupakan pencipta lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat. Untuk itu perlu keberpihakan bagi pengembangan usaha skala mikro-kecil, berupa integrasi kebijakan promosi bagi berkembang-kuatnya usaha skala mikro-kecil dan kebijakan perlindungannya. Salah satu bentuk fasilitasi untuk promosi usaha skala mikro-kecil pertanian adalah peningkatan kemampuan dalam mengaskes sumber permodalan. Oleh karenanya Lembaga Keuangan Mikro di pedesaan yang dilengkapi dengan dukungan kemudahan lainnya, seperti akses ke informasi dan iptek, akan terus kita kembangkan. Jika pada tahun 2006-2007 disediakan dana penjaminan sebagai penambah agunan bagi petani, maka pada tahun-tahun berikutnya akan diperkuat secara terintegrasi dibawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang akan dilaksanakan di lebih dari 10 ribu desa, dan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Program ini dimaksudkan sebagai basis bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru, terutama di pedesaan.

4) Neraca Perdagangan

Kinerja neraca perdagangan (*balance of trade*) komoditas pertanian (diluar kehutanan dan perikanan) mengalami peningkatan secara

konsisten dalam periode 2004-2006. Nilai ekspor komoditas pertanian tahun 2004 sebesar US\$ 9,9 milyar meningkat menjadi US\$ 11,6 milyar pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi US\$ 14,9 milyar pada tahun 2006, namun pada bulan September 2007 nilai ekspor mengalami penurunan menjadi US\$ 12,89 milyar (sumber BPS diolah Pusdatin Deptan). Sementara nilai impor komoditas pertanian dalam periode yang sama hanya mengalami peningkatan yang relatif kecil yaitu dari US\$ 5,0 milyar tahun 2004 menjadi US\$ 5,1 milyar tahun 2005, US\$ 6,0 milyar tahun 2006 dan pada bulan September 2007 menurun sebesar US\$ 4,680.

Fakta tersebut merupakan bukti bahwa selain sebagai sumber pendapatan masyarakat dan berperan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, sektor pertanian juga mampu memberikan kontribusi bagi perbaikan neraca pembayaran. Peningkatan surplus perdagangan menunjukkan daya saing produk pertanian di pasar internasional mengalami peningkatan secara konsisten. Dengan demikian program pemerintah dalam meningkatkan ekspor komoditas pertanian dan peran sektor pertanian dalam penerimaan devisa negara terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Surplus neraca perdagangan pertanian ini akan semakin meningkat sejalan dengan program peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan investasi di bidang pengolahan hasil komoditas pertanian dan produk turunannya. Perkembangan Neraca Ekspor-Impor sektor pertanian tahun 2002-2007 disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan Neraca Ekspor Impor Sektor Pertanian, 2002-2007

No.	Sub Sektor	2002	2003	2004	2005	2006	2006*)	2007*)	Pertbh. '07* thd '06* (%)
1	T.Pangan								
	- Ekspor	144,600,211	162,569,809	274,497,239	286,743,637	264,154,679	184,041,109	200,628,044	9.01
	- Impor	1,945,144,759	2,068,091,507	2,423,417,775	2,115,139,808	2,568,453,184	1,879,756,984	2,202,975,220	17.19
	- Neraca	-1,800,544,548	-1,905,521,698	-2,148,920,536	-1,828,396,171	-2,304,298,505	-1,695,715,875	-2,002,347,176	18.08
2	Hortikultura								
	- Ekspor	192,483,806	195,332,051	177,089,540	227,973,847	238,063,061	172,745,278	130,381,282	-24.52
	- Impor	327,168,931	309,663,696	344,791,048	367,424,554	527,415,016	412,052,902	302,367,966	-26.62
	- Neraca	-134,685,125	-114,331,645	-167,701,508	-139,450,707	-289,351,955	-239,307,624	-171,986,684	-28.13
3	Perkebunan								
	- Ekspor	5,969,516,982	6,876,667,333	9,107,466,305	10,673,184,297	13,972,062,214	10,115,423,685	12,292,541,777	21.52
	- Impor	1,342,619,542	1,472,661,506	1,323,371,273	1,532,519,642	1,675,067,153	1,273,225,050	1,396,646,823	9.69
	- Neraca	4,626,897,440	5,404,005,827	7,784,095,032	9,140,664,655	12,296,995,061	8,842,198,635	10,895,894,954	23.23
4	Peternakan								
	- Ekspor	255,850,967	301,276,550	328,536,645	396,526,312	388,939,499	282,358,835	268,481,370	-4.91
	- Impor	617,867,294	689,361,675	936,174,934	1,121,831,745	1,190,395,708	910,571,558	772,196,326	-15.20
	- Neraca	-362,016,327	-388,085,125	-607,638,289	-725,305,433	-801,456,209	-628,212,723	-503,714,956	-19.82
	PERTANIAN								
	- EKSPOR	6,562,451,966	7,535,845,743	9,887,589,729	11,584,428,093	14,863,219,453	10,754,568,907	12,892,032,473	19.87
	- IMPOR	4,232,800,526	4,539,778,384	5,027,755,030	5,136,915,749	5,961,331,061	4,475,606,494	4,674,186,335	4.44
	- NERACA	2,329,651,440	2,996,067,359	4,859,834,699	6,447,512,344	8,901,888,392	6,278,962,413	8,217,846,138	30.88

3.2.2. Indikator Peningkatan Produksi

1) Komoditas Tanaman Pangan



a) Produksi padi tahun 2007 (Angka Ramalan III) mencapai 57,07 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat

2,59 juta ton GKG atau 4,76% dibanding produksi tahun 2006. Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai selama ini. Peningkatan produksi padi tahun 2007 tersebut terjadi diluar Jawa sebesar 1,92 juta ton (7,85%) dan di Jawa sebesar 0,67 juta ton (2,24%). Di luar Jawa, peningkatan produksi disebabkan oleh naiknya luas panen sebesar 370,59 ribu hektar (6,09%) dan produktivitas sebesar 0,66 kw/ha (1,64%). Sedangkan di Pulau Jawa, disebabkan oleh peningkatan luas panen seluas 8,58 ribu ha (0,15%) dan produktivitas sebesar 1,09 kw/ha (2,08%). Peningkatan

produktivitas ini tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk menekan kehilangan hasil panen juga berperan dalam peningkatan produksi.

- b) **Produksi jagung** tahun 2007 (ARAM III) mencapai 13,28 juta ton pipilan kering, naik 1,67 juta ton atau 14,39% dibandingkan produksi tahun 2006. Pencapaian produksi jagung tahun 2007 sama halnya dengan padi merupakan produksi tertinggi yang



pernah dicapai selama ini. Kenaikan produksi tersebut disebabkan karena kenaikan luas panen seluas 273,61 ribu hektar (8,18%) dan kenaikan produktivitas sebesar 1,99 kuintal/hektar (5,73%). Peningkatan produksi terjadi diluar Jawa 901.246 ton (18,31%) dan di Pulau Jawa 769.085 ton (11,50%). Di luar Jawa, peningkatan produksi disebabkan oleh naiknya luas panen 147.406 hektar (9,48%) dan produktivitas 2,55 kw/ha (8,05%). Sedangkan di Jawa, disebabkan oleh peningkatan luas panen 126.200 ha (7,04%) dan produktivitas 1,55 kw/ha (4,15%). Kenaikan luas panen dan produktivitas yang signifikan akibat makin meluasnya minat petani dalam menanam jagung, dan penggunaan benih varietas unggul bermutu terutama varietas hibrida yang disertai dengan penerapan teknologi pemupukan berimbang dan teknologi budidaya lainnya seseuai dengan anjuran.

c)



Produksi kedelai tahun 2007 (ARAM III) mencapai 608,263 ton biji kering, mengalami penurunan 139,35 ribu ton atau 18,64% dibandingkan produksi tahun 2006. Penurunan produksi tersebut terjadi karena berkurangnya luas panen yang cukup luas yakni mencapai 116,11 ribu hektar (20,00%), sedangkan produktivitas mengalami kenaikan 0,22 kuintal/hektar (1,71%).

- d) **Produksi kacang tanah** tahun 2007 (ARAM III) mencapai 789,33 ribu ton biji kering, mengalami penurunan 48,77 ribu ton atau 5,82% dibandingkan produksi tahun 2006. Penurunan produksi tersebut terjadi karena berkurangnya luas panen seluas 47,09 ribu hektar (6,66%), sedangkan produktivitas mengalami kenaikan 0,11 kuintal/ha (0,93%).
- e) **Produksi kacang hijau** tahun 2007 (ARAM III) mencapai 314,57 ribu ton biji kering, mengalami penurunan 1,57 ribu ton atau 0,50% dibandingkan produksi tahun 2006. Penurunan produksi tersebut terjadi karena berkurangnya luas panen seluas 9,84 ribu hektar (3,18%), sedangkan produktivitas mengalami kenaikan 0,28 kuintal/ha (2,74%).
- f) **Produksi ubi kayu** tahun 2007 (ARAM III) mencapai 18,95 juta ton umbi basah, mengalami penurunan 1,04 juta ton atau 5,19% dibandingkan produksi 2006. Penurunan produksi tersebut terjadi karena berkurangnya luas panen seluas 78,57 ribu

hektar (6,40%), sedangkan produktivitas mengalami kenaikan 2,0 kuintal/ha (1,23%).

- g) Produksi ubi jalar tahun 2007 (ARAM III) mencapai 1,87 juta ton umbi basah, mengalami kenaikan 19,80 ribu ton (1,07%) dibandingkan produksi tahun 2006. Kenaikan produksi tersebut terjadi karena kenaikan luas panen seluas 341 hektar (0,19%), dan produktivitas naik 1,0 kuintal/ha (0,95%).
- h) Trend kenaikan produksi padi, jagung dan kedelai tahun 2005–2007 adalah sebagai berikut: untuk padi, produksi rata-rata meningkat 1,81%, luas panen meningkat 0,69% dan produktivitas meningkat 1,11% per tahun. Produksi jagung meningkat rata-rata 6,22%, luas panen meningkat 2,82% dan produktivitas meningkat 3,16%

per tahun. Produksi kedelai menurun rata-rata 4,81%, luas panen menurun 5,54%, sedangkan produktivitas meningkat rata-rata 0,77% per tahun.

Untuk komoditas ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau dalam periode 2005–2007 produktivitasnya semuanya mengalami peningkatan, sedangkan luas panen mengalami penurunan pada seluruh komoditas, dan produksinya mengalami penurunan kecuali kacang hijau. Peningkatan produktivitas yang cukup tinggi terjadi pada ubi kayu (2,17% per tahun), dan kacang hijau (1,84% per tahun).

Perkembangan produksi utama tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar) tahun 2005 - 2007 disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Produksi Utama Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar) Tahun 2005-2007 *)

Komoditas	ATAP	ATAP	ATAP	ARAM III	ATAP 2005		ATAP 2006		ARAM III 2007	
	2004	2005	2006	2007	Terhadap		Terhadap		Terhadap	
					ATAP 2004	ATAP 2005	ATAP 2004	ATAP 2005	ATAP 2006	ATAP 2006
					absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
Luas Panen (Ha)										
1 Padi	11,922,974	11,839,060	11,786,430	12,165,607	-83,914	-0.70	-52,630	-0.44	379,177	3.22
2 Jagung	3,356,914	3,625,987	3,345,805	3,619,411	269,073	8.02	-280,182	-7.73	273,606	8.18
3 Kedelai	565,155	621,541	580,534	464,427	56,386	9.98	-41,007	-6.60	-116,107	-20.00
4 Kacang Tanah	723,434	720,526	706,753	659,660	-2,908	-0.40	-13,773	-1.91	-47,093	-6.66
5 Kacang Hijau	311,863	318,337	309,103	299,267	6,474	2.08	-9,234	-2.90	-9,836	-3.18
6 Ubi Kayu	1,255,805	1,213,460	1,227,459	1,148,887	-42,345	-3.37	13,999	1.15	-78,572	-6.40
7 Ubi Jalar	184,546	178,336	176,507	176,848	-6,210	-3.37	-1,829	-1.03	341	0.19
Produktivitas(Ku/H)										
1 Padi	45.36	45.74	46.20	46.89	0.37	0.83	0.46	1.01	0.69	1.50
2 Jagung	33.44	34.54	34.70	36.69	1.10	3.29	0.16	0.46	1.99	5.74
3 Kedelai	12.80	13.00	12.88	13.10	0.20	1.56	-0.12	-0.94	0.22	1.70
4 Kacang Tanah	11.58	11.61	11.86	11.97	0.03	0.26	0.25	2.17	0.11	0.90
5 Kacang Hijau	9.95	10.08	10.23	10.51	0.13	1.30	0.14	1.44	0.28	2.77
6 Ubi Kayu	154.68	159.22	162.83	164.94	4.54	2.94	3.61	2.26	2.12	1.30
7 Ubi Jalar	103.05	104.13	105.05	105.97	1.07	1.04	0.92	0.89	0.92	0.87
Produksi (Ton)										
1 Padi	54,088,468	54,151,097	54,454,937	57,048,558	62,629	0.12	303,840	0.56	2,593,621	4.76
2 Jagung	11,225,243	12,523,894	11,609,463	13,279,794	1,298,651	11.57	-914,431	-7.30	1,670,331	14.39
3 Kedelai	723,483	808,054	747,611	608,263	84,571	11.69	-60,443	-7.48	-139,348	-18.64
4 Kacang Tanah	837,495	836,295	838,096	789,327	-1,200	-0.14	1,801	0.22	-48,769	-5.82
5 Kacang Hijau	310,412	320,963	316,134	314,566	10,551	3.40	-4,829	-1.50	-1,568	-0.50
6 Ubi Kayu	19,424,707	19,321,183	19,986,640	18,950,274	-103,524	-0.53	665,457	3.44	-1,036,366	-5.19
7 Ubi Jalar	1,901,802	1,856,969	1,854,238	1,874,036	-44,833	-2.36	-2,731	-0.15	19,798	1.07

Tabel 12. Perkembangan Produksi Tanaman Biofarmaka di Indonesia, 2004 - 2007

NO	KOMODITI	Produksi (000 kg)				Pertumbuhan (%)		
		2004	2005	2006	2007*)	2005 thdp 2004	2006 thdp 2005	2007 thdp 2006
1.	JAHE	104,788.63	125,827.41	177,137.95	190,285.93	20.08	40.78	7.42
2.	LAOS/LENGKUAS	24,298.85	36,292.53	44,369.52	48,038.67	49.36	22.26	8.27
3.	KENCUR	22,609.06	35,478.40	47,081.02	48,965.03	56.92	32.70	4.00
4.	KUNYIT	40,467.23	82,107.40	112,897.78	115,795.84	102.90	37.50	2.57
5.	LEMPUYANG	6,025.36	8,896.59	5,773.43	6,176.26	47.65	(35.11)	6.98
6.	TEMULAWAK	16,666.50	22,582.04	21,359.09	22,130.27	35.49	(5.42)	3.61
7.	TEMUIRENG	6,174.19	7,724.96	5,607.05	5,940.91	25.12	(27.42)	5.95
8.	KEJI BELING	699.70	1,348.44	1,902.69	1,936.43	92.72	41.10	1.77
9.	DRINGO	257.38	417.57	610.10	630.61	62.24	46.11	3.36
10.	KAPULAGA	4,218.04	7,179.32	13,144.13	13,919.86	70.21	83.08	5.90
11.	TEMUKUNCI	1,438.14	2,562.53	2,034.69	2,118.72	78.18	(20.60)	4.13
12.	MENGGUDU/ PACE*)	3,509.09	9,820.80	12,983.96	13,281.10	179.87	32.21	2.29
13.	SAMBILOTO	566.96	2,150.88	2,656.23	2,707.29	279.37	23.49	1.92
Jumlah Tan Biofarmaka		231,719.11	342,388.88	447,557.64	471,926.92	47.76	30.72	5.44

3) Komoditas Peternakan



a) Populasi Ternak.

Pada tahun 2007 populasi ternak ruminansia yaitu: sapi potong 11,4 juta ekor, sapi perah 0,4 juta ekor, kerbau 2,2 juta ekor, kambing 14,9 juta ekor, domba 9,9 ekor. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2006) populasi ternak mengalami peningkatan yaitu untuk sapi

potong 4,5 persen, sapi perah 2,4 persen, kerbau 3,7 persen, kambing 7,9 persen, dan domba 9,8 persen.



Sedangkan populasi ternak non ruminansia yaitu babi 6,8 juta ekor, kuda 0,4 juta ekor, ayam buras 317,4 juta ekor, ayam ras petelur 106,9 juta ekor, ayam ras pedaging 920,8 juta ekor dan itik 34,1 juta ekor. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2006) populasi ternak mengalami peningkatan yaitu untuk babi 8,7 persen, kuda 3,6 persen, ayam buras 9,1 persen, ayam ras petelur 6,7 persen, ayam ras pedaging 15,5 persen dan itik 4,9 persen. Perkembangan populasi ternak (ruminansia dan non ruminansia) tahun 2005-2007 selengkapnya disajikan pada tabel 13.

Tabel 13. Populasi Ternak Tahun 2005 - 2007

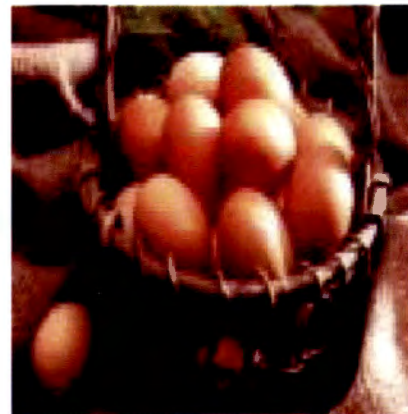
No.	Jenis	Tahun					Kenaikan (%)	
		2003	2004	2005	2006	2007 *)	2006 thd 2005	2007 thd 2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	RUMINANSIA							
1	Sapi Potong	10,504	10,533	10,569	10,875	11,366	2.89	4.51
2	Sapi Perah	374	364	361	369	378	2.12	2.37
3	Kerbau	2,459	2,403	2,128	2,167	2,246	1.79	3.67
4	Kambing	12,722	12,781	13,409	13,790	14,874	2.84	7.86
5	Domba	7,811	8,075	8,327	8,980	9,860	7.84	9.80
II	NON RUMINANSIA							
1	Babi	6,151	5,980	6,801	6,218	6,756	-8.57	8.66
2	Kuda	413	397	387	398	412	2.83	3.59
III	UNGGAS							
1	Ayam Buras	277,357	276,989	278,954	291,085	317,420	4.35	9.05
2	Ayam Ras Petelur	79,206	93,416	84,790	100,202	106,942	18.18	6.73
3	Ayam Ras Pedaging	847,744	778,970	811,189	797,527	920,851	-1.68	15.46
4	Itik	33,863	32,573	32,405	32,481	34,093	0.23	4.96

Keterangan: *) Angka sementara

b) Produksi Daging, Telur dan Susu.

1) Pada tahun 2007 **produksi daging** sebanyak 2.169,8 ribu ton yang terdiri dari daging sapi dan kerbau 464,1 ribu ton, kambing dan domba 148,2 ribu ton, babi 198,9 ribu ton, ayam buras 349,0 ribu ton, ayam ras pedaging 918,5 ribu ton dan ternak lainnya 91,1 ribu ton. Produksi daging terbesar disumbang oleh ayam ras pedaging (42,3 persen), sapi dan kerbau (21,4 persen), ayam buras (16,1 persen) dan babi (9,2 persen). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2006) produksi daging mengalami peningkatan 4,8 persen dengan peningkatan terbesar berasal dari ternak domba sebesar 63,4 persen, diikuti oleh ternak kuda 35,2 persen. Produksi ternak yang mengalami

penurunan adalah ayam ras pedaging sebesar (3,9 persen).



2) Besarnya **produksi telur** pada tahun 2007 adalah 1297,2 ribu ton yang terdiri dari telur ayam buras 212,5 ribu ton, ayam ras petelur 882,2 ribu ton dan itik 202,5 ribu ton. Sedangkan produksi telur terbesar disumbang oleh telur ayam ras 68,0 persen, telur ayam buras dan itik hampir sama yaitu 16,0%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2006) produksi telur mengalami kenaikan sebesar 7,7 persen dengan kenaikan yang terbesar berasal dari ayam buras sebesar 9,6 persen.

Tabel 16. Perkembangan Luas Areal Perkebunan, Tahun 2005-2007

No.	Komoditas	Luas Areal Perkebunan (Ha)			Pertumbuhan %	
		2005	2006*)	2007**)	2006 thdp 2005	2007 thdp 2006
I. Tanaman Tahunan						
1.	Karet	3.279.391	3.309.472	3.281.341	0,92	(0,85)
2.	Kelapa Sawit	5.453.817	6.074.926	6.263.249	11,39	3,10
3.	Kelapa	3.803.614	3.817.796	3.831.922	0,37	0,37
4.	Kopi	1.255.272	1.263.203	1.144.588	0,63	(9,39)
5.	Kakao	1.167.046	1.191.742	1.207.592	2,12	1,33
6.	Jambu Mete	579.650	595.111	611.000	2,67	2,67
7.	Lada	191.992	191.369	196.249	(0,32)	2,55
8.	Cengkeh	448.856	455.393	442.642	1,46	(2,80)
9.	Teh	140.538	138.169	137.368	(1,69)	(0,58)
II. Tanaman Semusim						
11.	Tebu	381.786	384.016	420.167	0,58	9,41
12.	Kapas	5.982	6.613	7.311	10,55	10,55
13.	Tembakau	198.212	204.618	167.562	3,23	(18,11)
Total Tanaman Tahunan dan Semusim		16.906.156	17.632.428	17.710.991	4,30	0,45

Catatan : *) Angka Sementara **) Angka Estimasi



Produksi komoditas perkebunan tahun 2007 berdasarkan angka estimasi akan naik 3,74 % dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 26.058.668 ton menjadi 27.034.230 ton. Kontribusi utama dari tanaman tahunan meliputi karet sebesar 2.597.143 ton, **kelapa sawit** sebesar 16.831.799 ton, kopi sebesar 570.669 ton, kakao

sebesar 841.676 ton dan kelapa sebesar 3.218.119 ton. Sedangkan untuk tanaman semusim adalah tebu sebesar 2.315.322 ton. Rincian perkembangan produksi untuk masing-masing komoditi perkebunan disajikan pada tabel 17.



Tabel 17. Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan, Tahun 2005-2007

No.	Komoditas	Produksi (Ton)			Pertumbuhan %	
		2005	2006*)	2007**)	2006 thdp 2005	2007 thdp 2006
I. Tanaman Tahunan						
1.	Karet	2.270.891	2.367.064	2.597.143	4,24	9,72
2.	Kelapa Sawit	14.336.147	16.182.866	16.831.799	12,88	4,01
3.	Kelapa	3.096.845	3.156.876	3.218.119	1,94	1,94
4.	Kopi	640.365	653.388	570.669	2,03	(12,66)
5.	Kakao	748.828	779.474	841.676	4,09	7,98
6.	Jambu Mete	135.070	140.573	146.294	4,07	4,07
7.	Lada	78.328	79.686	80.100	1,73	0,52
8.	Cengkeh	78.380	83.782	84.327	6,89	0,65
9.	Teh	167.276	167.881	165.833	0,36	(1,22)
II. Tanaman Semusim						
11.	Tebu	2.241.742	2.307.027	2.409.764	2,91	4,45
12.	Kapas	2.241	2.371	2.509	5,80	5,82
13.	Tembakau	153.470	177.895	180.439	15,92	1,43
Total Tanaman Tahunan dan Semusim		23.949.583	26.058.668	27.034.230	8,81	3,74

Catatan : *) Angka Sementara **) Angka Estimasi

Dari sisi produktivitas, pada umumnya komoditi unggulan nasional perkebunan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu, baik untuk perkebunan rakyat (PR), perkebunan besar negara (PBN) maupun perkebunan besar swasta (PBS). Perkembangan produktivitas untuk masing-masing komoditi secara rinci disajikan pada tabel 18.

Tabel 18. Produktivitas Tanaman Perkebunan, Tahun 2005-2007

No.	Komoditi Perkebunan	Produktivitas Perkebunan (Ku/Ha)			Pertumbuhan %	
		2005	2006*)	2007**)	2006 thdp 2005	2007 thdp 2006
I. Tanaman Tahunan (Annual Tree Crop Estates)						
1.	Karet (<i>Rubber</i>)	862	873	874	1,28	0,11
	PR (Smallholders)	818	823	824	0,61	0,12
	PBN (Gov. Estates)	1.042	1.084	1.098	4,03	1,29
	PBS (Private Estates)	1.200	1.259	1.259	4,92	0,00
2.	Kelapa Sawit (<i>Oil Palm</i>)	2.925	3.039	3.077	3,90	1,25
	PR (Smallholders)	2.687	2.764	2.790	2,87	0,94
	PBN (Gov. Estates)	3.045	3.151	3.187	3,48	1,14

No.	Komoditi Perkebunan	Produktivitas Perkebunan (Ku/Ha)			Pertumbuhan %	
		2005	2006*)	2007**)	2006 thdp 2005	2007 thdp 2006
3.	Kelapa (<i>Coconut</i>)	1.105	1.135	1.139	2,71	0,35
	PR (Smallholders)	1.109	1.136	1.145	2,43	0,79
	PBN (Gov. Estates)	845	913	937	8,05	2,63
	PBS (Private Estates)	897	897	897	0,00	0,00
4.	Kopi (<i>Coffee</i>)	683	696	701	1,90	0,72
	PR (Smallholders)	687	700	705	1,89	0,71
	PBN (Gov. Estates)	697	706	709	1,29	0,42
	PBS (Private Estates)	450	456	458	1,33	0,44
5.	Kakao (<i>Cocoa</i>)	921	998	1.024	8,36	2,61
	PR (Smallholders)	928	940	944	1,29	0,43
	PBN (Gov. Estates)	756	762	764	0,79	0,26
	PBS (Private Estates)	951	914	902	(3,89)	(1,31)
6.	Jambu Mete (<i>Cashewnut</i>)	428	437	440	2,10	0,69
	PR (Smallholders)	430	436	438	1,40	0,46
	PBN (Gov. Estates)	0	0	-	0,00	-
	PBS (Private Estates)	167	171	173	2,40	1,17
7.	Lada (<i>Pepper</i>)	688	690	692	0,29	0,29
	PR (Smallholders)	689	690	691	0,15	0,14
	PBN (Gov. Estates)	-	-	-	-	-
	PBS (Private Estates)	-	-	-	-	-
8.	Cengkeh (<i>Clove</i>)	248	270	277	8,87	2,59
	PR (Smallholders)	246	268	275	8,94	2,61
	PBN (Gov. Estates)	200	200	200	0,00	0,00
	PBS (Private Estates)	337	337	337	0,00	0,00
9.	Teh (<i>Tea</i>)	1.462	1.486	1.494	1,64	0,54
	PR (Smallholders)	874	865	862	(1,03)	(0,35)
	PBN (Gov. Estates)	2.098	2.190	2.222	4,39	1,46
	PBS (Private Estates)	1.382	1.400	1.406	1,30	0,43
II	Tanaman Semusim (Biannual Crop Estates)					
11.	Tebu (<i>Sugar Cane</i>)	5.872	5.918	5.934	0,78	0,27
	PR (Smallholders)	5.645	5.696	5.713	0,90	0,30
	PBN (Gov. Estates)	5.268	5.397	5.441	2,45	0,82
	PBS (Private Estates)	7.119	7.444	7.555	4,57	1,49
12.	Kapas (<i>Cotton</i>)	433	435	435	0,46	0,00
	PR (Smallholders)	433	435	435	0,46	0,00
	PBN (Gov. Estates)	-	-	-	-	-
	PBS (Private Estates)	-	-	-	-	-
13.	Tembakau (<i>Tobacco</i>)	776	925	978	19,20	5,73
	PR (Smallholders)	775	926	981	19,48	5,94
	PBN (Gov. Estates)	828	869	875	4,95	0,69
	PBS (Private Estates)	-	-	-	-	-

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Estimasi




Khusus untuk **komoditi tebu** perkembangan pelaksanaan giling Musim Tanam Tahun 2007 sampai dengan bulan September 2007 mencapai areal seluas 322.688,2 ha, produksi tebu sebesar 24.777.999 ton dengan rendemen rata-rata sebesar 7,39%. Hablur yang dihasilkan 1.831.072,6 ton dengan produktivitas tebu 76,8 ton/ha dan produktivitas hablur 5,67 ton/ha serta produksi tetes 1.053.946 ton.





DEPARTEMEN PERTANIAN



BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
STRATEGIS DAN PENUNJANG
DALAM MENDUKUNG
PERTUMBUHAN SEKTOR
PERTANIAN TAHUN 2007



Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2007 tidak terlepas dari dukungan berbagai sektor lain terkait dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian. Berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan Departemen Pertanian tahun 2007, merupakan kegiatan yang spektakuler untuk mendongkrak pertumbuhan sektor pertanian utamanya indikator makro. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah: a) Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), b) Pengembangan Kawasan dan Sentra Hortikultura, c) Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan, d) Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tebu, f) Fasilitasi Pengembangan Jarak Pagar, g) Akselerasi Pengembangan Kapas, h) Pemberdayaan Usaha Kelompok, i) Restrukturisasi Perunggasan, j) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui PMUK, k) Gerakan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/Beras (GP4GB), l) Fasilitasi Alat Pasca Penen, m) Pengelolaan Infrastruktur Pertanian, n) Program Aksi Desa Mandiri Pangan, o) Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP), p) Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, q) Penyusunan Kalender Tanam Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Global, r) Pengentasan Kemiskinan melalui Kegiatan Program Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi, s) Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Teknologi Inovasi (Prima Tani), t) Pengembangan Energi Alternatif, u) Bantuan Untuk LM3, v) Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), w) Pelaksanaan Kegiatan Penunjang, x) Pengawasan Lalulintas Komoditas Pertanian dan y) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian.

4.1. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)



1. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional Tahun 2007 merupakan program strategis sebagai upaya terobosan guna memacu peningkatan **produksi padi (beras)** nasional dalam rangka memantapkan ketahanan pangan dan mengisi peluang pasar ekspor. Melalui program ini ditargetkan sasaran produksi mencapai 58,18 juta ton GKG, atau meningkat 5% dibanding tahun 2006. Sasaran peningkatan produksi tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata hanya mencapai kisaran dibawah 1%.
2. Untuk menyelenggarakan Program P2BN dilaksanakan melalui pengorganisasian yang melibatkan berbagai subsektor/sektor/instansi dan stakeholder terkait dan pembentukan Tim dan Posko sebagai wadah koordinasi mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan/desa.
3. Kinerja program ini menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan, antara lain ditunjukkan oleh pencapaian produksi padi tahun 2007 (Angka Ramalan III) yang mencapai 57,07 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 2,59 juta ton GKG, atau 4,76% dibanding produksi tahun 2006.

4. Bantuan Benih Unggul Bermutu APBN 2007

- 1) Dalam rangka mendorong penyebaran penggunaan benih varietas unggul bermutu, pada tahun 2007 diprogramkan bantuan benih varietas unggul bermutu bagi petani. Bantuan tersebut meliputi: padi non-hibrida 105 ribu ton untuk pertanaman seluas 4 juta ha, padi hibrida sebanyak 2.650 ton untuk pertanaman 80 ribu ha, jagung hibrida sebanyak 8.750 ton untuk pertanaman seluas 550 ribu ha, jagung komposit 3.500 ton untuk pertanaman seluas 100 ribu ha, dan kedelai sebanyak 11 ribu ton untuk pertanaman seluas 320 ribu ha.
- 2) Bantuan tersebut telah berhasil memperluas penggunaan benih varietas unggul bermutu, meningkatkan produktivitas, mutu/kualitas hasil, meringankan beban petani dalam pengadaan benih unggul bermutu, meningkatkan pendapatan petani dan berdampak terhadap berkembangnya usaha dan industri yang bergerak dibidang perbenihan.
- 3) Pengembangan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) melalui pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) padi 2 juta ha di 24 propinsi 129 kabupaten/kota; jagung 500 ribu ha di 17 propinsi 89 kabupaten/kota dan kedelai 300 ribu ha 18 propinsi 59 kabupaten/kota. Kegiatan SL tersebut dimaksudkan untuk menyebarkan penerapan teknologi usahatani dengan pendekatan pengelolaan tanaman dan sumberdaya lokal secara terpadu guna meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha dan mutu hasil.

5. Pengembangan Pupuk



- a. Dalam rangka menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani dilaksanakan langkah-langkah antara lain: penyaluran dengan sistem tertutup dengan menggunakan RDKK, rayonisasi distribusi dan pengecer resmi, mengintensifkan pengawasan melalui Tim Pengawasan Pupuk Propinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan pupuk organik guna mensubstitusi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan meningkatkan/memelihara kesuburan lahan, melalui penerbitan Permentan tentang pupuk organik, fasilitasi/ pencontohhan pemupukan berimbang dan pengadaan bantuan alsin pengolah/pembuat pupuk organik. Pada tahun 2007, dialokasikan bantuan alsin pengolah pupuk organik sebanyak 324 unit yang tersebar di 300 kabupaten/kota di 32 propinsi.

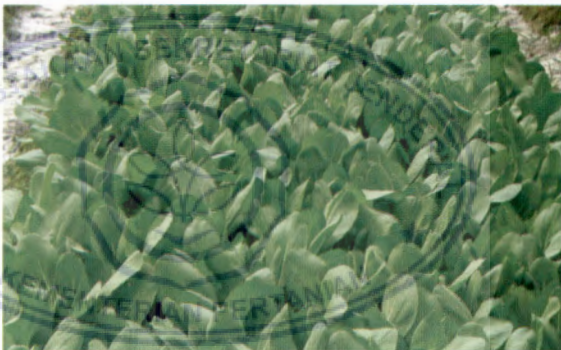
6. Pengembangan Mekanisasi Pra Panen



- a. Fasilitasi penyediaan alsin traktor melalui bantuan uang muka pengadaan alsin (BUMA) dan bantuan langsung alsin (BAKAL) sebanyak 4.927 unit traktor roda 2 (dua) di 343 kabupaten/kota, 33 propinsi.
 - b. Bantuan tersebut diarahkan guna menumbuh kembangkan kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsin (UPJA) yang mampu melayani kebutuhan petani dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya dan percepatan pengolahan lahan.
7. Pengembangan perlindungan tanaman pangan

Untuk meningkatkan pengamatan dan mengantisipasi adanya gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dilakukan penambahan Tenaga Harian Lepas (THL) Petugas Pengendalian OPT (PPOPT) sebanyak 1.288 orang, pengadaan sarana kerja berupa mobil operasional Brigade Proteksi 59 unit dan sepeda motor 1.470 unit bagi pengamat hama, pengembangan dan penyebarluasan teknologi pengendalian OPT dan mitigasi dampak fenomena iklim oleh 29 unit UPTD BTPH, gerakan pengendalian OPT di 150 paket terutama di kabupaten/kota rawan serangan OPT.

4.2. Pengembangan Kawasan dan Sentra Hortikultura



Dalam rangka pengembangan kawasan dan sentra hortikultura telah dilakukan fasilitasi pengembangan kegiatan BLM atau PMUK selama beberapa tahun pada beberapa sentra produksi hortikultura.

Perkembangan pelaksanaannya sejak tahun 2004 – 2007 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2004 dilaksanakan pada 266 Kawasan dan Sentra dengan areal pengembangan seluas 28.322 Ha, hanya terdiri dari 10 komoditas unggulan nasional, dan melibatkan 1878 kelompok tani.
2. Pada tahun 2005 dilaksanakan pada 324 Kawasan dan Sentra dengan areal pengembangan seluas 20.431 Ha, terdiri dari 10 komoditas unggulan nasional dan melibatkan 1353 kelompok tani.
3. Pada tahun 2006 dilaksanakan pada 285 Kawasan dan Sentra dengan areal pengembangan seluas 15.208 Ha, terdiri dari 10 komoditas unggulan nasional dan melibatkan 884 kelompok tani.
4. Pada tahun 2007 dilaksanakan pada 303 Kawasan dan Sentra, mencakup 181 kawasan, sayuran 86 kawasan, rimpang 12 kawasan serta tanaman hias 24 kawasan. Selain itu juga terdapat lokasi Pengembangan FATIH 26 propinsi di 150 kabupaten, pengembangan hortikultura terintergrasi ternak 6 propinsi di 10 kabupaten, pengembangan pertanian organik 12 propinsi di 36 kabupaten, pengembangan Alsin dan saprodi 29 propinsi di 139 kabupaten, lokasi pengembangan hortikultura di daerah transmigrasi 11 propinsi di 17 kabupaten serta lokasi pengembangan hortikultura di lahan gambut 5 propinsi di 10 kabupaten.

Areal pengembangan dan kelompok tani yang dominan selama ini adalah dari komoditas buah-buahan, disusul sayuran, sementara

tanaman hias dan tanaman biofarmaka masih terbatas. Dengan pemberdayaan kelompok tani melalui pola BPLM atau PMUK ini telah dapat menggerakkan agribisnis di sentra-sentra produksi hortikultura, disamping itu juga dapat menggerakkan penggalian/pemupukan modal yang berasal dari masyarakat sendiri, dan dukungan dari PEMDA.

Selain bantuan berupa penguatan modal usaha kelompok, telah pula dilakukan upaya terobosan berupa Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH). Upaya ini dilakukan dalam rangka menggerakkan berbagai pihak untuk meningkatkan investasi atau memberikan kemudahan dalam berinvestasi di bidang agribisnis hortikultura. Konsep dan sosialisasi FATIH ini telah dilakukan secara aktif pada tahun 2006. Sejalan dengan kegiatan implementasi, dalam perjalanannya konsep FATIH ini akan terus diperkaya dan disempurnakan, sehingga benar-benar dapat menggerakkan dan memfasilitasi berkembangnya investasi agribisnis hortikultura pada sentra-sentra produksi. Konsep FATIH diterapkan pada beberapa sentra produksi hortikultura secara selektif, melalui sosialisasi FATIH, perumusan model-model sesuai komoditas dan lokasi, penyempurnaan konsep dan pembuatan proposal oleh daerah untuk implementasinya. Pelaksanaan konsep FATIH di sentra-sentra produksi akan dikaitkan dengan potensi sumberdaya daerah, kecocokan dengan keadaan agroekosistem, kepentingan pelaku usaha, serta dukungan dari pemerintah daerah.

Tahun 2007 FATIH dilaksanakan pada 26 propinsi di 150 kabupaten. Output yang dihasilkan dari kegiatan FATIH yaitu; membentuk forum komunikasi investasi agribisnis hortikultura, memfasilitasi pembentukan kemitraan usaha hortikultura, tersedianya bahan informasi agribisnis hortikultura melalui media cetak dan elektronik, terbentuknya kelembagaan dan kelompok kerja agribisnis hortikultura serta

terlaksananya forum komunikasi kelompok kerja agribisnis hortikultura.

4.3. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan



Dalam rangka peningkatan produksi maupun produktivitas komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit, **kakao** dan karet, mulai tahun 2007 telah dilaksanakan program Revitalisasi Perkebunan yang persiapannya telah dilaksanakan mulai tahun 2006. Sosialisasi telah dilaksanakan di 21 provinsi, selain itu telah dilaksanakan pelatihan tenaga pendamping sebanyak 77 orang dan sudah ditempatkan pada wilayah masing-masing. Sampai saat ini perkembangan pelaksanaan di lapangan melalui kerjasama dan bantuan kredit dari beberapa bank kegiatan perluasan kebun kelapa sawit telah mulai tanam seluas 51.599 ha dengan jumlah petani peserta sebanyak 21.344 KK. Untuk pengembangan komoditas kelapa sawit dan kakao yang didanai oleh pihak PT. Bank BRI, PT. Bank Mandiri dan Bank Nagari (BPD Sumbar) dialokasikan anggaran Rp. 1.140.492 juta. Sedangkan yang telah sepakat mengadakan kerjasama antara Bank pelaksana dengan perusahaan mitra untuk pengembangan kelapa sawit seluas 109.044 ha dengan jumlah petani 50.943 KK telah dialokasikan dana sebesar Rp. 2.770.446 juta oleh PT. Bank BRI, PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Bukopin. Selain Bank-bank tersebut diatas, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan dan PT. BNI juga telah mendapat komitmen/persetujuan dari Departemen Keuangan untuk ikut serta dalam program ini.

4.4. Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tebu



Untuk menunjang program akselerasi peningkatan produktivitas gula telah dilakukan kegiatan bongkar ratoon dan pembangunan kebun bibit. Kegiatan bongkar ratoon dan pembangunan kebun bibit berjenjang yang dananya disalurkan melalui PMUK telah meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tebu bongkar ratoon. Produksi tebu dan hablur tahun 2005 sebesar 2.396.386 ton dan 167.525 ton meningkat dibandingkan tahun 2003 sebesar 1.039.194 ton tebu dan 69.737 ton. Produktivitas tebu bongkar ratoon dan hablur tahun 2005 mencapai 94,96 ton/ha dan 5,71 ton/ha meningkat dibandingkan tahun 2003 sebesar 56,06 ton/ha dan 3,76 ton/ha.

Pengembangan lembaga ekonomi petani tebu cukup menggembirakan yaitu sejak dilakukannya penerapan pola PMUK dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Tahun 2003 diawali dengan 54 KPTR/ Koperasi Primer dan telah menjadi/terbentuk 92 KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat/Koperasi Primer) dan 2 Koperasi Sekunder, secara rinci disajikan pada tabel 19.

Tabel 19. Perkembangan KPTR Pengembangan Tebu

No.	Propinsi	Tahun 2003	2006		2007	
		Kop. Primer	Kop. Primer	Kop. Sekunder	Kop. Primer	Kop. Sekunder
1.	Jawa Timur	47	50	1	50	1
2.	Jateng	18	25	-	25	-
3.	D.I.Y	1	4	1	4	1
4.	Jabar	3	6	-	6	-
5.	Sumut	-	1	-	1	-
6.	Sumsel	-	1	-	1	-
7.	Lampung	-	1	-	1	-
8.	Sulsel	-	2	-	2	-
9.	Gorontalo	-	2	-	2	-
	J m l	54	92	2	92	2

4.5. Fasilitasi Pengembangan Jarak Pagar Sebagai Alternatif Sumber Energi Terbarukan



Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat serta berkembangnya industri dan industriomotif, akan meningkatkan kebutuhan bahan bakar minyak. Meningkatnya kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari bahan minyak diesel (solar) yang dikembangkan oleh subsektor pekebunan melalui penanaman jarak pagar. Upaya tersebut telah dirintis yang pelaksanaannya tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pemeliharaan kebun induk seluas 118 ha di 11 propinsi (14 kabupaten)

- dan pembangunan kebun induk seluas 179 ha di 16 propinsi (18 kabupaten).
- b. Telah dilakukan penanaman jarak pagar seluas 4.023 ha di 26 propinsi (43 kabupaten) dan
 - c. Telah diadakan 20 unit Unit Pengolahan Hasil (UPH) di 15 propinsi (18 kabupaten).

4.6. Akselerasi Pengembangan Kapas



Dengan adanya kemajuan dalam industri tekstil dalam negeri dimana untuk memenuhi kebutuhan masih harus diimpor, maka dalam rangka mengurangi impor, Departemen Pertanian pada tahun 2007 melaksanakan program akselerasi pengembangan kapas pada tahun 2007 seluas 14.750 ha pada 17 kabupaten di 6 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.

4.7. Pemberdayaan Usaha Kelompok

Upaya-upaya pemberdayaan kelompok tani ternak telah dilakukan sejak tahun 2000 melalui berbagai fasilitasi langsung kepada kelompok-kelompok di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2007 telah diberikan 474 paket kepada 474 kelompok di 33 propinsi dan 324 kabupaten/kota melalui :

- a. Kegiatan Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) sapi potong 334 kelompok.

- b. Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sapi potong 5 kelompok.
- c. Penyebaran sapi Brahman Cross 4000 ekor kepada 68 kelompok.
- d. Intensifikasi sapi perah pada 7 kelompok.
- e. Pengembangan budidaya unggas lokal 60 kelompok.

Dengan fasilitasi tersebut diharapkan dapat memberdayakan usaha-usaha peternakan yang mengikut sertakan peran 9480 orang kepala keluarga.

4.8. Restrukturisasi Perunggasan (RP)



Dalam jangka pendek RP ditekankan pada pengendalian wabah flu burung, setelah wabah tersebut dapat dikendalikan, dilakukan penataan di semua sektor perunggasan mulai dari sektor 1 (industri yang terintegrasi dengan perbibitan), sektor 2 (budidaya unggas dengan pola inti plasma), sektor 3 (peternak mandiri dan kelompok ternak), dan sektor 4 (masyarakat yang memelihara beberapa ekor ayam buras/itik di belakang rumah), termasuk masyarakat yang memelihara unggas untuk hobi, penelitian, pendidikan, dan hiburan.

Mengingat agribisnis perunggasan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada bisnis peternakan, maka dalam jangka panjang untuk terwujudnya usaha ini dengan aman, perlu dilakukan pewilayahan (*zoning*). Pada saat ini upaya *zoning* telah memasuki pembahasan draft pedoman umum. Tahun 2007 telah dilakukan

penerapan *Good Farming Practices*, penataan pengembangan budidaya unggas pedesaan di 80 kabupaten/kawasan, dan penataan pemeliharaan unggas di pemukiman (20 lokasi). Pemberantasan flu burung terus dilakukan melalui vaksinasi *biosecurity*, depopulasi, kompensasi, *surveillance*, pembentukan kelembagaan UPPAI (Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza*), serta terus dilakukan publik *awareness*.

4.9. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui PMUK

Kegiatan ini ditujukan untuk membantu petani melalui Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untuk mengembangkan usahataniya serta meningkatkan produktivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan dari kelompok PMUK antara lain untuk: 1) pembiayaan sarana dan fasilitas kelompok seperti membiayai/rehabilitasi jaringan irigasi, tata air mikro, embung, jalan usahatani, jalan produksi dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok; 2) pengadaan/rehabilitasi atau optimalisasi pemanfaatan aslin pra produksi, produksi dan pengolahan hasil; 3) pengadaan sarana produksi (benih/bibit, pupuk, pestisida/obat-obatan yang bervariasi menurut kebutuhan dan jenis komoditas; 4) pemenuhan tambahan pangan keluarga (halaman rumah, pekarangan, kebun), pengembangan aneka ragam pangan (makanan khas nusantara/tradisional), pengembangan cadangan pangan masyarakat (lumbung), dan pemberian bantuan saprodi untuk bantuan rawan pangan; 5) kegiatan pengembangan kelembagaan antara lain: memperluas pemasaran, pengembangan usaha penunjang agribisnis, jalinan kerja dengan mitra usaha, pengembangan simpan pinjam pola LKM; dan 6)

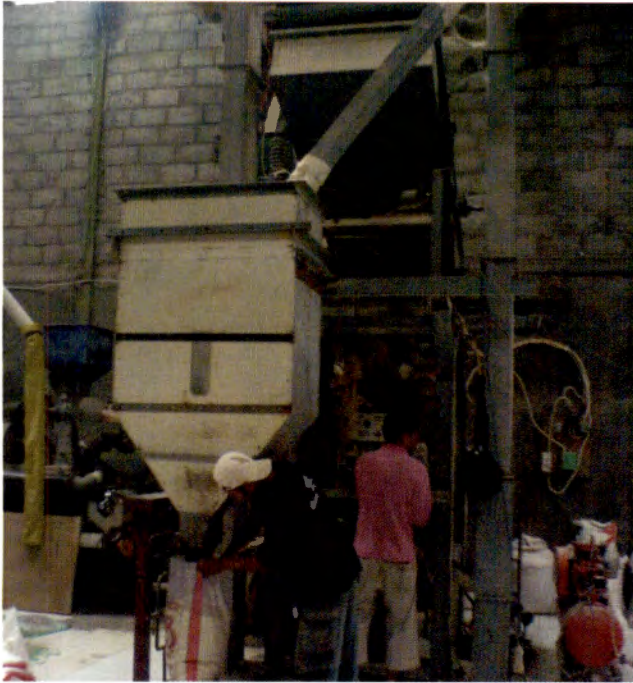
peningkatan dan pengembangan kemampuan melalui pelatihan pengurus/anggota kelompok. Hingga saat ini hampir seluruh kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan dan telah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sebagaimana tergambar dari semakin membaiknya indeks Nilai Tukar Petani.

4.10. Gerakan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/Beras (GP4GB)

Dalam mendukung pelaksanaan Program P2BN dicanangkan Gerakan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/ Beras (P4GB) di 7 Propinsi 13 Kabupaten yaitu Jawa Barat (Subang dan Karawang), Jawa Tengah (Sukoharjo dan Grobogan), Jawa Timur (Jombang dan Lamongan), Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat dan Lombok Timur), Lampung (Lampung Tengah), Sumatera Selatan (OKI Timur dan Musi Rawas), Sulawesi Selatan (Sidrap dan Pinrang). Gerakan ini merupakan gerakan terpadu yang melibatkan, Perum BULOG, BRI dan BUKOPIN serta Asosiasi Petani. Beberapa capaian dari Gerakan tersebut antara lain yaitu, telah didistribusikan 103.000 sabit bergerigi, 40.000 terpal, 1.000 unit pedal thresher, 413 unit power thresher, 8 dryer bahan bakar sekam, 5 box dryer, 65 RMU 1 ph, 44 RMU 2 ph dan 200 moisture tester.



4.11. Fasilitas Alat Pasca Panen



Pada tahun 2007 telah difasilitasi pembangunan 39 unit silo jagung ukuran kecil di beberapa Kabupaten sentra produksi yaitu: Karo, Toba Samosir, Simalungun, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Gunung Kidul, Bantul, Kulonprogo, Ciamis, Bandung, Kediri, Banyuwangi, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Batang, Sukoharjo, Banyumas, Blora Grobogan, Lombok Timur, Sumbawa, Timor Tengah Utara, Belu, Timor Tengah Selatan, Lebak, Tabanan, Bengkayang, Bulukumba, Gowa, Pahuwato, Gorontalo, Donggala, Pasaman Barat dan Seluma.

Dalam upaya penurunan kehilangan hasil padi dan mendukung P2BN telah difasilitasi peralatan pasca panen kepada 17 propinsi 72 kabupaten. Peralatan dimaksud berupa sabit bergerigi 103.000 unit, terpal 40.000 unit, pedal thresher 1.000 unit, power thresher 110 unit, dryer 7 unit, **RMU (one pass)** 60 unit, **RMU (two pass)** 44 unit, dan moisturtester 200 unit.

4.12. Pengelolaan Infrastruktur Pertanian



Dalam rangka mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, telah dilakukan rehabilitasi infrastruktur pertanian. Upaya tersebut berupa rehabilitasi **JITUT dan JIDES**, Pengembangan **Tata Air Mikro (TAM)** dan Optimasi Lahan. Kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (**JITUT**) telah teralisasi seluar 56.621 hektar (64,72%) dari target seluas 87.487 hektar, sedangkan untuk rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (**JIDES**) terealisasi 24.830 hektar (68,54%) dari target seluas 36.277 hektar.

Untuk pengembangan **Tata Air Mikro (TAM)** terealisasi 12.310 hektar (53,78%) dari target 22.889 hektar, sedangkan optimasi lahan teralisasi 6.461 hektar (61,48%) dari target seluas 10.509 hektar. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas, telah banyak memberikan manfaat (benefit) untuk kegiatan pembangunan tanaman pangan utamanya mendukung kegiatan P2BN.

4.13. Program Aksi Desa Mandiri Pangan



Berdasarkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas*) Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 100 kabupaten rawan pangan yang tersebar di 23 propinsi, dengan rincian 30 kabupaten prioritas 1, 30 kabupaten prioritas 2, dan 40 kabupaten prioritas 3. Kelompok rawan pangan prioritas 1,2, dan 3 menunjukkan kabupaten-kabupaten yang harus mendapatkan prioritas khusus dalam penanganan masalah kerawanan pangan. Sisanya (165 kabupaten) masuk dalam kelompok tahan pangan, dengan rincian 50 kabupaten prioritas 4, 50 kabupaten prioritas 5, dan 65 kabupaten prioritas 6. Berdasarkan kondisi tersebut, telah dilaksanakan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Mapan), yang pada tahun 2005 dilaksanakan di 9 propinsi sebagai pilot project, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2006, pelaksanaan kegiatan merupakan tahap persiapan yang telah dilakukan berupa sosialisasi Proksi Mapan kepada 30 propinsi. Selain itu telah dilaksanakan pelatihan penyusunan data base desa mandiri pangan dan identifikasi lokasi di 122 kabupaten di 30 propinsi. Masing-masing kabupaten ditetapkan 2 desa sebagai pelaksana Proksi Mapan, namun terdapat beberapa kabupaten lebih dari 2 desa. Identifikasi lokasi telah dilakukan oleh kabupaten

pelaksana sebanyak 250 desa. Masing-masing desa terdiri dari 2 pendamping yang berasal dari aparat (penyuluh) dan non aparat (Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat). Pada tahun 2007 pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di 354 desa baru (tahap persiapan) dan 250 desa lama yang dibangun tahun 2006, memasuki Tahap Penumbuhan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada desa lama ini antara lain: seleksi lokasi sasaran, sosialisasi program, pendampingan, penyusunan data dasar desa, pelatihan, pemberdayaan kelompok afinitas, penyusunan rencana pembangunan desa mapan partisipatif. Untuk menilai kinerja dari kegiatan tersebut, parameter yang digunakan untuk meninali berhasil atau gagalnya dari kegiatan tersebut adalah: a) tumbuhkembangnya/dinamika kelompok-kelompok afinitas, b) tumbuhkembangnya lembaga-lembaga usaha produksi dan agribisnis pangan, c) tumbuhkembangnya Lembaga Keuangan Desa (LKD), d) meningkatnya peranan kelembagaan pangan dan gizi, serta layanan kesehatan, dan e) pelaksanaan program kerja lintas sektor untuk penanganan masalah pangan dan perbaikan sarana prasarana.



4.14. Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP)

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP), Departemen Pertanian mengalokasikan DPM-LUEP. DPM dari APBN disalurkan kepada LUEP sebagai dana talangan tanpa bunga untuk membeli gabah/beras

petani pada saat panen sesuai HPP. Sebenarnya kegiatan DPM-LUEP telah berlangsung sejak tahun 2003 dan telah memasuki tahun kelima. Pada tahun 2003 dan 2004, penggunaan DPM hanya untuk membeli gabah/beras petani, namun sejak tahun 2005 ditambah komoditas jagung, dan tahun 2007 ditambah komoditas kedelai di sentra produksi.

Perkembangan jumlah lokasi pelaksana, alokasi, jumlah petani dan anggaran LUEP selama tahun 2003-2007 disajikan pada tabel 20.

Tabel 20. Perkembangan Jumlah Lokasi Pelaksana dan LUEP, Tahun 2003 - 2007

Tahun	Jml Prop.	Jml Kab.	Jml LUEP	Jml Petani *)	Anggaran (Rp.Miliar)
2003	15	121	1.149	20.682 – 22.980	157,7
2004	19	145	1.332	23.973 – 26.640	160,7
2005	19	125	842	15.156 -16.840	89,9
2006	25	175	1.583	27.684 – 30.760	225,7
2007**)	27		319	5.742 – 6.380	277,8
• Gabah		157	194	3.492 – 3.880	
• Jagung		40	119	2.142 – 2.380	
• Kedelai		2	6	108 – 120	

*Keterangan: *) Jumlah petani yang yang dibantu diperkirakan 9 – 10 orang/LUEP/ putaran atau 18-20 orang/LUEP/2 putaran/Thn*

****) Jumlah Kabupaten dan LUEP tahun 2007 berdasarkan laporan yang masuk per Agustus 2007*

4.15. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian

Untuk meningkatkan kualitas SDM Pertanian utamanya dalam berwirausaha/ berbisnis dibidang pertanian, tahun 2007 telah dilakukan berbagai upaya diantaranya yaitu:

1. Stimulan berupa Bantuan Modal Usaha (*Seed Money*) bagi Lulusan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) yang belum bekerja dalam rangka mendorong terciptanya wirausahawan muda di bidang pertanian. Pada tahun 2007, telah dialokasikan dana sebesar 4,4 milyar rupiah yang akan disalurkan kepada 123 orang lulusan SPP dan 81 orang lulusan STPP. Pada tahap I, telah dicairkan dana sebesar 1,8 milyar rupiah untuk 52 orang lulusan SPP dan 30 orang lulusan STPP. Sisanya akan segera

dicairkan untuk 52 orang lulusan SPP dan 23 orang lulusan STPP, pada Tahap II sebesar 1,7 milyar rupiah. Sedangkan pada Tahap III akan disalurkan untuk 19 orang lulusan SPP dan 28 orang lulusan STPP sebesar 900 juta rupiah.

2. Penumbuhkembangan dan pembinaan 461 Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), guna meningkatkan kompetensi petani dalam mengembangkan pusat-pusat diklat swadaya yang diperuntukkan bagi pelaku utama pertanian.
3. Pelatihan teknis dan kewirausahaan agribisnis bagi 41.367 orang SDM pertanian (12.661 orang aparatur dan 28.715 orang non aparatur) di Balai Besar Pelatihan Pertanian dan P4S, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendampingi dan mengembangkan usaha pertanian. Hingga saat ini telah terealisasi pelatihan bagi 5.108 orang aparat dan 9.694 orang non aparatur.
4. Dipenghujung tahun 2007 telah berhasil direkrut 10.000 orang Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh dan sampai dengan akhir tahun 2007 total THL telah menjadi 16.000 orang.

4.16. Penyusunan Kalender Tanam dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Global

Untuk mengantisipasi perubahan iklim yang tidak menentu dan tidak mudah diprediksi Departemen Pertanian telah membuat pedoman kalender tanam dalam bentuk peta yang menggambarkan potensi pola dan waktu tanam berdasarkan potensi dan dinamika sumberdaya iklim dan air, khususnya untuk tanaman pangan, terutama padi dengan skala 1 : 250.000. Peta ini disusun juga untuk mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan program ketahanan pangan pada umumnya selain juga diharapkan menjadi salah satu informasi yang operasional dalam menghadapi anomaly dan perubahan iklim. Melalui peta ini dapat ditentukan antara lain: (1) waktu tanam setiap musim (MH, MK I dan MK II) pada setiap kecamatan berdasarkan

kondisi iklim (LA-Nina, normal atau El-Nino) setempat., (2) menentukan pola tanam secara spasial dan tabular pada skala kecamatan., (3) menentukan rotasi tanaman pada setiap kecamatan berdasarkan potensi sumberdaya iklim dan air., (4) mendukung perencanaan tanam, khususnya untuk tanaman pangan, serta (5) mengurangi kerugian petani sebagai akibat buruk pergeseran musim. Implementasi dari kegiatan ini telah disosialisasikan di tingkat pusat dan daerah.

4.17. Pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan Program Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi (P4MI)

Selama tiga tahun pelaksanaannya, P4MI telah mampu membangun optimisme tinggi dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan berlahan kering marjinal di 5 kabupaten. Sampai tahun 2007 hasil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui (1) pemberdayaan petani miskin, meliputi mobilisasi kelompok tani, pengembangan kelembagaan petani dan investasi instruktur desa. Rencana secara keseluruhan sampai akhir proyek 1053 desa. Sampai saat ini telah dilakukan di 591 desa yang secara keseluruhan kegiatannya telah diselesaikan dan untuk 462 desa saat ini sedang berjalan, infrastruktur hasil swadaya petani dengan kontribusi petani rata-rata 28% melampaui target dari 20% antara lain: (1) Pembangunan Bendungan Mini, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan saluran irigasi, pembangunan agroindustri skala rumah tangga; (2) Pengembangan sumber informasi nasional dan lokal khususnya informasi pasar, pemutakhiran data, pembangunan *National Farming Website*, pembangunan pusat informasi pertanian lokal dalam bentuk Unit Pelayanan Informasi Pertanian Kabupaten (UPIPK) untuk melayani kebutuhan informasi penyuluh pertanian dan petani; (3) Pengembangan dan Desiminasi Inovasi Pertanian.

Dari kegiatan tersebut beberapa hasil yang telah dicapai antara lain: (a) identifikasi teknologi, penyusunan Peta Perwilayahan Komoditas

Skala 1 : 50.000 dan Survai Pedesaan (Baseline survey) untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi biofisik, social ekonomi budaya dan kebutuhan teknologi di lima kabupaten proyek., (b) penyusunan informasi praktis 340 judul teknologi tepat guna kedalam format elektronis internet dan CD, (c) identifikasi senjang tematik/teknologi; (d) pengembangan model usahatani terpadu spesifik lokasi di setiap kabupaten sesuai komoditas utama/unggulan., (e) pengembangan teknologi lokal (*indigenous technology*) berazaskan kearifan lokal; (f) pengembangan kapasitas petugas, penyebaran informasi melalui media massa dan demplot. Kegiatan ini mencakup pula upaya revitalisasi tenaga penyuluh. Melalui kegiatan tersebut implementasinya adalah teknologi telah diterapkan petani antara lain; (a) manajemen terpadu tanah, air dan hara tanaman, (b) manajemen terpadu sistem tanaman dan ternak; (c) perbaikan pengelolaan dan pembibitan kambing dan domba; (d) usaha ternak ayam hibrida; (e) penyediaan varietas unggul padi dan jagung; (f) usahatani tanaman hortikultura berorientasi konservasi lahan; (g) penanganan dan pengolahan jeruk di lahan marjinal; (h) adaptasi varietas pisang lokal berdayahasil tinggi dan (i) introduksi varietas yang resisten dan mikroba untuk perlindungan tanaman tembakau.

4.18. Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Teknologi Inovasi (Prima Tani)



Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) adalah suatu konsep baru diseminasi teknologi yang dapat mempercepat penyampaian informasi dan teknologi inovasi yang dihasilkan Departemen Pertanian. Dengan menerapkan teknologi inovasi spesifik lokasi dan mengembangkan kelembagaan agribisnis, diharapkan dalam waktu lima tahun dapat terbangun agribisnis industrial pedesaan, yang mampu meningkatkan pendapatan petani secara signifikan, menuju sistem pertanian yang sustainable dan lingkungan yang lestari. Pendekatan yang digunakan adalah: (a) agro-ekosistem, (b) agribisnis, (c) wilayah, (d) kelembagaan, dan (e) kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap awal tahun 2005 PRIMA TANI dilaksanakan di 14 Propinsi, mencakup 21 Lab. Agribisnis, dan pada tahun 2006 bertambah menjadi 25 Provinsi yang meliputi 30 desa, sedangkan pada tahun 2007 pelaksanaan Prima Tani diperluas ke 200 Kabupaten di seluruh Provinsi di Indonesia. Selanjutnya kegiatan Prima Tani akan dimasalkan atau direplikasikan dilokasi-lokasi lain yang memiliki sub-agroekosistem yang sama. Pada tahun 2007 telah dilepas 200 Pemandu Teknologi Prima Tani untuk aktif di 200 desa lokasi Prima Tani yang tersebar di 200 kabupaten dan memberikan advokasi kepada Pemda Kabupaten/Kota. "Desa Prima Tani adalah contoh pengembangan desa yang terintegrasi.

4.19. Pengembangan Energi Alternatif

Beberapa teknologi yang telah dihasilkan untuk dapat digunakan sebagai alternative sumber energi diantaranya: Teknologi Pengolahan Biji Jarak Menjadi Minyak Jarak (*Crude Jatropha Curcas Oil/CJCO*) dan Teknologi Produksi Biodiesel Sawit Sebagai Bahan Bakar yang Ramah Lingkungan. Selain telah diciptakan mesin pengolah biji jarak hasil rekayasa terdiri dari mesin pengupas kulit buah jarak (tipe rol ganda) dan mesin pengepres (*expeller*, tipe *screw*) masing-masing mempunyai kapasitas 200 kg/hari biji kering dengan hanya menggunakan satu motor penggerak diesel 8.5 HP. Prototipe-I

telah dikembangkan dan dikerjasamakan dengan BPPT untuk perbaikan rendemen dari unjuk kerjanya.

Dukungan perbenihan dan teknologi antara lain: (i) melaksanakan Peluncuran Perdana Benih Unggul Jarak Pagar (IP-1 A, IP-1M dan IP-1P) dari hasil seleksi masa negatif sebagai kesungguhan Departemen Pertanian dalam menyiapkan benih unggul jarak pagar dan sumber tanaman untuk bahan bakar nabati; (ii) Benih Jarak pagar terseleksi 36 ton hasil produksi benih IP2 (Improved Population 2); (iii) Teknologi pendukung pengembangan jarak pagar (peta kesesuaian lahan, paket teknologi pembibitan, teknologi budidaya, teknologi pasca panen & peralatannya); (iv) Pendampingan Teknologi pengembangan kebun induk di daerah 14 propinsi (Jambi, Sumbar, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NTB, NTT, Gorontalo, SULUT, Sulse, Sulteng dan Papua).

Selain itu, telah dibangun kebun induk jarak pagar seluas 50 ha, untuk dilakukan eksplorasi di 6 propinsi. Hasil eksplorasi di propinsi Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat diperoleh setek sebanyak 170.957 setek. Setek/benih ini, telah dibibitkan di KP Pakuwon Jawa Barat sebanyak 97.367 setek untuk pertanaman seluas 30 ha, KP Muktiharjo, Jawa Tengah, 37.590 setek dan KP Asembagus, Jawa Timur, sebanyak 36.000 setek untuk pertanaman kebun induk seluas 10 ha.

4.20. Bantuan untuk Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)

Tahun 2007 anggaran yang dialokasikan untuk bantuan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sebesar Rp.250milyar. Kegiatan ini dirancang untuk menjadikan lembaga yang berbasis keagamaan berperan dalam membantu masyarakat di sekitarnya dalam membangun usaha pertanian. Lembaga ini dimaksudkan antara lain: pondok pesantren, seminari, paroki,

pasraman, vihara, pura, subak dan lainnya. Tahun 2007 telah ditetapkan sebanyak 1030 unit LM3. Perkembangan dari pelaksanaan bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang Usaha Tanaman Pangan

Penguatan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM-3) yang bergerak pada bidang tanaman pangan sejumlah 128 unit LM-3 di 72 kabupaten/kota, 24 propinsi. Bidang usaha yang dikembangkan meliputi 7 komoditas utama tanaman pangan, jasa alsintan, pengembangan pupuk organik dan usaha tanaman pangan lainnya. Bidang-bidang usaha/komoditas yang dikembangkan meliputi: padi 48 unit, jagung 55 unit, kedelai 3 unit, kacang tanah 10 unit, kacang hijau 1 unit, ubikayu 2 unit, ubijalar 1 unit, pengembangan pupuk organik 2 unit, pemasaran hasil 1 unit, jasa alsintan 7 unit, dan usaha tanaman pangan lainnya 25 unit.

b. Bidang Usaha Perkebunan

Usaha pertanian dibidang perkebunan dengan pengembangan agribisnis difokuskan pada pengembangan jarak pagar dengan pemberian bantuan berupa agroinput pada 2 (dua) LM3 sebesar Rp.300 juta dan bantuan unit pengolahan hasil (UPH) Biodisel sebesar Rp.2,4 milyar serta bantuan biaya bangunan UPH serta modal kerja sebesar Rp. 400 juta. Kedua LM3 tersebut adalah:

- a. Pondok Pesantren Al Muflihah, Kabupaten Cirebon (Gebang Ilir, Gebang, Cirebon) Propinsi Jawa Barat dengan kegiatan penanaman kebun induk seluas 10 ha, kebun produksi seluas 3 ha dan fasilitas pompa air 4 unit.
- b. Pondok Pesantren Nurul Fikri, Kabupaten Serang (Kp. Cihideung – Kec. Cinangka) Propinsi Banten dengan kegiatan

penanaman kebun induk seluas 7 ha, kebun produksi seluas 4 ha dan fasilitas pompa air 4 unit.

c. Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Tahun 2007 telah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap semua LM3 yang mengajukan proposalnya dalam rangka mendapatkan bantuan. Dari seluruh LM3 yang mengajukan proposal telah ditetapkan sebanyak 179 yang layak menjadi calon penerima bantuan. Ke-179 LM3 dimaksud terdiri atas 129 Pondok Pesantren, 26 Yayasan, 2 Panti Asuhan, 10 Gereja dan 12 Subak yang pengelompokan usahanya meliputi: 172 LM3 pasca panen dan pengolahan, 1 LM3 pengutuhan, dan 6 LM3 pemasaran. Jenis kegiatan yang diusulkan antara lain :

- a. Tanaman Pangan: RMU, pengolahan tahu/tempe, kacang tanah, kripik singkong, tapioka, dan tepung jagung.
- b. Hortikultura: keripik, dodol, jahe instan, emping melinjo, buah-buahan, sayur-sayuran, dan biofarmaka.
- c. Perkebunan: pasca panen/pengolahan kakao, kopi, VCO, karet, minyak kelapa, minyak atsiri, dan biodiesel.
- d. Peternakan: pakan ternak, pupuk organik, biogas, daging/dendeng/abom dan pasteurisasi susu.

4.21. Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Kegiatan ini telah berjalan 2 tahun, guna membantu petani yang tidak memiliki agunan (*coloteral*) yang cukup dapat memperoleh akses ke perbankan. Dari penempatan dana

sebesar Rp.255 miliar tahun 2006, saat ini telah disalurkan kredit sekitar Rp.295 miliar. Sasaran penyediaan kredit mencapai gearing ratio lima kali lipat. Untuk tahun 2007 dan selanjutnya, dana SP3 yang sudah dianggarkan dirubah sistem penjaminannya menjadi penjaminan oleh PT. ASKRINDO dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (PSPU). Disamping itu, mulai tahun 2007 ini telah tersedia fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang meningkat dari Rp.2,4 triliun menjadi Rp.10,86 triliun. Fasilitas ini diharapkan dapat berperan besar didalam penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)* oleh petani dilapangan.

4.22. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang

Pelaksanaan pembangunan pertanian perlu dikelola dengan baik dan ditunjang dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kondusif, agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan tersebut menyangkut beberapa aspek/bidang yaitu: Perencanaan, Fasilitasi Peraturan dan Perundang-undangan, Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan, Administrasi Kepegawaian dan Organisasi, Kerjasama Luar Negeri dan Pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman.

Menyikapi dinamika perkembangan kebijakan nasional dalam perjalanan pembangunan pertanian periode tahun 2005-2009, tahun 2007 telah dilakukan penyusunan beberapa dokumen, antara lain: (1) Buku Renstra Deptan 2005-2009 Edisi revisi dan (2) Buku Revitalisasi Pertanian. Materi yang dicakup dalam kedua dokumen tersebut meliputi berbagai perubahan dan pengembangan kebijakan dan strategi, serta perubahan target produksi komoditas pertanian.

Buku Renstra Deptan Edisi Revisi disusun sebagai dokumen rujukan bagi setiap institusi di lingkungan Departemen Pertanian (di tingkat Pusat) dan Dinas/institusi lingkup Pertanian baik di tingkat

Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan Buku Revitalisasi Pertanian disusun sebagai dokumen rujukan bagi semua stakeholders (pihak pemangku kepentingan) sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam rangka mewujudkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Buku Revitalisasi Pertanian menegaskan keterkaitan, saling ketergantungan dan sinergi antara sektor pertanian dengan sektor lain. Melalui Buku Revitalisasi Pertanian diharapkan para stakeholders menyadari bahwa pembangunan sektor pertanian pada dasarnya adalah pembangunan nasional itu sendiri karena sektor pertanian merupakan gantungan hidup dari hampir separuh tenaga kerja nasional dan masyarakat miskin di wilayah perdesaan yang notabene adalah petani merupakan sasaran utama pembangunan nasional.

Buku Renstra Deptan Edisi Revisi disusun sebagai dokumen rujukan bagi setiap institusi di lingkungan Departemen Pertanian (di tingkat Pusat) dan Dinas/institusi lingkup Pertanian baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Regulasi di lingkungan Departemen Pertanian merupakan piranti kebijakan yang sekaligus sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian. Sampai dengan tahun 2007 telah diterbitkan 658 buah produk hukum yang terbagi atas 67 buah dalam bentuk Peraturan, dan 591 buah dalam bentuk keputusan. Seluruh produk tersebut telah dilakukan seleksi/penilaian dalam menunjang sistem agribisnis mulai dari sumberdaya, sarana produksi, budidaya, pengendalian penyakit (OPT), panen dan pasca panen yang diklasifikasikan kedalam 5 kelompok. Secara rinci semua produk tersebut disajikan pada tabel 21.

Tabel 21. Produk Hukum di bidang Pertanian

No.	No. SK	Tentang
1.	Peraturan Menteri Pertanian No.02/ Permentan/KP.340/1/2007	Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007.
2.	Peraturan Menteri Pertanian No.03/ Permentan/KP.340/1/2007	Penugasan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007.
3.	Peraturan Menteri Pertanian No.04/ Permentan/KP.430/1/2007	Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007
4.	Peraturan Menteri Pertanian No. 10/ Permentan/OT.140/2/ 2007	Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/Kpts/OT.210/6/ 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
5.	Peraturan Menteri Pertanian No.11/ Permentan/OT.140/2/2007	Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
6.	Peraturan Menteri Pertanian No.12/ Permentan/OT.140/2/2007	Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
7.	Peraturan Menteri Pertanian No.23/ Permentan/SR.120/2/2007	Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007.
8.	Peraturan Menteri Pertanian No.24/ Permentan/SR.120/2/2007	Harga Referensi Benih Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2007.
9.	Peraturan Menteri Pertanian No.25/ Permentan/OT.140/3/2007	Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian.
10.	Peraturan Menteri Pertanian No.30/ Permentan/OT.160/3/2007	Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian.
11.	Peraturan Menteri Pertanian No.34/ Permentan/SR.120/7/2007	Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/ SR.120/2/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007.
12.	Peraturan Menteri Pertanian No.41/ Permentan/OT.140/5/2007	Pedoman umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP).
13.	Peraturan Menteri Pertanian No.46/ Permentan/OT.140/5/2007	Pedoman Umum Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3).
14.	Peraturan Menteri Pertanian No.47/ Permentan/OT.140/5/2007	Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar Di Masyarakat (LM3).
15.	Peraturan Menteri Pertanian No.51/ Permentan/OT.140/6/2007	Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan dan Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tengah (<i>Rural Employment and Agricultural Development/ Read Programme in Central Sulawesi</i>).

16.	Peraturan Menteri Pertanian No.52/ Permentan/OT.140/7/2007	Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 junto Peraturan Menteri Pertanian nomr 34/ Permentan/SR.120/7/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007.
17.	Peraturan Menteri Pertanian No.54/ Permentan/KP.120/7/07	Pedoman Penilaian Petani Berprestasi.
18.	Peraturan Menteri Pertanian No.55/ Permentan/KP.120/7/07	Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi;
19.	Peraturan Menteri Pertanian No.56/ Permentan/KP.120/7/07	Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi;
20.	Peraturan Menteri Pertanian No.57/ Permentan/KU.430/7/07	Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Pertanian Tahun Anggaran 2007.
21.	Peraturan Menteri Pertanian No.63/ Permentan/OT.140/8/2007	Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007.
22.	Peraturan Menteri Pertanian No.66/ Permentan/OT.140/9/2007	Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/ Permentan/ OT.140/5/2007 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP).
23.	Peraturan Menteri Pertanian No.67/ Permentan/OT.140//11/07	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Pertanian Pembangunan.
24.	Keputusan Menteri Pertanian No. 461.1/Kpts/SR.120/8/2007	Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007.
25.	Peraturan Menteri Pertanian No.05/ Permentan/OT.140/1/2007	Syarat dan Tatacara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.
26.	Peraturan Menteri Pertanian No.08/ Permentan/SR.140/2/2007	Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik.
27.	Peraturan Menteri Pertanian No.40/ Permentan/OT.140/4/2007	Rekomendasi Pemupukan NP dan K pada padi Sawah Spesifik Lokasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Dilarang dan Pestisida Terbatas.
28.	Peraturan Menteri Pertanian No.42/ Permentan/SR.140/5/2007	Pengawasan Pestisida.
29.	Peraturan Menteri Pertanian No.65/ Permentan/OT.140/9/2007	Pedoman Pengawasan Mutu Pakan.
30.	Keputusan Menteri Pertanian No.81/ Kpts/SR.140/2/2007	Perubahan Nama, Formulasi, Nama Bahan Aktif, Dosis Aplikasi, dan Jenis Pestisida.

31.	Peraturan Menteri Pertanian No.26/ Permentan/OT.140/2/2007	Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
32.	Peraturan Menteri Pertanian No.35/ Permentan/OT.140/3/2007	Pedoman Budidaya Itik Petelur yang Baik.
33.	Peraturan Menteri Pertanian No.36/ Permentan/OT.140/3/2007	Pedoman Budidaya Itik Pedaging yang Baik.
34.	Keputusan Menteri Pertanian No.02/ kpts/OT.140/1/2007	Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan.
35.	Peraturan Menteri Pertanian No.06/ Permentan/OT.140/1/2007	Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Regional.
36.	Peraturan Menteri Pertanian No.44/ Permentan/OT.140/3/2007	Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Laboratory Practice</i>).
37.	Peraturan Menteri Pertanian No.45/ Permentan/PD.660/5/2007	Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.
38.	Peraturan Menteri Pertanian No.50/ Permentan/OT.140/6/2007	Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian.
39.	Peraturan Menteri Pertanian No.64/ Permentan/OT.140/9/2007	Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
40.	Keputusan Menteri Pertanian No.393/ Kpts/PD.620/7/2007	Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) di Wilayah Indonesia.
41.	Peraturan Menteri Pertanian No.27/ Permentan/OT.140/3/2007	Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/ Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri.
42.	Peraturan Menteri Pertanian No.58/ Permentan/OT.140/8/2007	Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian; Pelarangan Penggunaan Bahan kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
43.	Peraturan Menteri Pertanian No.59/ Permentan/HK.060/8/2007	Pedoman Penetapan Pencapaian Swasembada Daging Sapi.
44.	Peraturan Menteri Pertanian No.61/ Permentan/OT.140/8/2007	Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/ Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri.
45.	Keputusan Menteri Pertanian No.39/ PD.300/5/2007	Pasokan Crude Palm Oil (CPO) Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Guna Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah.

Disamping hal-hal tersebut diatas, beberapa produk regulasi dan kebijakan Departemen Pertanian yang telah berperanserta dalam penetapan berbagai piranti kebijakan regulasi yang lebih tinggi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden, secara rinci disajikan pada tabel 22.

Tabel 22. Produk Regulasi dan Kebijakan Di bidang Pertanian

1.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana.
2.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2007	Penanaman Modal.
3.	Undang-Undang No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang.
4.	Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007	Investasi Pemerintah.
5.	Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
6.	Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007	Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
7.	Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
8.	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2007	Penanganan Dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza).
9.	Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2007	Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
10.	Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2007	Kebijakan Perberasan.

Dalam sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan, sampai dengan tahun 2007, pengelolaan dibidang keuangan telah dilakukan penataannya seperti: penataan perbendaharaan keuangan dan PNBPN (Pembekalan/Sosialisasi/Apresiasi peraturan bidang keuangan kepada para pengelola APBN, Pelatihan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran, Pelatihan Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak APBN-P 2007), melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan (penyusunan Laporan Keuangan Tahunan & Semester I Tahun 2007, sosialisasi/pembinaan dan bimbingan teknis aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), pembinaan administrasi keuangan pada para pengelola APBN baik satuan kerjapusat maupun satuan kerja perangkat daerah). Dalam penataan perlengkapan, telah dilakukan

antara lain: Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengamanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pembinaan Administrasi Perlengkapan, Sosialisasi dan Aplikasi Sistem Akuntansi BMN, Pengamanan Kepemilikan Asset, dan Pemasyarakatan Prosedur Pengelolaan BMN sesuai PP 6 Tahun 2006.

Dibidang kepegawaian pada tahun 2007, telah dilakukan rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Petanian sebanyak 6.000 orang dari berbagai tingkat pendidikan (SLTA, D-III, DIV/S1) dibidang pertanian, kemudian diujung tahun 2007 telah dilakukan rekrutmen 10.000 orang THL, sehingga secara keseluruhan jumlah THL menjadi 16.000 orang.

Untuk mendukung pemerintah dalam forum

internasional khususnya dalam pembangunan pertanian kerjasama luar negeri sangat dibutuhkan. Selama tahun 2007 beberapa kerjasama yang dilakukan dan cukup strategis antara lain:

- a. Bantuan Technical Assistance untuk Samoa, Tonga, Gambia, Tanzania dan Sudan.

Dalam rangka mendukung peningkatan kerjasama bilateral dan kerjasama selatan-selatan serta diplomasi politik melalui bidang pertanian, maka Departemen Pertanian merealisasikan bantuan berupa hand traktor dan tenaga ahli untuk Samoa, Tonga, Gambia, Tanzania, dan Sudan.

- b. Bantuan Magang Petani Fiji di Indonesia

Sebanyak 5 orang Fiji yang terdiri dari 1 orang penyuluh dan 4 orang petani telah mengikuti magang petani di Indonesia yaitu di Kuningan, Sukamandi dan Ciawi untuk mempelajari budidaya tanaman padi.

- c. Kerjasama ASEAN bidang Pertanian

Dalam Forum Kerjasama ASEAN telah dihasilkan beberapa kesepakatan Kerjasama Sektoral ASEAN yaitu: ASEAN *Harmonized Maximum Residue Limits* (MRLs); ASEAN *Harmonized Standard* untuk beberapa komoditas buah; ASEAN *Standard* untuk *Live Infectious Bronchitis Vaccine* dan *Inactivated Infectious Bronchitis Vaccine*; Re-akreditasi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) Gunung Sindur, Bogor, Indonesia sebagai ASEAN *Animal Vaccine Testing Laboratory* untuk sepuluh vaksin hewan selama tiga tahun; dan ASEAN HPAI *Regional Strategy* 2008-2010.

- d. ASEAN *Good Agricultural Practices* (ASEAN GAP)

ASEAN *Good Agricultural Practices* (ASEAN GAP) telah difinalisasikan oleh

AADCP *Project on Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits and Vegetables Project* (QASAFV). Selanjutnya ASEAN GAP akan digunakan sebagai dasar pembentukan National GAP. ASEAN GAP memberikan dasar prosedur penanganan produksi, panen, dan pasca panen untuk buah-buahan dan sayur-sayuran mulai dari tempat produksi hingga pemasaran. ASEAN GAP mencakup: a). keamanan pangan, b). manajemen lingkungan, c). kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan d). kualitas produk.

Sampai dengan tahun 2007, dibidang pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman, telah dilakukan: Pelayanan Permohonan Hak PVT, Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman, Pelayanan Pengujian Substansi BUSS dan Pemberian Sertifikat Hak PVT. Dalam pelayanan Permohonan Hak PVT telah diproses sebanyak 119 varietas untuk diterbitkan sertifikatnya. Sedangkan untuk pelayanan pendaftaran telah diterima sebanyak 173 varietas baik lokal maupun hasil pemuliaan. Dari seluruh varietas yang telah diajukan telah diterbitkan sertifikatnya sebanyak 6 varietas.

4.23. Pengawasan Lalulintas Komoditas Pertanian

Indonesia sebagai negara agraris, sangat menyadari bahwa, salah satu pilar utama perekonomian nasional adalah pertanian dalam arti luas. Salah satu ancaman dari negara agraris selain bencana alam adalah serangan hama dan penyakit baik pada hewan maupun tumbuhan. Dalam hal ini, Indonesia masih dapat dikatakan bebas dari beberapa hama dan penyakit hewan maupun tumbuhan yang mempunyai potensi daya rusak yang tinggi. Diantaranya *Lethal yellowing* pada sawit yang daya rusaknya menurunkan produktivitas sawit sampai 70%, *South American*

Leaf Blight (SALB) atau penyakit dawar daun pada karet yang daya rusaknya dapat memusnahkan pohon karet yang ada. Selain itu, juga belum terinvestasi beberapa jenis lalat buah daerah subtropik & mediteran yang cukup ganas daya rusaknya dan pada hewan diantaranya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), reindapest, johndeases dan sebagainya.

Berbagai jenis hama & penyakit yang belum ada di Indonesia tersebut harus dicegah masuknya, dan biasanya mereka bisa masuk melalui media pembawa berupa bibit/benih, komoditas, produk, tanah-tanah ikutan yang dilalulintaskan baik melalui pintu-pintu masuk formal (biasanya melalui pintu-pintu pemasukan formal sangat sulit lolos dari petugas karantina, sesandainya bias lolos kadang melalui kemasan kecil/barang tengangan/selundupan) maupun non formal (pelabuhan rakyat) yang masuk seara illegal.

Bagi media pembawa yang masuk melalui pintu-pintu formal, pembawanya berada pada tanggung jawab petugas karantina pertanian, sedangkan yang masuk melalui pintu-pintu pemasukan non formal pengawasannya merupakan tanggung jawab dari petugas keamanan & pemerintah daerah setempat. Terdapat 704 buah pintu-pintu pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan sebagai pintu pemasukan formal dengan kekuatan SDM karantina pertanian sebanyak 2.100 personil termasuk didalamnya 350 personil terlatih sebagai PPNS karantina dan 117 personil terlatih sebagai intelegen karantina. Selain itu masih terdapat sekitar 3.000 pintu-pintu pemasukan & pengeluaran tidak formal yang berada disepanjang pantai dari setiap pulau.

Sebagian besar media pembawa asal negara-negara yang dilarang masuk ke Indonesia dengan alasan penyakit diantaranya adalah: India, Brazil,

Argentina, PNG dan Malaysia. Seringkali masuk ke Indonesia dan sebagian tertangkap oleh aparat keamanan masuk secara illegal melalui pintu-pintu pemasukan tidak formal dan sebagian lagi melalui pintu formal dengan dokumen palsu atau melalui bawaan. Tempat-tempat yang teridentifikasi rawan terhadap pemasukan hewan dan produk hewan illegal diantaranya adalah: disekitar Aceh Timur, Tanjung Balai Asahan, Belawan, Dumai, Tanjung Batu (Tanjung Pinang), Batam Tanjung Balai Karimun, Kuala Tungkal (Jambi), Pelabuhan-pelabuhan Banten dan Tanjung Priok, Entikong, Sajingan (Pontianak), Sebatik, Tarakan, Nunukan, Antambua dan Merauke.

Dalam rangka menangkal berkembangnya hama dan penyakit tanaman di Indonesia, yang disebabkan masuknya komoditas melalui beberapa pintu masuk (pelabuhan udara dan laut) Departemen Pertanian menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Melalui pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian No.37 tahun 2006 yang menyangkut persyaratan teknis pemasukan buah segar dan sayur buah segar ke dalam wilayah Indonesia, tahun 2005 s/d 2007 telah berhasil menekan impor buah dari 425 ribu tahun ton tahun 2005 menjadi 193,96 ribu ton pada tahun 2007.

Untuk mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian telah dilakukan Skim Audit, yaitu penyempurnaan penyelenggaraan program registrasi terhadap perusahaan fumigasi dan perusahaan kemasan kayu dalam rangka penguatan kinerja pelaksanaan tindakan karantina yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sampai dengan tahun 2007 sebanyak 96 perusahaan fumigasi dan 82 perusahaan kemasan kayu yang telah teregistrasi dengan personel yang memiliki sertifikat kompeten untuk pelaksanaan fumigasi metil bromide ada 148 orang.

4.24. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian

Kinerja pelaksanaan pembangunan pertanian tidak lepas dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap para pelaksana kegiatan. Pemeriksaan kinerja, pemeriksaan investigasi, pemeriksaan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, dan pemeriksaan akuntabilitas, merupakan program kerja dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Sampai dengan Oktober 2007 capaian kinerja dari kegiatan tersebut secara berturut-turut adalah pemeriksaan kinerja telah dilakukan terhadap 329 Satuan Kerja (Satker) lingkup Pertanian atau 94% dari target sebanyak 350 Satker; pemeriksaan investigasi sebanyak 34 kasus atau 34% dari target sebanyak 100 kasus; pemeriksaan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebanyak 19 propinsi atau 79,17% dari target sebanyak 24 Propinsi; dan pemeriksaan akuntabilitas sebanyak 7 laporan atau 58,33% dari target sebanyak 12 laporan.

Selain kegiatan utama di atas, kebijakan lain yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pengawasan adalah kegiatan pengawasan program/ kegiatan strategis. Kegiatan strategis dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dinilai memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan pertanian.

Pengawasan sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu bentuk pengawasan yaitu monitoring dan evaluasi kinerja program/kegiatan sebagaimana tersirat pada Peraturan Menegara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/03/M.PAN/02/2006.

Tujuan kegiatan pengawasan adalah untuk mendeteksi secara dini berbagai permasalahan/kelemahan/penyimpangan pada setiap tahap kegiatan. Tahun 2007 program/kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian meliputi: a) Kegiatan Lembaga Mandiri Mengakar Masyarakat, b) Program Peningkatan Produksi Beras Nasional, c) Primatani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasaryakatan Inovasi Teknologi Pertanian), dan d) Program Akselerasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Gula Nasional 2007.

Dari semua program tersebut beberapa hasil pengawasan yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan kegiatan LM3 tersebut temuan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian tujuan yaitu perlunya optimalisasi tenaga pendamping, utamanya dalam hal pembinaan teknis di lapangan, sehingga tingkat kegagalan kegiatan LM3 dapat diminimalisir.
- b) Pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program P2BN adalah perencanaan yang dilakukan lebih baik, antara lain dalam penerbitan berbagai Juklak dan Juknis, penetapan CP/CL, penetapan alokasi bantuan benih padi, jagung, dan kedelai, serta jadwal pelaksanaan penyaluran bantuan benih agar dapat dimanfaatkan petani sesuai lahan dan waktu tanam. Monitoring dan evaluasi juga agar dilakukan lebih efektif dan efisien, sehingga kendala dilapangan segera dapat diantisipasi dan diperbaiki dan program dapat mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah standarisasi mutu benih. Benih yang diserahkan ke petani hendaknya benih yang telah memperoleh lebel/telah

disertifikasi. Melalui benih bersertifikasi tersebut diharapkan jaminan kualitas benih dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya daya tumbuh dan daya hasil akan lebih optimal.

c). Pada Program Primatani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian), bahwa telah terjadi percepatan difusi inovasi teknologi, antara lain paket teknologi PTT, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, integrasi ternak-tanaman, pemanfaatan embung, pelaksanaan PHT. Juga telah terbentuk kelembagaan petani seperti Gapoktan, Kios Saprodi, Lembaga Keuangan Mikro, P3A. Pada beberapa lokasi terjadi peningkatan

provitas padi lahan kering dari 2,4 ton/ha menjadi 4-5 ton/ha, padi sawah dari 4,5 ton/ha menjadi 7-8 ton/ha, jagung dari 4-5 ton/ha menjadi 8-10 ton/ha dan di beberapa lokasi terjadi peningkatan pendapatan petani rata-rata sebesar 20%, bahkan di Bali dan Kolaka-Sultra mencapai 50%.

d) Pada Program Akselerasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Gula Nasional 2007, luas areal giling tahun 2006 meningkat 6,79% dibandingkan tahun 2005 (dari 368.036,70 ha menjadi 393.038,76 ha). Selain itu Produksi gula nasional tahun 2006 meningkat 4,57% dibandingkan tahun 2005 (2.217.704 ton menjadi 2.319.225,09 ton).





DEPARTEMEN PERTANIAN



BAB V
LANGKAH-LANGKAH YANG
AKAN DILAKSANAKAN
TAHUN 2008



5.1. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian 2008

Kebijakan dan strategi pembangunan pertanian tahun 2008 dirancang sebagai bagian dan keberlanjutan dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Selain itu tentu saja kebijakan dan strategi tersebut merupakan komponen dari RKP 2008, khususnya dalam menunjang prioritas ke-dua RKP 2008 yaitu revitalisasi pertanian dan perdesaan, serta diselaraskan dengan kondisi riil kemajuan pembangunan pertanian hingga saat ini danantisipasi perubahan lingkungan strategis pembangunan pertanian ke depan.

5.1.1. Kebijakan Pembangunan Pertanian 2008

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam RKP 2008 ada tiga (tiga) kebijakan utama yang akan diimplementasikan Departemen Pertanian tahun 2008, yaitu:

- 1) Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan

Kebijakan ini mengandung makna bahwa Departemen Pertanian akan secara lebih terfokus untuk menambah volume produksi bahan pangan, khususnya bahan pangan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Selain itu berbagai kebijakan Departemen Pertanian juga akan diarahkan agar bahan pangan dapat diakses secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi harga, lokasi, jumlah maupun kualitas bahan pangan.

- 2) Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian

Dalam rangka memperkuat daya saing dan nilai tambah kegiatan pertanian, maka sebagian besar

sumberdaya dan kebijakan akan diarahkan untuk memfasilitasi sasaran peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Hal ini tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani/peternak, tetapi juga ditujukan untuk secara optimal memanfaatkan sumberdaya pertanian (lahan, modal serta alat dan mesin pertanian) dalam rangka meningkatkan kontribusi pertanian terhadap perekonomian nasional.

- 3) Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan

Beban yang diemban Departemen Pertanian tidak terbatas pada upaya peningkatan produksi pertanian, tetapi juga dituntut untuk turut mengentaskan kemiskinan khususnya di perdesaan, mengurangi pengangguran nasional dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu kebijakan Departemen Pertanian perlu diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja baru, khususnya melalui diversifikasi usaha pertanian dan agroindustri perdesaan.

5.1.2. Strategi Pembangunan Pertanian Tahun 2008

Dalam rangka implementasi kebijakan-kebijakan tersebut maka ada dua strategi besar yang akan ditempuh Departemen Pertanian tahun 2008, yaitu (a) Memperkokoh fondasi pembangunan pertanian melalui Panca Yasa, dan (b) Akselerasi pembangunan pertanian.

- 1) Memperkokoh fondasi pembangunan pertanian melalui Panca Yasa Strategi memperkokoh fondasi pembangunan pertanian ini akan terdiri dari:
 - a) Penyediaan/perbaikan infrastruktur termasuk sistem perbenihan/perbibitan dan riset. Secara garis besar strategi ini akan dituangkan dalam bentuk penyediaan/perbaikan irigasi desa, jaringan irigasi tingkat

- usaha tani, tata air mikro, jalan usahatani, perbaikan sistem perbenihan dan riset pendukungnya.
- b) Penguatan kelembagaan. Secara garis besar strategi ini akan dituangkan dalam wujud pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
 - c) Perbaikan sistem penyuluhan. Secara garis besar strategi ini akan dituangkan dalam bentuk peningkatan sistem penyuluhan dan SDM, pengembangan magang sekolah lapang, diklat petani, dll.
 - d) Penanganan pembiayaan pertanian terutama upaya untuk memobilisasi dana masyarakat di Perbankan. Secara garis besar strategi ini akan dituangkan dalam bentuk bantuan langsung masyarakat untuk keringanan investasi pertanian (BLM-KIP), bantuan dana penguatan modal usaha kelompok (PMUK) seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3), Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP), fasilitasi skim pelayanan pembiayaan pertanian, dll.
 - e) Fasilitasi pemasaran hasil pertanian. Secara garis besar strategi ini akan dituangkan dalam bentuk stabilisasi harga produk primer pertanian melalui DPM-LUEP, peningkatan kegiatan pasca panen dan pengolahan, mekanisasi pasca panen, pengembangan pasar tani, dll.
- 2) Akselerasi pembangunan pertanian
- a) **SATU DESA-SATU KOMODITAS-SATU PENYULUH.** Berdasar pada pengalaman pembangunan pertanian selama ini, sampai pada satu kesimpulan bahwa manajemen pembangunan pertanian memerlukan pendekatan wilayah sebagai basis penanganan persoalan. Wilayah

pertanian yang seharusnya dijadikan basis pembangunan adalah wilayah administratif desa guna menjamin berjalannya prinsip-prinsip manajemen efektif, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga ke pengawasannya. Walaupun berbagai kajian membuktikan pentingnya sistem *agro-forestry* yang menerapkan ragam komoditas dalam satu hamparan untuk mencapai diversifikasi dan keamanan berusaha, namun didalam sebuah wilayah pertanian desa diperlukan kesepakatan untuk menentukan satu komoditas unggulan yang dapat diusahakan secara terpadu, komprehensif, efisien dan produktif.

Petani dan peternak perlu memiliki organisasi ekonomi yang kuat guna memperjuangkan kepentingan mereka terhadap informasi teknologi, permodalan dan pasar. Untuk itu diperlukan penguatan jejaring kerja antar-desa, antar kabupaten, hingga ke tingkat nasional dan bahkan regional. Untuk mewujudkan visi ini petani memerlukan tenaga pendampingan mengingat waktu petani untuk menangani hal-hal diluar usahatannya sangatlah terbatas. Untuk keperluan ini, peran penyuluh perlu diperkuat dan diperluas. Dengan pendekatan tersebut, maka akan bermuara pada strategi **SATU DESA, SATU KOMODITAS, SATU PENYULUH** yang diyakini dapat membantu terwujudnya pertanian modern yang ditangani secara profesional dengan mengedepankan kepentingan petani untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang semakin baik.

- b) Perencanaan Berdasarkan *Master Plan* dan *Road Map*. Implementasi dari strategi tersebut adalah dengan cara menuangkan segala pikiran dan ide yang berasal dari pendapat masyarakat setempat ke dalam sebuah *master plan* yang dilengkapi dengan *road map* yang jelas agar dapat mengukur sampai dimana pembangunan pertanian di suatu

wilayah telah berhasil dilakukan, dan apa-apa yang perlu disempurnakan. Diperlukan *master plan* pembangunan wilayah mulai dari *master plan* propinsi, kabupaten, kecamatan hingga Desa, serta menyusun Peta Jalan (*Road Map*) untuk mencapai visi pertanian yang disepakati di dalam *master plan* yang disusun. Tanpa *master plan* maka perencanaan tahunan yang dituangkan ke dalam DIPA akan menjadi parsial dan tidak utuh, dan seringkali menjadi tidak mengena sama sekali dan bahkan tidak menyentuh kepentingan kelompok sasaran atau masyarakat pertanian di Desa yang hendak dibangun.

- c) Melibatkan Partisipasi Berbagai Komponen Masyarakat. Perencanaan wilayah yang komprehensif ini harus dengan mengikutkan partisipasi komponen masyarakat (Ormas, Organisasi Petani, Perguruan Tinggi, dll.), mengingat masyarakatlah yang lebih tahu apa sesungguhnya kebutuhan mereka. Membangun masyarakat di sebuah kawasan pertanian tentu saja harus dimulai dari penguasaan data dan informasi di masing-masing desa, yaitu yang menyangkut kekuatan, kelemahan, kesempatan dan antisipasi terhadap ancaman dari sistem yang akan dibangun. Bagaimana mungkin dapat merencanakan pembangunan pertanian dengan baik apabila tidak menguasai permasalahan fundamental yang menyebabkan sebuah Desa tertinggal, tidak menarik dan penduduknya miskin. Artinya, pengembangan *data base pertanian* ini harus dibangun sesegera mungkin. Misalnya: bagaimana kondisi infrastruktur pertaniannya termasuk kelembagaan perbenihan, kelembagaan riset maupun kelembagaan pertanian lainnya, kondisi kelompok tani/gabungan kelompok taninya, sistem penyuluhannya termasuk perhatian kepada penyuluhnya, sistem pembiayaan

pertaniannya, serta kondisi pasarnya. Lima hal inilah yang paling tidak perlu dibedah sebelum menentukan strategi pembangunan pertanian yang spesifik di sebuah wilayah. Perlu disesuaikan semua fungsi tersebut dengan kondisi geografis sebuah wilayah pertanian, baik dari sisi letak maupun bentuk topografinya.

- d) Fokus Penanganan Terhadap Sejumlah Komoditas. Dengan beragam jenis komoditas pertanian yang tumbuh di Indonesia, diperlukan pilihan fokus penanganan komoditas pertanian pada tingkat nasional yang dapat memberikan dampak nyata dan dirasakan hasilnya oleh petani, peternak maupun masyarakat konsumen pertanian dalam kurun waktu tersebut. Dari sekian banyak komoditas pertanian yang diusahakan petani dan peternak, terdapat lima komoditas pangan yang menjadi fokus perhatian di tingkat nasional, yaitu: swasembada padi berkelanjutan, swasembada jagung 2007-2008, swasembada kedelai 2015, swasembada gula 2009 dan kecukupan daging sapi tahun 2010.

Pada tahun 2008, dari kajian yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, fokus komoditas unggulan yang akan dikembangkan secara intensif meliputi :

- 1) Tanaman pangan: padi, kedele, jagung, ubi kayu dan kacang tanah;
- 2) Hortikultura: kentang, cabe merah, bawang merah, mangga, manggis, pisang, anggrek, durian, rimpang dan jeruk;
- 3) Perkebunan: kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, tanaman serat, tebu, tembakau, dan cengkeh (tanaman obat); serta

- 4) Peternakan: sapi potong, kambing, domba, babi, ayam buras dan itik (unggas).

Di tingkat lokal/kabupaten/propinsi ditekankan kepada pengembangan ketahanan pangan lokal. Oleh karena itu potensi-potensi karbohidrat lokal yang erat kaitannya dengan budaya lokal menjadi fokus penanganan spesifik bagi wilayah yang bersangkutan, seperti komoditas : pisang, umbi-umbian, dan sagu.

- e) Sinergis Seluruh Potensi Sumberdaya Secara Optimal. Pembangunan pertanian memerlukan sumberdaya, baik berupa modal, teknologi dan SDM. Berbagai sumberdaya tersebut di lingkungan Departemen Pertanian tersebar pada masing-masing Eselon I, baik yang berada di kantor pusat maupun daerah. Sementara di luar lingkup Departemen Pertanian potensi sumberdaya untuk mendukung pembangunan pertanian juga tersebar baik antar sektor, antar pusat dan daerah maupun antar pemerintah-swasta-masyarakat. Semua potensi sumberdaya ini perlu disinergikan secara harmonis untuk bisa mengembangkan kegiatan pembangunan pertanian pada lokasi yang tepat agar memiliki daya dobrak yang lebih besar dibandingkan apabila sumberdaya pembangunan pertanian tersebut digunakan secara parsial oleh masing-masing pihak yang menguasai sumberdaya pertanian.
- f) Memperkuat Sistem Monitoring dan *Data Base*. Pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan memerlukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan. *MasterPlan* yang telah disusun bukanlah harga mati yang tabu untuk dirubah. Sebaliknya kapan saja dapat dilakukan revisi apabila diperlukan, asalkan dilakukan dengan metoda yang benar dengan melibatkan sepenuhnya

partisipasi masyarakat, dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis nasional dan internasional. Pengumpulan data dan informasi tentang ukuran-ukuran keberhasilan sangat penting kita miliki. Saat ini sangat jarang dimiliki ukuran-ukuran ini. Data menyangkut produktivitas, harga komoditas, biaya usahatani yang dikaitkan dengan ongkos tenaga kerja dan harga input, pendapatan petani, sangat sulit diperoleh dan kalau pun ada tingkat akurasi masih sangat rendah. Oleh karena itu, para Kepala Daerah perlu memperhatikan betapa pentingnya memiliki ukuran-ukuran ini guna menjadi alat untuk mengetahui sampai dimana sasaran-sasaran yang kita tetapkan dapat dicapai, dan apa yang menjadi kendala utama pencapaiannya.

5.2. Sasaran Pembangunan Pertanian 2008

Secara makro pembangunan pertanian tahun 2008, menargetkan pertumbuhan PDB (diluar kehutanan dan perikanan) sebesar 4.2 % yang terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura 2.47 %, perkebunan 6.94 % dan peternakan 5.02 %. Target penyerapan tenaga kerja sebanyak 43.60 juta orang atau tambahan 2.6 juta orang dari target tahun 2007. Jumlah penduduk miskin di pedesaan diharapkan menurun menjadi 15.95 % serta penduduk rawan pangan menurun 1 % dibanding tahun 2007. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani pada tahun 2008 ditargetkan berkisar antara 115-120. Sedangkan surplus neraca perdagangan diharapkan sebesar US \$ 12.41 milyar.

Sementara itu sasaran produksi komoditas pertanian tahun 2008 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Sasaran Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2008

No.	Komoditas	Target Produksi (juta ton)
A. Tanaman Pangan		
1.	Padi	60-61
2.	Jagung	15,9-16,5
3.	Kedelai	1-1,3
4.	Kacang Tanah	0,98
5.	Kacang Hijau	0,36
6.	Ubi Kayu	21,1
B. Hortikultura		
1.	Kentang	1,19
2.	Cabe Merah	0,82
3.	Bawang Merah	0,95
4.	Mangga	1,84
5.	Manggis	0,09
6.	Pisang	6,20
7.	Durian	0,83
8.	Jeruk	3,14
9.	Anggrek	24,41
10.	Rimpang	0,45
C. Tanaman Perkebunan		
1.	Gula	2,74
2.	Karet	2,54
3.	Kelapa	2,26
4.	Kelapa Sawit	17,4
5.	Kopi	0,68
6.	Lada	0,08
7.	Cengkeh	0,08
8.	Kakao	0,84
9.	Jambu Mete	0,16
10.	Tembakau	0,20
11.	Kapas	0,06
D. Peternakan		
1.	Daging Sapi	0,372
2.	Kambing	0,065
3.	Domba	0,056
4.	Babi	0,221
5.	Ayam Buras	0,315
6.	Ayam Ras	0,00129
7.	Itik	0,0265

5.3. Program dan Kegiatan Tahun 2008

Pada Tahun Anggaran 2008 Departemen Pertanian akan melaksanakan lima Program, di mana 3 diantaranya merupakan program utama dalam rangka kelanjutan revitalisasi pertanian yaitu : a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, b) Program Pengembangan Agribisnis, c) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan dua lainnya merupakan program pendukung yaitu: d) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dan e) Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.

Dalam rangka mengimplementasikan program-program Tahun Anggaran 2008 tersebut, Departemen Pertanian telah merancang 38 kegiatan prioritas, di mana 19 kegiatan diantaranya diklasifikasikan sebagai kegiatan prioritas nasional (dimasukkan dalam BUKU I RKP 2008), sementara 19 kegiatan lainnya diklasifikasikan sebagai kegiatan prioritas Departemen (dimasukkan dalam BUKU II RKP 2008). Adapun ke-38 kegiatan dimaksud terdiri dari 13 kegiatan untuk mendukung Program Peningkatan Ketahanan Pangan, 15 kegiatan untuk mendukung Program Pengembangan Agribisnis, 8 kegiatan untuk mendukung Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan masing-masing 1 (satu) kegiatan untuk mendukung Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara dan Program Penyelenggaraan Pimpinan Pemerintahan Yang Baik.

Pada dasarnya ke-38 Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2008 telah dirancang dengan mempertimbangkan: (1) Sasaran dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008, (2) Hasil Evaluasi kegiatan TA 2006 dan 2007, dan (3) Masalah-masalah fundamental pembangunan pertanian dan petani/peternak yang perlu segera diselesaikan.

Dari segi pertimbangan untuk memenuhi Sasaran dan Arah Kebijakan nasional di sektor pertanian yang terfokus pada 3 (tiga) hal yaitu: (1) Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan, (2) Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian, dan (3) Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan, maka paling tidak ada 19 kegiatan Departemen Pertanian yang secara formal dicantumkan dalam BUKU I RKP 2008 sebagai kegiatan yang menjadi prioritas nasional untuk memenuhi sasaran ke tiga fokus kebijakan tersebut.

Demikian pula sasaran pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti sempit (di luar Perikanan dan Kehutanan) sebesar 4.2 %, Nilai Tukar Petani antara 115-120 dan Surplus Perdagangan Pertanian sebesar US \$ 12,41 milyar telah dijadikan dasar dalam penentuan volume dan lokasi kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2008.

Disamping itu, Departemen Pertanian juga telah merancang kegiatan-kegiatan baru untuk mendukung program nasional pada aspek-aspek tertentu, seperti: Pengembangan Bahan Baku Bio-energi, Pengembangan Desa Mandiri Energi, dan Peningkatan Pengarusutamaan Gender.

Dari segi pertimbangan atas dasar evaluasi kegiatan tahun 2006 dan 2007, maka pada tahun 2008 telah dilakukan realokasi anggaran dan volume antar kegiatan maupun tambahan kegiatan-kegiatan baru pada tahun 2008. Sebagai contoh volume pelayanan benih gratis kepada petani telah dikurangi menjadi hanya sepertiganya pada tahun 2008 dan lokasinya akan diarahkan pada sentra-sentra pertanian yang betul-betul perlu ditingkatkan mutu benihnya. Demikian pula dukungan penyediaan/perbaikan infrastruktur telah diperluas cakupannya, tidak hanya tertuju untuk mendukung komoditas pangan melainkan

juga untuk mendukung komoditas-komoditas prospektif lainnya.

Sementara dari segi pertimbangan untuk upaya pemecahan masalah-masalah fundamental pembangunan pertanian dan petani/peternak, maka pada tahun 2008 perencanaan kegiatan lebih ditekankan pada memperkokoh pilar Panca Yasa sebagai solusi fundamental pembangunan pertanian yang berintikan: (1) penyediaan/perbaikan infrastruktur termasuk sistem perbenihan/perbibitan dan riset, (2) penguatan kelembagaan, (3) perbaikan sistem penyuluhan, (4) penanganan pembiayaan pertanian terutama upaya untuk memobilisasi dana masyarakat di Perbankan, dan (5) fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

5.3.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Tujuan program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah agar masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah: (1) Stabilisasi Harga Komoditas Primer melalui DPM-LUEP, (2) Penyediaan dan Perbaikan infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P), (3) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan, (4) Pengembangan Pembibitan Sapi, (5) Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan, (6) Peningkatan Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Pangan, (7) Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan, (8) Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Primer, (9) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian, serta Pengembangan Kawasan, (10) Penelitian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian dalam

Mendukung Ketahanan Pangan, (11) Penguatan Kelembagaan Perbenihan dalam Mendukung Ketahanan Pangan, (12) Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk, dan (13) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Diversifikasi Pangan, Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Kelembagaan Ketahanan Pangan.

Penjelasan dari masing-masing kegiatan yang tercakup dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan tahun 2008 ini secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Stabilisasi Harga Komoditas Primer melalui Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP)

Satu kendala utama usahatani tanaman pangan terutama padi adalah terjadinya fluktuasi harga padi/gabah yang ekstrim menurut musim tanam. Pada saat panen raya, harga padi/gabah menurun dan sebaliknya pada saat paceklik harganya meningkat. Dalam rangka meningkatkan stabilisasi harga pangan tersebut dan mendukung peran Bulog, Departemen Pertanian mengembangkan kegiatan fasilitasi berupa Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP). Kegiatan DPM-LUEP telah dilaksanakan sejak tahun 2003 dan telah menunjukkan hasil yang positif.

2) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Sampai saat ini, infrastruktur pendukung pertanian seperti jalan usahatani, jalan produksi, dan jaringan irigasi masih jauh dari memadai. Untuk lebih menarik minat investor sektor pertanian dan meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana produksi dan output pertanian, maka perlu kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan irigasi perdesaan, tata air mikro, irigasi tanah dangkal, sumur resapan, embung, waduk, dam parit, terasering dan lainnya.

3) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan.

Akhir-akhir ini sektor pertanian sering dilanda musibah serangan wabah hama penyakit tanaman antara lain: wereng coklat, hama sexava, hama PBK, penyakit ternak seperti anthrax, penyakit mulut dan kuku, serta virus hewan lainnya. Untuk itu salah satu prioritas kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2008 diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan ternak tersebut.

a. Pengembangan Pembibitan Sapi.

Dalam dekade terakhir ini impor sapi hidup dan daging sapi masih sangat tinggi, bahkan pernah mencapai lebih dari 420.000 ekor pada tahun 2002. Walaupun saat ini ada penurunan impor, namun tidak dibarengi dengan peningkatan populasi di dalam negeri. Di dalam negeri sendiri terjadi peningkatan pemotongan sapi betina produktif dan muda/kecil. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri, maka perlu ada terobosan dalam pengembangan sapi di Indonesia. Untuk itu pada tahun 2008 akan dilakukan peningkatan kegiatan perbibitan sapi melalui pengembangan pusat perbibitan sapi (seperti *Village Breeding Center*) yang dibina oleh UPT Daerah.

b. Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan.

Selama ini penggunaan benih/bibit unggul bermutu di tingkat petani masih rendah. Untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian, Departemen Pertanian akan melakukan upaya bantuan benih/bibit unggul bermutu bagi petani. Upaya ini diharapkan juga akan mampu menekan harga benih/bibit bermutu sehingga dapat diakses petani/peternak.

c. Peningkatan Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Pangan.

Untuk mengurangi kehilangan hasil panen,

meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian, serta mengembangkan pemasaran, maka akan ditingkatkan penggunaan berbagai sarana pasca panen seperti: (1) sarana penyelamatan pasca panen (pengeringan melalui terpalisasi dan pengembangan sarana pengering surya), dan (2) sarana pergudangan.

d. Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan

Wabah flu burung, terutama yang menular dari unggas kepada manusia, telah menjadi isu global. Kerugian yang terjadi tidak hanya dari jatuhnya korban manusia tetapi juga kerugian ekonomi akibat banyak unggas yang harus dimusnahkan. Pada gilirannya, isu global ini akan juga dapat mempengaruhi iklim dunia usaha dan investasi di Indonesia. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia berkewajiban untuk turut ambil bagian secara serius dalam menangani flu burung ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penanganan, pengendalian, dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi flu burung ini, serta juga merestrukturisasi usaha perunggasan di Indonesia.

e. Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Primer

Proses produksi pertanian primer di Indonesia pada umumnya masih dilakukan dengan alat sederhana dan konvensional. Dalam upaya membantu proses produksi dan meningkatkan hasil produksi, maka mekanisasi dalam usahatani perlu dikembangkan.

f. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian, serta Pengembangan Kawasan

Meskipun telah terjadi peningkatan produksi yang signifikan dari berbagai komoditas pertanian selama beberapa dekade terakhir ini, namun peningkatan tersebut masih jauh dari potensinya, terutama untuk komoditas perkebunan rakyat. Di lain pihak, walaupun komoditas tanaman

pangan relatif lebih maju, namun pengembangan komoditas ini juga dihadapkan pada kendala keterbatasan sumberdaya lahan dan semakin tingginya *opportunity cost* dengan semakin tajamnya kompetisi penggunaan lahan dengan non-pertanian (terutama di pulau Jawa). Keberhasilan peningkatan produktivitas sangat berkorelasi dengan inovasi teknologi (penggunaan varietas/klon unggul). Sehubungan dengan upaya peningkatan produksi, produktivitas, intensitas tanam, dan pengembangan kawasan, maka pada tahun 2008 akan dilakukan upaya perluasan areal tanam, terutama di luar Pulau Jawa.

4) Penelitian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Pembangunan pertanian perlu didukung oleh teknologi, sehingga dapat dipercepat dan memberikan hasil yang optimal. Untuk keperluan ini, upaya percepatan penemuan inovasi dan alih teknologi sangat dibutuhkan. Upaya pengembangan dan diseminasi teknologi akan dilaksanakan oleh unit-unit penelitian yang ada di lingkup Departemen Pertanian.

5) Penguatan Kelembagaan Perbenihan dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Benih/bibit merupakan faktor esensial dalam berusahatani. Untuk ini, maka perlu penguatan kelembagaan perbenihan/perbibitan yang bertugas menghasilkan benih/bibit unggul dan bermutu.

6) Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk

Pupuk merupakan sarana input yang penting bagi keberhasilan proses produksi usahatani. Sampai saat ini, penyediaan pupuk masih memperoleh subsidi dari Pemerintah. Dalam upaya mendukung pelaksanaan penyediaan pupuk, Departemen Pertanian merencanakan untuk memfasilitasi perbaikan mekanisme subsidi pupuk.

7) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Diversifikasi Pangan, Penanganan Daerah

Rawan Pangan, dan Kelembagaan Ketahanan Pangan

Kerawanan pangan dan kemiskinan hingga kini masih menjadi masalah utama di Indonesia. Untuk itu, salah satu fokus pembangunan pertanian adalah penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan dengan jalan meningkatkan ketahanan pangan. Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu perdesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Pembangunan desa mandiri pangan dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga.

5.3.2. Program Pengembangan Agribisnis

Program Pengembangan Agribisnis ditujukan untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian yang produktif dan efisien untuk menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam Program Pengembangan Agribisnis pada tahun 2008 adalah: (1) Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas Pertanian, (2) Pengembangan Bahan Baku Bio-energi, (3) Pengembangan Desa Mandiri Energi, (4) Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA), (5) Pengembangan Agroindustri Perdesaan, (6) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas, (7) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat, (8) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan

Agribisnis (PNPM-P), (9) Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Pasca Panen dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis, (10) Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu, (11) Pengembangan Pertanian Organik dan Lingkungan Hidup, (12) Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis, (13) Penguatan Kelembagaan Perbenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis, (14) Penelitian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis, dan (15) Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan kepada Petani/Pelaku Agribisnis. Penjelasan dari masing-masing kegiatan yang termasuk ke dalam Program Pengembangan Agribisnis tahun 2008 secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas Pertanian.

Pemasaran produk pertanian merupakan aspek penting dalam mata rantai tataniaga. Suatu produk harus dapat dipasarkan agar kegiatan produksi dapat terus berlangsung dan menguntungkan. Berkaitan dengan hal ini, Departemen Pertanian akan mengembangkan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih mendorong pengembangan dan peningkatan pemasaran komoditas pertanian.

2) Pengembangan Bahan Baku Bio-Energi

Indonesia sebagai negara agraris memiliki aneka ragam komoditas penghasil minyak nabati seperti kelapa sawit, kelapa, jarak pagar sebagai bahan baku diesel (substitusi solar) dan minyak bakar (substitusi minyak tanah). Disamping itu, ubi kayu, sorgum, jagung dan tetes tebu juga dapat dijadikan sebagai bahan baku gasohol (substitusi premium) dan penghasil limbah organik (biomassa). Potensi tersebut perlu terus dikembangkan dengan menyediakan bahan

baku produksi tanaman penghasil bio-energi dan sarana pengolahannya.

3) Pengembangan Desa Mandiri Energi

Bahan bakar minyak semakin berkurang ketersediaannya. Untuk itu perlu diupayakan mengembangkan alternatif energi sebagai pengganti bahan bakar minyak. Upaya-upaya ini tidak hanya dilakukan di perkotaan tetapi juga di perdesaan. Sebagai basis sektor pertanian, perdesaan memiliki potensi besar untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif penghasil minyak nabati, sehingga pada gilirannya bahkan dapat menjadi mandiri dalam penyediaan energi alternatif.

4) Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)

Penggunaan alsin pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh petani khususnya tanaman pangan dalam mempercepat pengolahan tanah, pengendalian hama, penanganan panen dan perontokan khususnya di daerah intensifikasi. Namun demikian jumlah alsin pertanian saat ini masih sangat sedikit dibanding dengan luas lahan yang ada, serta belum optimumnya penggunaan alsintan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan upaya bantuan penyediaan penguatan modal pengadaan alsintan bagi petani-peternak berupa pembayaran uang muka (*down payment*) melalui kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (KUPJA).

5) Pengembangan Agroindustri Perdesaan

Produksi pertanian di perdesaan kebanyakan masih dalam bentuk produk primer. Untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja dan berusaha di bidang usaha pertanian, maka diperlukan penumbuhan industri berbasis pertanian (agroindustri) di tingkat perdesaan. Upaya pengembangan agroindustri

di tingkat perdesaan disamping untuk sarana peningkatan nilai tambah juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan menekan tingkat urbanisasi.

6) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas

Salah satu kegiatan terobosan yang mulai dilakukan pada tahun 2007 adalah pengembangan pilot-pilot percontohan integrasi tanaman-ternak, kompos dan biogas di tingkat perdesaan. Kegiatan seperti ini sudah dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian pada dua tahun terakhir ini perlu dilanjutkan, dan ke depan akan semakin diperluas cakupan komoditas dan wilayahnya.

7) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat

Komoditas utama yang saat ini banyak diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat antara lain karet, sawit dan kakao. Namun sebagai negara dengan luas areal perkebunan terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi kendala rendahnya produktivitas, terutama pada perkebunan rakyat yang merupakan mayoritas. Rendahnya produktivitas ini terutama sebagai akibat banyaknya tanaman yang telah tua, rusak dan tidak produktif lagi, penggunaan bibit bukan klon unggul, dan kondisi kebun yang tidak terawat.

8) Peremajaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis

Untuk menarik investor masuk ke sektor pertanian, mempermudah aksesibilitas dan distribusi sarana produksi dan output pertanian, diperlukan infrastruktur yang memadai. Selama ini investasi pemerintah di bidang infrastruktur sangat minim, sehingga banyak jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi yang rusak. Untuk itu diperlukan kegiatan pembangunan dan atau rehabilitasi jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi

tingkat usahatani, jaringan irigasi perdesaan, tata air mikro, irigasi tanah dangkal, sumur resapan, embung, waduk, dam parit, terasering dan lainnya.

9) Mekanisasi Kegiatan Pertanian Pasca Panen dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis

Untuk mengurangi kehilangan, meningkatkan mutu hasil dan nilai tambah produk pertanian serta penanganan pemasaran, akan dikembangkan berbagai sarana pasca panen seperti: (1) pengembangan sarana penyelamatan pasca panen (pengeringan melalui terpalisasi dan pengembangan sarana pengering surya), dan (2) sarana pergudangan.

10) Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu.

Produksi pertanian di perdesaan kebanyakan masih dalam bentuk produk primer. Untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja dan berusaha di bidang usaha pertanian, maka diperlukan penumbuhan industri berbasis pertanian (agroindustri) di tingkat perdesaan. Upaya pengembangan agroindustri di tingkat perdesaan disamping untuk sarana peningkatan nilai tambah juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan menekan tingkat urbanisasi.

11) Pengembangan Pertanian Organik dan Lingkungan Hidup

Tingkat kesadaran akan perlu dan pentingnya kesehatan dan bersihnya lingkungan hidup makin meningkat. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini usaha pertanian banyak mempergunakan bahan kimia dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Berkaitan dengan dua hal tersebut, maka sektor pertanian telah mulai mengembangkan usaha pertanian yang sedikit mungkin atau bebas sama

sekali dari penggunaan bahan kimia, atau dengan kata lain mengembangkan usaha pertanian organik.

12) Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis

Selama ini penggunaan benih/bibit unggul bermutu di tingkat petani masih rendah, termasuk benih/bibit komoditas agribisnis non-pangan. Untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian, Departemen Pertanian akan melakukan upaya bantuan benih/bibit unggul bermutu bagi petani. Upaya ini diharapkan juga akan mampu menekan harga benih/bibit bermutu komoditas agribisnis non-pangan sehingga dapat diakses petani/peternak.

13) Penguatan Kelembagaan Perbenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis

Benih/bibit merupakan faktor esensial dalam berusaha tani. Untuk ini, maka perlu penguatan kelembagaan perbenihan/perbibitan yang bertugas menghasilkan benih/bibit unggul dan bermutu, tak terkecuali untuk komoditas agribisnis non-pangan.

14) Penelitian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis

Pembangunan pertanian perlu didukung oleh teknologi, sehingga dapat dipercepat dan memberikan hasil yang optimal. Untuk keperluan ini, upaya percepatan penemuan inovasi dan alih teknologi sangat dibutuhkan. Upaya pengembangan dan diseminasi teknologi akan dilaksanakan oleh unit-unit penelitian yang ada di lingkup Departemen Pertanian.

15) Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan kepada Petani/Pelaku Agribisnis

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak akan dapat terjadi tanpa keterlibatan seluruh stakeholders. Dalam upaya lebih merangsang dan meningkatkan motivasi berusahatani bagi stakeholders, maka Departemen Pertanian merencanakan untuk melakukan kegiatan eksibisi, perlombaan, dan memberikan penghargaan kepada para pelaku pembangunan pertanian.

5.3.3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani tahun 2008 adalah: (1) Pembentukan/Pengaktifan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, (2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK, PUAP dan LM3 (PNPM-P), (3) Pengembangan Magang Sekolah Lapang, (4) Peningkatan Sistem Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia Pertanian, (5) Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) (PNPM-P), (6) Pengembangan Kegiatan Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis, (7) Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal dan Perbatasan (termasuk dana dekonsentrasi untuk pendamping proyek IFAD-READ, dan pembiayaan Inpres terkait (seperti Inpres No.2 th 2007 tentang Lahan Gambut), dan (8) Peningkatan Pengarusutamaan Gender. Masing-masing kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani tahun 2008 secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan)

Dalam rangka memperkuat kelembagaan pertaniandanmempermudahpembinaanterhadap kelompok tani, maka pada tahun 2008 akan lebih diintensifkan lagi kegiatan Revitalisasi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di tingkat perdesaan yang sudah dirintis sejak tahun 2007. Revitalisasi ini dimaksudkan untuk membentuk dan atau mengaktifkan kembali serta memperkuat kelembagaan petani yang ada. Dengan pola ini diharapkan pembinaan pemerintah kepada petani akan semakin terfokus dengan sasaran yang jelas.

2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK, PUAP dan LM3

Salah satu kendala utama petani di Indonesia dalam mengembangkan usahanya adalah terbatasnya modal dan lemahnya kemampuan akses terhadap sumber permodalan. Untuk meningkatkan *bargaining power* petani, pemberdayaan petani akan dilakukan dengan pendekatan kelompok agar mempermudah pembinaan dan pengembangan usahanya dapat mencapai skala ekonomi.

Dalam rangka mengatasi permodalan petani, akan disalurkan stimulan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) atau yang selama ini dikenal dengan nama Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kegiatan PMUK ini akan disertai dengan kegiatan pengembangan kelembagaan petani, kemitraan, peningkatan akses terhadap sumberdaya, teknologi dan pasar serta peningkatan kualitas SDM petani. Di samping kelompok tani, di tingkat perdesaan terdapat pula lembaga yang selama ini tumbuh dan mengakar di masyarakat, atau yang dikenal dengan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Sebagian besar LM3 tersebut berbasis keagamaan: pondok pesantren, seminari, paroki, pasraman, vihara, pura, subak dan lainnya. Sebagian LM3 juga bergerak di bidang agribisnis. LM3 yang bergerak di bidang agribisnis ini dapat

dijadikan sebagai percontohan dan pusat-pusat pengembangan agribisnis di lokalita setempat.

Selain itu, untuk menjembatani kesenjangan antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan, maka pada 2008 digulirkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diharapkan kedepan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan. Dalam rangka penumbuhan lembaga tersebut pemerintah perlu memberi dukungan dalam bentuk *seed capital* kepada desa-desa yang menjadi sasaran, di mana direncanakan tahun 2008 desa yang akan menjadi sasaran sejumlah 10 ribu desa.

3) Pengembangan Magang Sekolah Lapang

Metode yang dirasakan praktis dan mudah diikuti petani dalam alih teknologi adalah metode Sekolah Lapang (SL) Pertanian. Disamping mudah diikuti metode ini juga menarik bagi petani karena dapat langsung diterapkan oleh petani saat mereka melakukan aktivitas usahanya. Untuk itu pada tahun 2008 akan diperbanyak kegiatan-kegiatan SL Pertanian. Selanjutnya SL Pertanian tersebut akan diarahkan menjadi media *training of trainers* (TOT) dengan sasaran lebih berkembangnya SL Pertanian yang diinisiatif oleh lulusan TOT. Dengan demikian pada masa yang akan datang pemerintah akan lebih banyak mengarahkan kegiatan SL Pertanian ini, tidak lagi perlu membentuk SL-SL baru yang difasilitasi pemerintah.

4) Peningkatan Sistem Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia Pertanian

Selama ini terdapat kecenderungan terjadi transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, dimana para pemuda/pemudi di perdesaan lebih tertarik bekerja sebagai buruh di sektor industri maupun di sektor informal, sehingga penduduk yang masih bekerja di sektor pertanian tinggal yang berumur tua. Untuk

menarik minat para pemuda/pemudi kembali membangun pertanian di perdesaan, diperlukan langkah-langkah kegiatan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, magang, studi banding dan lainnya. Disamping itu dalam rangka revitalisasi penyuluhan kegiatan diarahkan pada pengembangan dan pemantapan BPP yang ada, rekrutmen tenaga penyuluh, pelatihan dan pendampingan serta perbaikan metodologi penyuluhan yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Di tingkat perdesaan akan dikembangkan *Community Center for Agribusiness* yang merupakan kelembagaan layanan informasi pertanian di tingkat desa untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi dan teknologi.

5) Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)

Kebutuhan investasi untuk mengembangkan sektor pertanian cukup besar yang tidak mungkin seluruhnya disediakan Pemerintah. Sementara itu dana yang dimiliki masyarakat berpotensi besar digerakkan untuk membiayai investasi sektor pertanian. Dalam rangka merangsang investasi di sektor pertanian tersebut diperlukan bantuan langsung kepada masyarakat agar mampu meringankan beban investasi yang berasal dari modal pinjaman (BLM-KIP).

6) Pengembangan Kegiatan Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Tingkat pendidikan dan keterampilan petani yang masih rendah memerlukan latihan, khususnya pada aspek yang bersifat praktis dan langsung berhubungan dengan aktivitas usaha ekonomi petani. Untuk itu pada tahun 2008 akan dikembangkan kegiatan berbagai pelatihan bagi petani yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan petani.

7) Peningkatan Pengarusutamaan Gender

Sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan pembangunan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan pertanian perlu dipahami oleh seluruh jajaran Departemen Pertanian mulai dari tingkat pejabat selaku pengambil keputusan hingga kepada petugas pelaksana di lapangan. Melalui strategi ini diharapkan fasilitasi pemerintah melalui Departemen Pertanian dapat diterima manfaatnya oleh setiap unsur pelaku usaha di bidang pertanian baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda yang pada dasarnya memiliki aspirasi, permasalahan, kebutuhan dan pengalaman yang bersifat spesifik lokal.

5.3.4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengawasan aparatur negara dan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah terwujudnya sistem pengawasan yang akuntabel di lingkungan pertanian. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara akan diisi dengan kegiatan Penyelesaian Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian di lingkup Pertanian.

5.3.5. Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja Departemen Pertanian dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pembangunan pertanian. Sedangkan sasaran program ini adalah: (1) meningkatnya manajemen pemerintahan yang dapat mendukung peningkatan kinerja Departemen Pertanian dan para pegawainya, dan (2) meningkatnya penerapan prinsip *good governance* di Departemen Pertanian. Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik akan diisi dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan

Program, Monev dan Database di samping untuk membiayai belanja mengikat pemerintah di Departemen Pertanian.

Tahun 2008 anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kelima program tersebut sebesar Rp.9,195 triliun, dengan rincian: 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PPKP) sebesar Rp.3,416 triliun; 2) Program Pengembangan Agribisnis (PPA) sebesar Rp.1,792 triliun; 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPKPt) sebesar Rp.2,824 triliun; 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2 & A2N) sebesar Rp.0,024 triliun; dan 5) Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik (PPKB) sebesar Rp.1,139 triliun.

Pelaksanaan dari seluruh anggaran tersebut tersebar di 3.360 buah Satuan Kerja (Satker) baik di Pusat dan Daerah. Secara rinci jumlah dan sebaran dari masing-masing Satker yang menjadi tanggung jawab Eselon I adalah sebagai berikut: a) Setjen: 13 Satker; b) Itjen: 1 Satker; c) Ditjen Perkebunan: 296 Satker; d) Ditjen Peternakan: 407 Satker; e) Ditjen Tanaman Pangan: 464 Satker; f) Ditjen Hortikultura: 286 Satker; g) Ditjen PLA: 696 Satker; h) P2HP: 667 Satker; i) Badan Litbang Pertanian: 65 Satker; j) Badan PSDM-P: 128 Satker; k) Badan Ketahanan Pangan: 252 Satker; dan l) Badan Karantina Pertanian: 85 Satker.

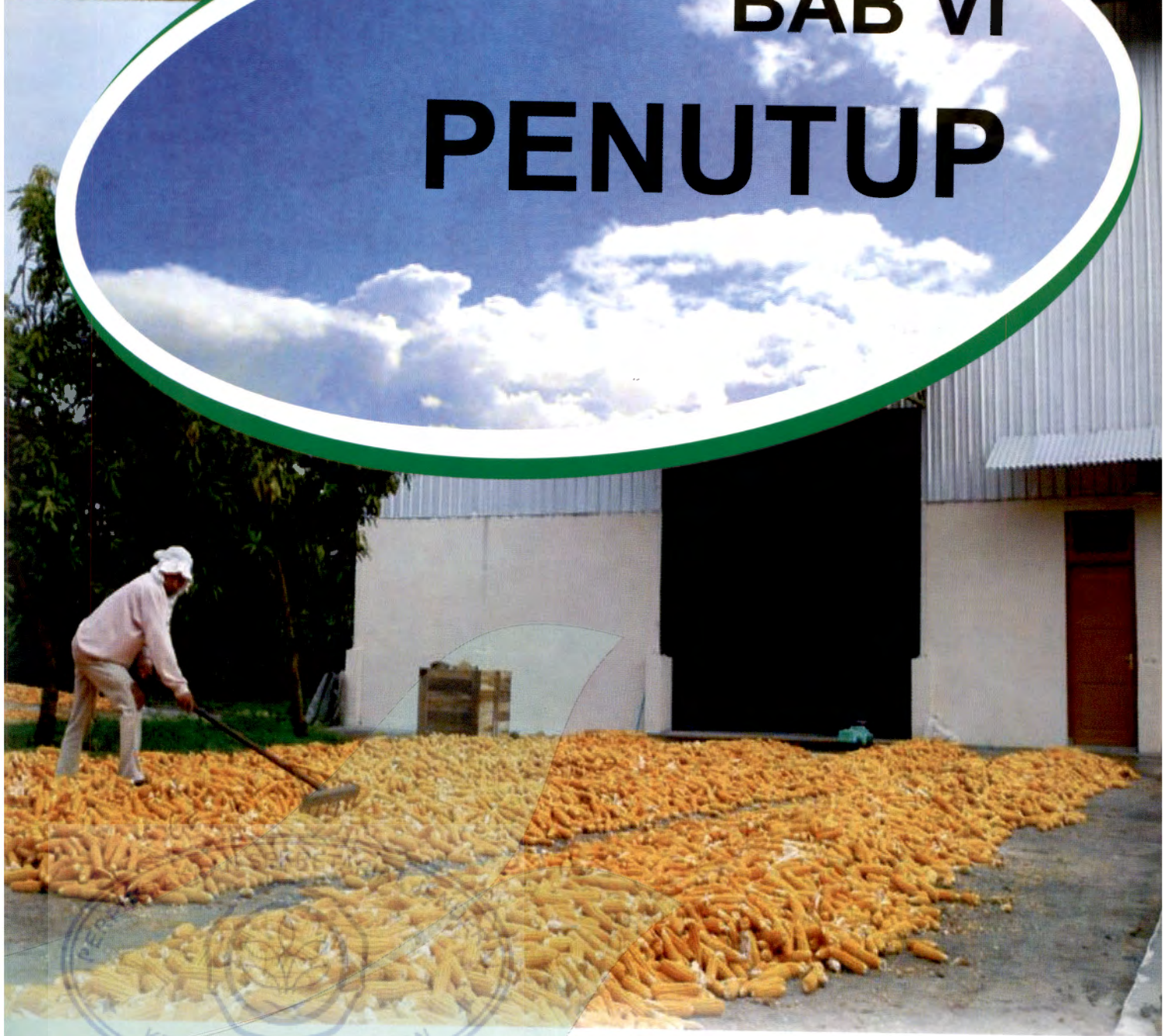
Memperhatikan surat Menteri Keuangan No: S-1/MK.02/2008 tanggal 2 Januari 2008, tentang: Langkah Dasar Penghematan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga, Departemen Pertanian telah melakukan langkah-langkah yaitu dengan pemberian tanda bintang yang merupakan penundaan pada beberapa kegiatan sebesar Rp.1,379 triliun (15%). Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan subsidi pangan. Tindaklanjut dari langkah-langkah tersebut, pagu anggaran Departemen Pertanian tahun 2008 menjadi Rp. 7,816 triliun.



DEPARTEMEN PERTANIAN



BAB VI PENUTUP



Selama 3 tahun (2005-2007) pelaksanaan pembangunan pertanian pada Kabinet Indonesia Bersatu kinerjanya cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebijakan strategis dan program yang dilaksanakan benar-benar terfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Hasilnya telah ditunjukkan oleh peningkatan beberapa indikator makro ekonomi seperti: PDB Pertanian, Nilai Tukar Petani, investasi dibidang pertanian dan penyerapan tenaga kerja, neraca perdagangan. Selain itu, juga ditunjukkan oleh peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian, seperti: padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, tebu, kakao, sayuran dan buah-buahan, daging, telur dan susu. Peningkatan kinerja tersebut juga tidak terlepas dari semakin mantapnya manajemen dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian serta dukungan infrastruktur pertanian.

Produksi padi tahun 2007 Angka Ramalan III mencapai 57,07 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 2,59 juta ton GKG atau 4,76% dibanding produksi tahun 2006. Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang belum pernah dicapai selama ini.

Peningkatan tersebut terjadi diluar Jawa 1,92 juta ton (7,85%) yang lebih disebabkan oleh naiknya luas panen sebesar 370,59 ribu hektar (6,09%) dan produktivitas sebesar 0,66 kw/ha (1,64%) dan di Jawa 0,67 juta ton (2,24%) disebabkan oleh peningkatan luas panen seluas 8,58 ribu ha (0,15%) dan produktivitas sebesar 1,09 kw/ha (2,08%).

Produksi jagung tahun 2007 (ARAM III) mencapai 13,28 juta ton pipilan kering, naik 1,67 juta ton atau 14,39% dibandingkan produksi tahun 2006. Pencapaian produksi jagung tahun 2007, sama halnya dengan produksi padi. Kenaikan produksi tersebut disebabkan karena kenaikan luas panen seluas 273,61 ribu hektar (8,18%) dan kenaikan produktivitas sebesar 1,99 kuintal/hektar (5,73%).

Secara keseluruhan produksi hortikultura menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi sebagai akibat pertambahan luas areal tanam sebelumnya, semakin banyaknya tanaman yang menghasilkan dari pertanaman sebelumnya, berkembangnya teknologi produksi yang diterapkan petani, semakin intensifnya bimbingan dan fasilitasi kepada petani dan pelaku usaha, semakin baiknya manajemen usaha, dan adanya penguatan kelembagaan agribisnis petani.

Populasi ternak ruminansia yaitu: sapi potong 11,4 juta ekor naik 4,5 persen, sapi perah 0,4 juta ekor naik 2,4 persen, kerbau 2,2 juta ekor naik 3,7 persen, kambing 14,9 juta ekor naik 3,7 persen, dan domba 9,9 ekor naik 9,8 persen dari tahun 2006. Sedangkan populasi ternak non ruminansia yaitu babi 6,8 juta ekor naik 8,7 persen, kuda 0,4 juta ekor naik 3,6 persen, ayam buras 317,4 juta ekor naik 9,1 persen, ayam ras petelur 106,9 juta

ekor naik 6,7 persen, ayam ras pedaging 920,8 juta ekor naik 15,5 persen dan itik 34,1 juta ekor naik 4,9 persen dari tahun 2006.

Luas areal perkebunan tahun 2007 berdasarkan angka estimasi dari 17.632.428 ha naik 0,45% menjadi 17.710.991 ha dibandingkan tahun 2006, sedangkan produksi perkebunan tahun 2007 dari 26.058.668 ton menjadi 27.034.230 ton naik 3,74 % dibandingkan tahun 2006.

Sejalan dengan kenaikan produksi beberapa komoditas strategis diatas, berpengaruh terhadap peningkatan indikator makro ekonomi. Pertumbuhan PDB pertanian menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2005-2007. Pada tahun 2007, secara kumulatif sektor pertanian tumbuh 2,44 persen (Triwulan II, 2005 – 2007, BPS 2007, berdasar harga konstan tahun 2000). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh subsektor perkebunan (2,80 %), peternakan (2,41 %) dan tanaman bahan makanan (2,30 %). Sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada tahun 2007 mencapai 10,98 persen, dengan kontribusi terbesar dari subsektor tanaman bahan makanan 6,96 persen, subsektor perkebunan 2,31 persen dan subsektor peternakan 1,70 persen.

Pendapatan tenaga kerja pertanian setelah menurun pada tahun 1998-1999, juga meningkat konsisten selama periode tahun 2000-2004. Rata-rata pendapatan tenaga kerja pada pada tahun 2003 sebesar Rp 5,09 juta dan meningkat menjadi Rp 5,49 juta pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 7,8 persen. Pada tahun 2005 dan 2006 rata-rata pendapatan tenaga kerja pertanian meningkat lagi menjadi masing-masing Rp 6,09 juta dan Rp 6,55 juta.

Minat investasi di bidang pertanian primer (diluar kehutanan dan perikanan) sepanjang 2004-2006 menunjukkan peningkatan cukup tajam. Persetujuan PMDN meningkat 126 % dari Rp 1,92 triliun tahun 2004 menjadi Rp 4,34 triliun tahun 2005, meningkat 54,61 % atau Rp.6,71 triliun tahun 2006, sampai dengan Agustus 2007 mencapai Rp. 17,25 triliun. Persetujuan PMA meningkat 122 % dari 208,30 juta dollar AS tahun 2004 menjadi 461,80 juta dollar AS tahun 2005, kemudian meningkat lagi 44,98 % menjadi 669,50 juta dollar AS tahun 2006 dan tahun 2007 meningkat menjadi 974,1 juta dolar AS.

Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai 40,61 juta orang tahun 2004, dan tahun 2005 mencapai 41,81 juta orang, tahun 2006 penyerapan tenaga kerja pertanian menurun menjadi 40,14 juta orang, dan tahun 2007 diperkirakan akan meningkat pula.

Neraca perdagangan komoditas pertanian (diluar kehutanan dan perikanan) mengalami peningkatan pada periode 2004-2006. Nilai ekspor komoditas pertanian tahun 2004 mencapai US\$ 9,9 milyar naik menjadi US\$ 11,6 milyar tahun 2005 dan naik kembali mencapai US\$ 14,9 milyar tahun 2006, namun pada bulan Juni 2007 nilai ekspor mengalami penurunan menjadi US\$ 8,12 milyar (sumber BPS diolah Pusdatin Deptan). Nilai impor komoditas pertanian pada periode yang sama mengalami peningkatan yang relatif kecil, yaitu dari US\$ 5,0 milyar tahun 2004 menjadi US\$ 5,1 milyar tahun 2005, dan US\$ 6,0 milyar tahun 2006 serta pada bulan Juni 2007 menurun sebesar US\$ 3,30.

Jakarta, Januari 2008.



SPINGHEL SURUH
 Panganan yang berbahan dasar suban dicampur dengan telur, gula pasir, margarin dan susu kental manis.
 Kandungan Energi per porsi (20 gram) ± 55 Kkal



TART PISANG TUMPAKALAMET
 Panganan yang berbahan dasar pisang yang dicampur dengan gula pasir, margarin dan susu kental manis dengan tambahan almond.
 Kandungan Energi per porsi (20 gram) ± 55 Kkal



KROKET SURUH
 Panganan yang berbahan dasar suban dicampur dengan telur, gula pasir, margarin dan susu kental manis.
 Kandungan Energi per porsi (20 gram) ± 55 Kkal



TALAM SURUH
 Panganan yang berbahan dasar suban dicampur dengan telur, gula pasir, margarin dan susu kental manis dengan tambahan almond dan kacang tanah.
 Kandungan Energi per porsi (20 gram) ± 70 Kkal



LUMAYU
 Panganan yang berbahan dasar suban dicampur dengan telur, gula pasir, margarin dan susu kental manis.
 Kandungan Energi per porsi (20 gram) ± 55 Kkal





DEPARTEMEN PERTANIAN

Jl. Harsono RM No. 3, Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp. 62-21-7806131-7804116, Fax. 62-21-783237
<http://www.deptan.go.id>